

Pemantauan
DEFORESTASI
INDONESIA
TAHUN 2021-2022



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2023



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemantauan
DEFORESTASI
INDONESIA
TAHUN 2021-2022

Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022

Penulis	: Meniy Ratnasari, S.Hut, M.Sc Iid Itsna Adkhi, S.Hut Dr. Widyanto Basuki Aryono, S.Hut, M.Sc Fareza Ditya Aryanto, S.Hut Dewi Rahma Nur Afifah, A. Md
Penanggung Jawab	: Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati Margono, M. Sc. (Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)
Ketua Tim	: Judin Purwanto, S.Hut, M.Si (Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Kehutanan)
Editor	: Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si
Layout dan Peta	: Fareza Ditya Aryanto, S.Hut Dewi Rahma Nur Afifah, A. Md
Kontributor Data	: Badan Riset dan Inovasi Nasional Badan Informasi Geospasial Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Jaringan Informasi Geospasial Kementerian LHK
Diterbitkan oleh	: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sitasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022*. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

*© Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023*

Alamat surat:

Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270
Email simontana@menlhk.go.id
Telp. (021) 5730335-5730292
Fax. (021) 5730335

KATA PENGANTAR

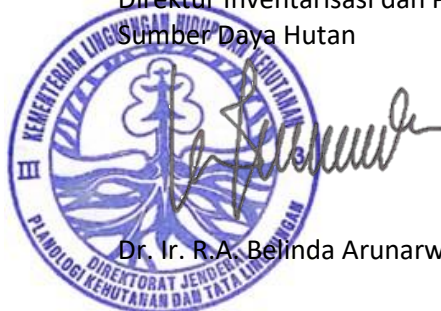
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penyusunan buku Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 dapat terselesaikan dengan baik. Penghitungan deforestasi Indonesia telah dilakukan secara periodik, dengan menggunakan data dan informasi sejak tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya konsisten dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam rangka mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Sumberdaya Hutan Nasional yang berkualitas. Penyajian data dan Informasi yang baik dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.

Buku ini menyajikan Luas Deforestasi Tahunan baik Deforestasi Bruto maupun Deforestasi Netto pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan data penafsiran Citra Landsat LDCM (*The Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2021 dan 2022 untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengapa ada informasi deforestasi bruto dan deforestasi netto? Itu agar dapat memberikan informasi perubahan kondisi hutan secara lengkap, didukung oleh data yang memadai. Namun demikian penggunaan angka apakah angka deforestasi bruto atau netto saja, atau semua kelas hutan atau hutan alam saja, tentu disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Perhitungan Deforestasi Netto lebih ditujukan untuk memberikan informasi perubahan/pengurangan luas penutupan lahan hutan/berhutan pada periode tertentu dengan mempertimbangkan hasil penghitungan reforestasi. Lebih lanjut perhitungan juga dibedakan atas yang hanya terjadi pada hutan alam, maupun secara keseluruhan dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman. Hal ini untuk membedakan kejadian yang terjadi secara alami, dengan kejadian sebagai akibat aktivitas manusia. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, diagram, serta peta untuk seluruh wilayah Indonesia guna mempermudah penyerapan informasi dan data.

Dengan memperhatikan hasil pemantauan perubahan tutupan hutan dari tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat bahwa Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 %. Secara umum luas deforestasi yang dinamis setiap tahunnya disebabkan oleh perubahan penutupan lahan akibat aktifitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan pengurangan maupun penambahan penutupan hutan. Selain itu, sebagaimana periode sebelumnya, dinamika penutupan hutan di kawasan hutan juga menunjukkan sebaran yang bervariasi pada berbagai fungsi kawasan hutan.

Akhir kata segala masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Semoga data dan informasi pada buku ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan kehutanan.

Jakarta, 2023
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan



Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati Margono, M. Sc.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Keterkaitan Deforestasi Indonesia dengan Dunia Internasional	2
C. Tujuan	5
D. Sasaran.....	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Batasan Istilah.....	7
BAB II METODOLOGI	11
A. Sumber Data	11
B. Analisis dan Penyajian Data	14
BAB III HASIL PENGHITUNGAN DEFORESTASI INDONESIA	18
A. Deforestasi Indonesia	18
(1) Deforestasi Bruto Indonesia	18
(2) Reforestasi Indonesia.....	21
(3) Deforestasi Netto Indonesia	23
a. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	23
b. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Tipe Hutan	24
c. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Fungsi Kawasan Hutan	25
d. Sebaran Deforestasi Netto menurut Kelompok Pulau	26
B. Deforestasi Indonesia per Provinsi	27
(1) Deforestasi Bruto Indonesia per Provinsi	27
(2) Reforestasi Indonesia per Provinsi.....	28
(3) Deforestasi Netto Indonesia per Provinsi	30
C. Deforestasi Indonesia per Fungsi Kawasan Hutan	31
(1) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK)	32
(2) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)	34
(3) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Produksi	37
a. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).....	37
b. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	40
c. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) ...	43
(4) Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL).....	46

BAB IV SEBARAN DAN PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA	49
A. Sebaran Deforestasi Indonesia	49
B. Perkembangan Deforestasi Indonesia	50
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran dan Rekomendasi.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Sistem Klasifikasi Penutupan Lahan (23 Kelas) disertai kode layer dan kode toponimi.....	11
Tabel II. 2 Logika penentuan suatu poligon hasil analisis perubahan penutupan lahan termasuk sebagai H, NH, DEF, atau REF	15
Tabel III. 1 Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribuan Ha) Tahun 2020-2021.....	23
Tabel III. 2 Deforestasi Netto pada Fungsi Kawasan Hutan (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	26
Tabel III. 3 Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022 ..	26
Tabel III. 4 Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022.....	27
Tabel III. 5 Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022.....	32
Tabel III. 6 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha	33
Tabel III. 7 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran <100,0 ha	33
Tabel III. 8 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022.....	35
Tabel III. 9 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran >1 ribuan ha	36
Tabel III. 10 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran 100,0 – <1.000,0 ha.....	36
Tabel III. 11 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran <100,0	37
Tabel III. 12 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	38
Tabel III. 13 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran >1.000 ha	39
Tabel III. 14 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran 100,0-1.000,0 ha.....	40
Tabel III. 15 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT di bawah 100 ha	40
Tabel III. 16 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	41
Tabel III. 17 Luas Deforestasi pada Kawasan HP >1.000 ha.....	42
Tabel III. 18 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dalam kisaran 100–1000 ha	42
Tabel III. 19 Luas Deforestasi pada Kawasan HP < 100 ha	43
Tabel III. 20 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dengan angka negatif.....	43
Tabel III. 21 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	44
Tabel III. 22 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha	45
Tabel III. 23 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK kurang dari 100 ha	45
Tabel III. 24 Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022.....	46
Tabel III. 25 Luas Deforestasi pada APL lebih dari 1.000 ha	47
Tabel III. 26 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran 100,0–1000,0 ha.....	47
Tabel III. 27 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran kurang dari 100,0 ha.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Proses Perhitungan Deforestasi Indonesia.....	17
Gambar 2. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2021-2022 (Ribuan ha) pada Hutan Primer, Sekunder dan Tanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	19
Gambar 3. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2021-2022 (Ribuan Ha)	19
Gambar 4. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia tahun 2021-2022 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan	20
Gambar 5. Diagram Deforestasi Bruto Hutan Alam tahun 2021-2022 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	20
Gambar 6. Diagram Reforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 (Ribuan Ha).....	22
Gambar 7. Diagram Reforestasi tahun 2021-2022 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.....	22
Gambar 8. Diagram Reforestasi Hutan Alam tahun 2021-2022 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	23
Gambar 9. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	23
Gambar 10. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (APL)	24
Gambar 11. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	25
Gambar 12. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam Kawasan Hutan	25
Gambar 13. Diagram Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022	26
Gambar 14. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	27
Gambar 15. Grafik Deforestasi Bruto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	28
Gambar 16. Grafik Deforestasi Bruto Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	28
Gambar 17. Grafik Reforestasi per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	29
Gambar 18. Grafik Reforestasi Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022	30
Gambar 19. Grafik Deforestasi Netto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022.....	31
Gambar 20. Grafik Deforestasi Netto Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022.....	31
Gambar 21. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022.....	49
Gambar 22. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2022 ...	50

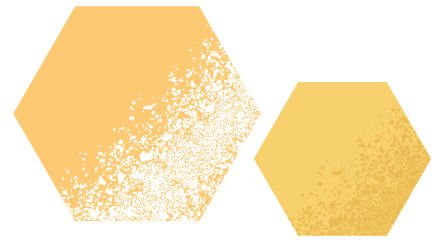
DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Deforestasi Bruto dan Reforestasi Indonesia
di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022
- Lampiran 2 Deforestasi Indonesia dan Deforestasi per Pulau
di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022
- Lampiran 3 Deforestasi dan Peta Deforestasi per Provinsi
di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang keberadaannya perlu dipertahankan sebaik-baiknya, untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fungsi dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hutan itu sendiri memiliki fungsi dan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan, berdasarkan pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 2 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Upaya untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan menghadapi tantangan yang sangat besar. Penutupan hutan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan sangatlah dinamis. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi kondisi hutan di beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya atau berkurang luasnya. Untuk memastikan bahwa setiap perubahan luasan hutan di seluruh Indonesia diketahui, maka pemantauan perubahan penutupan hutan serta terjadinya deforestasi dan reforestasi di seluruh wilayah Indonesia terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut untuk menjamin terjadinya perubahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat di lapangan.

Menjawab kebutuhan kedinamisan perubahan tutupan hutan Indonesia tersebut, dan guna menjamin bahwa tersedia sebuah informasi perubahan tutupan lahan secara berkesinambungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah membangun sebuah sistem pemantauan hutan nasional sejak tahun 2000, untuk melakukan penghitungan deforestasi Indonesia secara periodik dengan menggunakan data pengamatan dari tahun 1990.

Dengan menggunakan sistem tersebut, informasi yang lebih konsisten yang mencakup hasil perhitungan deforestasi sebagai berikut dapat disajikan. Sebagai gambaran umum, kami menyajikan informasi deforestasi sebagai berikut, tahun 1990-1996 terjadi deforestasi yaitu sebesar 1,87 juta ha/tahun, tahun 1996-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun, tahun 2000-2003 sebesar 1,08 juta ha/tahun, tahun 2003-2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun, tahun 2006-2009 sebesar 0,83 juta ha/tahun, tahun 2009-2011 sebesar 0,45 juta ha/tahun, tahun 2011-2012 sebesar 0,61 juta ha, tahun 2012-2013 sebesar 0,73 juta ha, tahun 2013-2014 sebesar 0,40 juta ha, tahun 2014-2015 sebesar 1,09 juta ha,

tahun 2015-2016 sebesar 0,63 juta ha, tahun 2016-2017 sebesar 0,48 juta ha, tahun 2017-2018 sebesar 0,44 juta ha, tahun 2018-2019 sebesar 0,46 juta ha, tahun 2019-2020 sebesar 0,12 juta ha. Deforestasi pada periode penghitungan terakhir yaitu tahun 2020-2021 diperoleh nilai sebesar 0,11 juta ha. Dalam setiap periode pengamatan, besaran deforestasi dapat mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, diketahui beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya deforestasi dari tahun ke tahun, antara lain konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, (misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal logging*); aktivitas pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain secara legal; pertambangan, perambahan dan penguasaan lahan ilegal (*illegal land-occupation*); kebakaran hutan), serta bencana alam. Di sisi lain, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang belum optimal mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis. Seiring dengan meningkatnya deforestasi, kerusakan lingkungan pun dapat dirasakan meningkatnya.

B. Keterkaitan Deforestasi Indonesia dengan Dunia Internasional

Saat ini, deforestasi bukan hanya menjadi perhatian tingkat nasional tetapi juga telah menjadi perhatian di dunia internasional. Hal tersebut karena dampak dari terjadinya deforestasi dirasakan cukup meluas. Untuk mengatasi dampak tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan pada tingkat nasional tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kesepakatan pengurangan deforestasi. Keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan pengurangan deforestasi dilandasi dengan Komitmen Indonesia secara Internasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, antara lain ditandai dengan terbitnya kesepakatan *Bali Action Plan* pada *The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Bali, dilanjutkan dengan pembahasannya pada COP-15 di Copenhagen, COP-16 di Cancun dan COP-21 di Paris. Penandatanganan komitmen ini dipicu oleh munculnya ketidakseimbangan daya dukung lingkungan hidup yang diindikasikan oleh berbagai bencana alam di seluruh dunia. Banyaknya kejadian bencana alam tersebut disinyalir salah satunya merupakan akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan, yang kemudian mengakibatkan perubahan suhu bumi. Hal tersebut memberikan dampak negatif dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Usaha untuk menurunkan deforestasi adalah salah satu upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang saat ini makin dirasakan dampaknya bagi kehidupan manusia di muka bumi.

Tahun 2016 Indonesia menyampaikan laporan ke dunia Internasional secara transparan melalui *3rd National Communication* tentang angka emisi Indonesia dari sektor lahan yang mencakup emisi dari deforestasi dan emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu, Indonesia juga memberikan komitmen yang tinggi kepada dunia dalam

pengendalian perubahan iklim, termasuk penurunan emisi dari sektor lahan, yang dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia untuk menandatangani dan kemudian meratifikasi *Paris Agreement*. Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang RI No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Undang-undang tersebut dilengkapi pengajuan secara formal ambisi Indonesia yang lebih dikenal sebagai *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia ke UNFCCC pada tahun yang sama. Di dalam NDC-nya, Indonesia menyampaikan target komitmen penurunan emisi sampai dengan tahun 2030 dari sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya sebesar 29% (dengan kemampuan sendiri) sampai dengan 41% (dengan dukungan internasional) dari emisi *Bussines As Usual* (BAU) (NDC Indonesia, 2016). Dalam dokumen NDC tersebut, dua sektor unggulan mempunyai target penurunan yang cukup signifikan, yaitu sektor kehutanan termasuk *Land Use Land Cover Change* dan Lahan Gambut dengan target sebesar 17,2% s.d. 23% serta sektor energi dengan target sebesar 11% s.d. 14%.

Pelaporan terkait pengendalian perubahan iklim dan NDC membutuhkan pengamatan berkelanjutan terhadap kondisi sumber daya hutan, termasuk deforestasi. Pengamatan terjadinya deforestasi di seluruh Indonesia, selain dilakukan secara mandiri oleh Indonesia, juga telah dilakukan oleh beberapa institusi lain di seluruh dunia. Penelitian dan studi oleh berbagai institusi dunia yang pernah dilakukan terkait deforestasi di Indonesia memberikan informasi dinamika penutupan hutan. Penelitian-penelitian tersebut didasarkan pada studi yang terpisah, menggunakan metode, data, dan informasi yang heterogen, sehingga tidak mudah dibandingkan antara satu dengan lainnya. Walaupun begitu, penelitian tersebut tetap mampu memberikan informasi secara indikatif dinamika penutupan hutan Indonesia.

Terkait dengan paragraf di atas, berikut kami sajikan beberapa contoh hasil penelitian terkait dinamika penutupan hutan Indonesia:

- i. Revilla (1993) melakukan penelitian berdasarkan analisis pada **62 pasangan citra** Landsat cetak seluruh wilayah Indonesia (yang meliputi $\pm 32\%$ wilayah darat Indonesia) perolehan tahun 1972 - 1990. Citra tersebut berupa cetakan hitam putih saluran 5 Landsat MSS periode 1972 – 1982 skala 1: 1.000.000 (liputan 1) dan cetakan paduan warna semu (*false color composite*) Landsat MSS periode 1986 – 1990 skala 1:1.000.000 (liputan 2). Kedua liputan citra tersebut dianalisis secara manual dengan plastik transparan, kemudian luas perubahan hutannya dihitung dengan *dot grid* 2mm (mewakili luasan ~ 400 ha). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung dengan regresi untuk mendapatkan nilai kehilangan hutan seluruh Indonesia selama tahun 1972 – 1990 yang diperkirakan seluas **840 ribu ha/tahun**, atau total sebesar **10 – 14 juta ha** selama periode **18 tahun**. Perlu dicatat juga bahwa data liputan citra yang dipergunakan sangat tidak mencukupi, antara lain Kalimantan Tengah hanya tersedia 1 *scene* dan Papua hanya tersedia 2 *scene*;
- ii. Di sisi lain, penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO (1993) melalui kegiatan *Forest Resources Assessment* 1990 dilaksanakan berdasarkan analisis digital pada **31 pasangan citra** Landsat digital seluruh wilayah Asia Pasifik (yang meliputi $\pm 10\%$ wilayah darat Asia Pasifik, di mana sekitar **8 pasangan citra** meliputi

- Indonesia) perolehan tahun ~1981 (liputan 1) dan tahun ~1990 (liputan 2). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung dengan regresi untuk mendapatkan nilai kehilangan hutan Indonesia selama tahun 1981 – 1990 yang diperkirakan mencapai seluas **1,212 juta ha/ per tahun**, atau mencapai total sebesar **10,9 juta ha** selama **9 tahun**. Besaran tersebut merupakan nomor dua di dunia setelah Brazil;
- iii. Sedangkan berdasarkan penaksiran sumberdaya hutan lanjutan yang dilakukan oleh FAO (2002) melalui kegiatan *Forest Resources Assessment* 2000 dilaksanakan berdasarkan analisis pada **117 pasangan citra** Landsat (atau citra SPOT/IRS, yang meliputi sekitar 10% luasan areal tropis seluruh dunia) perolehan tahun ~1980 (liputan 1), tahun ~1990 (liputan 2), dan tahun ~2000 (liputan 3). Penafsiran dilakukan secara manual dengan plastik transparan, kemudian luas perubahan hutannya dihitung dengan *dot grid* 2 x 2 km² (mewakili luasan ~400ha). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung dengan regresi untuk mendapatkan nilai kehilangan hutan seluruh Indonesia selama tahun 1990 – 2000 yang diperkirakan seluas **1,312 juta ha/tahun**, atau sebesar **13,12 juta ha** selama **10 tahun**;
 - iv. Pengurangan luas penutupan hutan juga dilaporkan oleh Holmes (2000, 2002) berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Badan Planologi, Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) atas permintaan World Bank sebagai salah satu persyaratan pencairan bantuan keuangan. Analisis dilakukan dengan perhitungan peta digital (Sistem Informasi Geografis – SIG) antara **Peta RePPPProT** (*Regional Physical Planning Program for Transmigration*) terbitan **tahun 1985** (liputan 1 yang bersumber dari citra penginderaan jauh tersedia pada masa itu) dengan **Peta Penutupan Hutan** hasil analisis Dephutbun (liputan 2 mencakup citra Landsat hampir seluruh Indonesia tahun **1994 – 1997**). Hasil perhitungan menunjukkan terjadinya kehilangan hutan di Indonesia sebesar **1,670 juta ha/tahun**, atau sebesar **20,042 juta ha** selama **~12 tahun**. Berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa antara tahun 1985 sampai 1997 total areal hutan di Sumatera berkurang dari semula 23,3 juta ha menjadi hanya sekitar 16,6 juta ha. Sementara itu, di Kalimantan total areal hutan berkurang dari semula ~40 juta ha menjadi sekitar 31,5 juta ha. Sedangkan tingkat deforestasi di Sulawesi sebesar 11,3 juta ha berkurang menjadi 9 juta ha.

Hasil penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia terjadi dengan sangat dinamis. Hal tersebut mendorong upaya untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menjamin informasi yang disajikan sesuai dengan keadaan terkini di lapangan dan dapat dijadikan dasar yang akurat dalam pengambilan kebijakan.

Sehubungan hal tersebut, berbagai upaya pengendalian terus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan menginstruksikan kepada Kementerian/ Lembaga/Daerah/Institusi yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan serta seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang berlaku selama dua tahun.

Inpres 10 Tahun 2011 kemudian telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan inpres

dimaksud, serta untuk perwujudan peningkatan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, maka diterbitkan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) sebagai implementasi Inpres dimaksud. Pada Tahun 2021, setelah melalui penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan dimaksud ditindaklanjuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB). Berdasarkan kebijakan dimaksud, maka pada areal PIPPIB tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan penundaan/penghentian izin baru merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Setelah kebijakan PIPPIB, Pemerintah kemudian mengupayakan seluruh kebijakan untuk mengurangi laju deforestasi dapat dilaksanakan dengan lebih terintegrasi. Proses integrasi tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan Indonesia FOLU NetSink 2030. Kebijakan ini dibatasi hanya pada sektor *FOLU* (Forest and Other Land Use) untuk menyelaraskan dengan kewenangan KLHK. Kebijakan secara terintegrasi ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat emisi akibat deforestasi atau sebab lain terkait *FOLU* yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat sekuestrasi yang dihasilkan pada tahun 2030. Untuk mendukung kebijakan *FOLU* ini, pemantauan dan analisis terkait deforestasi secara berkelanjutan perlu dipertahankan.

C. Tujuan

Buku ini dimaksudkan untuk mengetahui tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan yang telah mendorong dilakukannya kegiatan pemantauan sumber daya hutan secara periodik dan berkelanjutan.

Secara umum buku ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil pemantauan secara periodik dan diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui antara lain:

1. **Kondisi hutan Indonesia terkini** sebagai bahan pendukung dalam perencanaan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang;
2. **Laju perubahan penutupan hutan** sebagai bahan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan;
3. **Kecenderungan perubahannya** di masa yang akan datang sehingga dapat diantisipasi perubahan ke arah yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan penghitungan deforestasi yaitu perubahan penutupan lahan berhutan menjadi tidak berhutan. Periode penghitungan

deforestasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil penafsiran Citra Landsat resolusi sedang, dan menghasilkan angka deforestasi per tahun.

Secara khusus buku ini bertujuan melakukan penghitungan deforestasi di Indonesia dan untuk menyajikan data deforestasi atau perubahan penutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan tahun 2021-2022 sebagai bahan pendukung dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*).

D. Sasaran

Tersedianya data dan informasi deforestasi Indonesia tahun 2021-2022, meliputi luas deforestasi per tahun dan sebarannya menurut fungsi Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat di-Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk seluruh Indonesia baik yang hanya terjadi pada hutan alam maupun dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman.

E. Ruang Lingkup

Data deforestasi Indonesia pada tahun 2021-2022 dalam buku ini disajikan dalam bentuk informasi lengkap, baik di dalam Kawasan Hutan maupun di luar kawasan hutan (APL), dan yang terjadi baik pada hutan alami (tipe hutan primer dan hutan sekunder) maupun pada hutan buatan (tipe hutan tanaman).

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Penyusunan data deforestasi, tidak hanya semata merujuk pada data tutupan lahan, namun juga merujuk pada data Kawasan Hutan. Dengan demikian angka deforestasi yang dihasilkan pada buku ini juga sudah menyesuaikan dengan kondisi (data) dan luas baik dalam Kawasan Hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL), terutama luas daratan.
- Istilah deforestasi menyangkut pemahaman deforestasi bruto dan netto. Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan, baik terjadi pada hutan alam maupun hutan tanaman. Sementara deforestasi netto artinya sudah memperhitungkan adanya perubahan tutupan dari tidak berhutan menjadi berhutan. Angka deforestasi netto merupakan angka deforestasi bruto dikurangi reforestasi.
- Perlu dipahami pengertian hutan alami dan hutan buatan (*man-made*), dimana pemisahan informasi hutan alami dan hutan buatan tersebut ditujukan untuk membedakan situasi dimana hutan terbangun secara alami (*natural*) atau disebabkan oleh aktivitas manusia secara intensif (*man-made*). Hutan alami meliputi tipe hutan primer (*intact*) dan sekunder (*degraded*), sementara hutan buatan berupa hutan tanaman, baik hutan tanaman untuk produksi maupun hasil reboisasi.
- Berkenaan dengan urusan pelaporan mengenai isu perubahan iklim dan implementasi REDD+, maka deforestasi bruto dibedakan atas deforestasi bruto secara keseluruhan (hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman) serta deforestasi bruto di hutan

alam saja (hutan primer dan hutan sekunder). Dengan pendekatan ini, maka pelaporan terkait REDD+ menggunakan angka deforestasi bruto di hutan alam (pada saat ini lebih sering disebut *gross deforestation*) saja.

- Sejalan dengan angka deforestasi bruto, maka perhitungan angka reforestasi dan deforestasi netto juga dibedakan atas yang hanya terjadi pada hutan alam saja, maupun secara keseluruhan dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman. Hal ini untuk membedakan kejadian pertumbuhan alami dengan kejadian akibat penanaman baru oleh aktivitas manusia (termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah teridentifikasi menjadi hutan)
- Terdapat angka deforestasi netto yang bernilai negatif artinya terjadi reforestasi yang lebih besar dibandingkan deforestasi bruto. Dalam hal ini secara umum pada provinsi dimaksud terdapat penambahan luas areal penutupan berhutan.

F. Batasan Istilah

Beberapa batasan pengertian istilah di dalam Penghitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan yang untuk selanjutnya disebut sebagai KH adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
2. Penutupan lahan adalah penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang dapat berupa areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air;
3. Kondisi penutupan lahan tersaji sesuai dengan sumber data, pendekatan dan metodologi yang dipakai untuk menghasilkan informasi penutupan lahan dimaksud;
4. Hutan yang untuk selanjutnya disebut sebagai H adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah salah satu kondisi penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman;
5. Non Hutan yang untuk selanjutnya disebut sebagai NH adalah bentuk penutupan lahan berupa semak/belukar, belukar rawa, savana/padang rumput, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, transmigrasi, sawah, tambak, tanah terbuka, pertambangan, permukiman, rawa dan pelabuhan udara/laut;
6. Hutan konservasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
7. Hutan Lindung yang untuk selanjutnya disebut sebagai HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

9. Hutan Produksi Tetap yang untuk selanjutnya disebut sebagai HP adalah kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
10. Hutan Produksi Terbatas yang untuk selanjutnya disebut sebagai HPT adalah kawasan hutan produksi dengan pertimbangan faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan masih dapat memproduksi hasil hutan secara terbatas;
11. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang untuk selanjutnya adalah HPK adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan HP;
12. Hutan Alam adalah kondisi penutupan lahan alami yang berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder;
13. Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik hutan tanaman yang berada di areal IUPHHK-HTI maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam Kawasan Hutan maupun di APL; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.
14. Deforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan).
15. Deforestasi Bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan), tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi.
16. Deforestasi Bruto Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (hanya) Alam menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan). Deforestasi Bruto Hutan Alam dipakai untuk memisahkan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan Hutan menjadi kelas penutupan lahan Non Hutan, yang terjadi tidak sebagai akibat pemanenan hutan tanaman (*harvesting*).
17. Reforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan).
18. Reforestasi Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan, sebagai akibat adanya pertumbuhan (*growth*) secara alami.
19. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 1 PP No. 26 Tahun 2020), yang dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH.
20. Deforestasi Netto yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi.

21. Deforestasi Netto Hutan Alam, yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan alam pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto hutan alam dikurangi dengan luas reforestasi yang terjadi pada hutan alam.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Perizinan di bidang kehutanan adalah perizinan berusaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi perizinan berusaha pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, perizinan berusaha pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan Hasil Hutan kayu/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.
24. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
25. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
26. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

Catatan (*Disclaimer*)

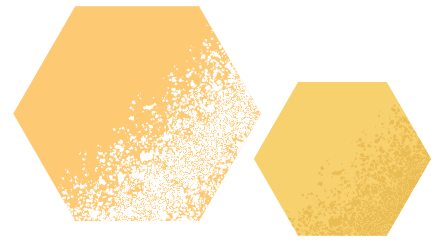
- Deforestasi tahun 2021 – 2022 didasarkan pada perhitungan data geospasial hasil penafsiran penutupan lahan tahun 2021 dan tahun 2022. Masing-masing data penutupan lahan tersebut mempergunakan periode pengamatan dari tanggal 1 Juli tahun T-1 sampai dengan 30 Juni tahun T. Catatan ini menegaskan bahwa kejadian deforestasi pada suatu lokasi misal terjadi pada 30 September 2021, baru akan teridentifikasi pada periode pengamatan tahun 2022;
- Perhitungan luas deforestasi Indonesia tahun 2021 – 2022 dilakukan dengan sistem proyeksi Mercator, dengan pertimbangan cakupan seluruh wilayah Indonesia (46 derajat bujur dan 17 derajat lintang). Hal ini untuk menegaskan bahwa perhitungan luas dapat berbeda dengan hasil perhitungan lapangan, khususnya pada lokasi yang jauh dari khatulistiwa, seperti Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, atau Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Satuan pemetaan minimum pada data geospasial penutupan lahan berukuran 6,25 ha. Hal ini menegaskan bahwa perubahan penutupan lahan yang terjadi dengan ukuran kurang dari 6,25 ha kemungkinan tidak dapat teridentifikasi pada citra sehingga tidak terpetakan. Khusus untuk deforestasi, luasan sebesar 1 ha masih dipetakan;
- Luas hasil identifikasi deforestasi dan reforestasi yang disajikan dalam narasi dan tabel adalah yang berukuran lebih dari 100 ha (0,1 ribu ha). Luasan yang kurang dari ukuran tersebut akan disebutkan secara khusus, akan tetapi besarnya tidak akan ditampilkan (dinyatakan NDP). Perkecualian dilakukan pada Bab III, yang

menyediakan beberapa tabel khusus untuk menyajikan informasi besaran deforestasi yang sangat kecil (NDP). Basis data spasial untuk poligon berukuran kurang dari 100 ha (NDP) tetap akan dipertahankan dalam berkas *Geodatabase*;

- Luasan deforestasi netto yang disajikan dapat bernilai positif atau negatif. Deforestasi netto bernilai positif berarti luasan hutan suatu wilayah telah berkurang dari tahun sebelumnya. Deforestasi netto bernilai negatif berarti luasan hutan suatu wilayah bertambah dari tahun sebelumnya (terjadi reforestasi lebih besar dari deforestasi);
- Khusus untuk objek berupa hutan tanaman hanya dihitung deforestasi sekali pada saat terjadi perubahan dari Hutan Alam menjadi Hutan Tanaman, dan untuk kegiatan pemanenan dianggap sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan deforestasi;
- Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali. Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto dikurangkan dengan reforestasi;
- Hutan tanaman yang dihitung untuk reforestasi adalah bertambahnya tanaman hasil reforestasi baik di dalam maupun di luar Konsesi Hutan Tanaman Industri;
- Khusus untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan akan dimasukkan dalam perhitungan reforestasi, apabila hasil identifikasi pada citra penginderaan jauh menunjukkan bahwa lokasi rehabilitasi hutan dan lahan tersebut sudah layak dikelaskan sebagai hutan;

BAB II

METODOLOGI



A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan deforestasi adalah data geospasial (format digital) yang tersedia pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tingkat ketelitian skala 1:250.000. Data geospasial tersebut meliputi:

1. Data geospasial penutupan lahan hasil penafsiran Citra *Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI periode pengamatan tahun 2021 dan tahun 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Data geospasial Dasar Indonesia (Rupa Bumi Indonesia - RBI) skala 1:50.000, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022;
3. Data geospasial Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022;
4. Data geospasial Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023.

Data geospasial Penutupan lahan berasal dari hasil penafsiran citra citra satelit secara visual dengan cara mendelineasi penampakan objek pada citra satelit yang disajikan di layar komputer (digitasi *on-screen*) dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000, sehingga unit terkecil yang dapat dipetakan adalah seluas 6,25 hektar. Hasil penafsiran berupa 23 kelas penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi Kategori Hutan dan Non-Hutan, selengkapnya tersaji pada tabel II.1 berikut:

Tabel II. 1 Sistem Klasifikasi Penutupan Lahan (23 Kelas) disertai kode layer dan kode toponimi

No	Kelas	Kode layer /toponimi	Keterangan
A. HUTAN			
A.1 HUTAN ALAM			
1	Hutan lahan kering primer	Hp/2001	Seluruh kenampakan hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan pegunungan (dataran tinggi dan subalpin), hutan kerdil, hutan kerangas, hutan di atas batuan kapur, hutan di atas batuan ultra basa, hutan daun jarum, hutan luruh daun dan hutan lumut (ekosistem alami) yang tidak menampakkan gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll.) Ekosistem alami yang mengikuti pengetahuan lokal sebagai hutan, tetap diklasifikasikan hutan (bukan belukar) sebagai contoh Tipe Hutan Alam di Pulau Flores, Sumbawa, Rote, Maluku Tenggara dan pulau lainnya dalam garis Wallacea dan Webber; hutan karst di Maros, Muna, dan Kalimantan Timur; serta hutan alam kerapatan rendah.
2	Hutan lahan kering sekunder	Hs/2002	Hutan lahan kering primer yang mengalami gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan, dll.), termasuk yang tumbuh kembali dari bekas tanah terdegradasi.
3	Hutan rawa primer	Hrp / 2005	Seluruh kenampakan hutan yang berada pada daerah tergenang air tawar dan di belakang hutan payau yang tidak menampakkan

No	Kelas	Kode layer /toponimi	Keterangan
			gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll.) termasuk hutan sagu.
4	Hutan rawa sekunder	Hrs/20051	Hutan rawa primer yang mengalami gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan, dll). Bekas tebangan parah jika tidak memperlihatkan tanda genangan (liputan air) secara permanen dikelaskan sebagai lahan terbuka, sedangkan jika memperlihatkan bekas genangan atau tergenang secara temporal dikelaskan sebagai rawa.
5	Hutan mangrove primer	Hmp/2004	Seluruh kenampakan hutan (bakau, nipah dan nibung) yang berada di lingkungan perairan payau yang tidak menampakkan gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll.).
6	Hutan mangrove sekunder	Hms/ 20041	Hutan mangrove primer yang mengalami gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), termasuk yang tumbuh/ditanam pada tanah sedimentasi.
A.2 HUTAN TANAMAN			
7	Hutan tanaman	Ht/2006	Seluruh kenampakan hutan yang seragam (monokultur) yang dapat berasal dari kegiatan reboisasi/reklamasi/penghijauan/industri. Catatan: Lahan terbuka pada kelas Hutan Tanaman karena rotasi panen dan penanaman secara temporal tetap dikelaskan sebagai kelas Hutan Tanaman. Tanaman Karet di dalam/di luar areal IUPPHK-HT diklasifikasikan sebagai kelas Perkebunan.
B. NON HUTAN			
8	Perkebunan	Pk/2010	Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman keras yang termasuk kelompok perkebunan, antara lain sawit, karet, kelapa, coklat, kopi, teh. Catatan: Perkebunan dengan jenis tanaman tahunan yang dapat dibedakan secara homogen; Ukuran blok yang dikelaskan sebagai perkebunan (sawit) sekitar 30 ha (300 m x 1000 m); Lahan terbuka pada kelas Perkebunan karena peremajaan/pergantian komoditas secara temporal tetap dikelaskan sebagai Perkebunan.
9	Semak belukar	B/2007	Seluruh kenampakan areal/kawasan yang didominasi oleh vegetasi rendah yang berada pada lahan kering. Catatan: Semak belukar yang didominasi oleh vegetasi rendah (di bawah 5 m), berpotensi untuk regenerasi menjadi hutan.
10	Semak belukar rawa	Br/20071	Seluruh kenampakan areal/kawasan yang didominasi oleh vegetasi rendah dan berada pada daerah tergenang air tawar serta di belakang hutan payau.
11	Savanna / Padang rumput	S/3000	Seluruh kenampakan vegetasi rendah alami dan permanen yang berupa padang rumput. Kenampakan ini merupakan kenampakan alami di sebagian Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan bagian Selatan Papua, juga dapat ditemukan di Jawa. Pada beberapa savanna terdapat sedikit semak atau pohon. Savanna bisa terdapat pada lahan kering ataupun rawa (rumput rawa, misalnya rumput rawa di Wasur).
12	Pertanian lahan kering	Pt/20091	Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman semusim di lahan kering seperti tegalan dan ladang.
13	Pertanian lahan kering campur	Pc /20092	Seluruh kenampakan yang merupakan campuran areal pertanian, perkebunan, semak dan belukar. Kelas ini sering muncul pada areal perladangan berpindah, dan rotasi tanam lahan karst. serta memasukkan kelas yang dipahami sebagai kebun campuran, hutan

No	Kelas	Kode layer /toponimi	Keterangan
			rakyat atau agroforestry.
14	Sawah	Sw/ 20093	Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman semusim di lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang. Pertanian lahan basah dikelaskan sebagai sawah, termasuk areal pertanian yang pada penggunaan awalnya sawah dan pada musim kemarau ditanami tanaman semusim tetap dikelaskan sebagai sawah. Yang perlu diperhatikan oleh penafsir adalah fase rotasi tanam yang terdiri atas fase penggenangan, fase tanaman muda, fase tanaman tua dan fase bera. Kelas ini juga memasukkan sawah musiman, sawah tadah hujan, sawah irigasi. Khusus untuk sawah musiman di daerah rawa membutuhkan informasi tambahan dari lapangan.
15	Tambak	Tm /20094	Seluruh kenampakan perikanan darat (ikan/udang) atau pengkaraman yang tampak dengan pola pematang, biasanya berada di sekitar pantai. Di beberapa lokasi dapat berasal dari hutan rawa, rawa atau belukar rawa.
16	Permukiman	Pm/2012	Kawasan permukiman, baik perkotaan, perdesaan, industri dll.
17	Permukiman transmigrasi	Tr/20122	Kawasan permukiman di wilayah transmigrasi serta terdapat di dalam areal izin transmigrasi. Lahan garapan dipisahkan dari permukiman.
18	Lahan terbuka	T/2014	Seluruh kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia (singkapan batuan puncak gunung, puncak bersalju, kawah vulkan, gosong pasir, pasir pantai, endapan sungai, pembukaan lahan serta areal bekas kebakaran). Kenampakan lahan terbuka untuk pertambangan dikelaskan pertambangan, sedangkan lahan terbuka bekas pembersihan lahan / land clearing diklasifikasikan sebagai lahan terbuka. Lahan terbuka dalam rangka rotasi tanam sawah / tambak tetap dikelaskan sebagai sawah / tambak.
19	Pertambangan	Tb/20141	Lahan terbuka yang digunakan untuk aktivitas pertambangan terbuka- <i>open pit</i> (seperti batubara, timah, tembaga dll.), serta lahan pertambangan tertutup skala besar yang dapat diidentifikasi dari citra berdasar asosiasi kenampakan objeknya, termasuk <i>tailing ground</i> (penimbunan limbah penambangan). Lahan pertambangan tertutup skala kecil atau yang tidak teridentifikasi dikelaskan menurut kenampakan permukaannya.
20	Tubuh air	A/5001	Semua kenampakan perairan, termasuk laut, sungai, danau, waduk, terumbu karang, padang lamun dll. Kenampakan tambak, sawah dan rawa-rawa telah digolongkan tersendiri.
21	Rawa	Rw/50011	Kenampakan lahan rawa (tergenang air tawar serta di belakang hutan payau) yang sudah tidak berhutan. Rawa biasanya berada di daerah cekungan atau dataran yang lebih rendah dibanding daerah sekitarnya.
22	Awan	Aw/2500	Kenampakan awan yang menutupi lahan suatu kawasan dengan ukuran lebih dari 4 cm ² pada skala penyajian. Jika liputan awan tipis masih memperlihatkan kenampakan di bawahnya dan memungkinkan ditafsir tetap didelineasi.
23	Bandara / Pelabuhan	Bdr/Plb / 20121	Kenampakan bandara dan pelabuhan yang berukuran besar dan memungkinkan untuk didelineasi tersendiri.

Sumber :

- SNI 8033:2014 tentang Metode penghitungan Perubahan Tutupan Hutan berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik secara Visual.
- Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional Nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020 (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan)

B. Analisis dan Penyajian Data

Penghitungan deforestasi dilaksanakan melalui analisis data penutupan lahan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis. Tahapan penghitungan dan penyajian data deforestasi adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan data geospasial penutupan lahan hasil penafsiran (interpretasi) *Citra Landsat 8 OLI/LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* liputan tahun 2021 dan 2022 beserta data geospasial terkait berupa RBI, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan kawasan hutan. Kegiatan penyiapan data geospasial termasuk verifikasi kelengkapan berupa atribut dan topologi spasial.
2. Analisis geospasial, yang terdiri atas tahapan:
 - a. Tumpang susun (*overlay*) data geospasial penutupan lahan tahun 2021 dan 2022 dengan data geospasial kawasan hutan;
 - b. Identifikasi data geospasial hasil tumpang susun yang mengalami perubahan penutupan lahan pada setiap fungsi kawasan hutan dan areal penggunaan lain.
3. Penghitungan besaran deforestasi pada setiap fungsi kawasan hutan serta APL. Catatan: Tubuh air (danau, sungai besar, laut (termasuk kawasan konservasi perairan)) tidak dimasukkan dalam penghitungan. Penyajian hasil analisis geospasial berupa luas dan sebaran deforestasi pada kawasan hutan dan APL dalam bentuk peta, diagram dan tabel. Proses selengkapnya disajikan pada Gambar 1.
4. Proses analisis dilakukan dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Deforestasi diperhitungkan dengan batasan sebagai berikut
 - i. Penghitungan deforestasi dan reforestasi dilakukan **SECARA SPASIAL** dengan beberapa langkah sebagai berikut:
 - (1) Mengidentifikasi setiap poligon yang termasuk kelompok penutupan lahan **berhutan** (H) atau kelompok penutupan lahan **bukan hutan** (NH) pada setiap periode pengamatan, yaitu 2021 (*t*) atau 2022 (*t+1*). Rincian kelompok H dan NH adalah sebagaimana uraian pada butir I.F.4 dan I.F.5;
 - (2) Mengidentifikasi setiap poligon sebagaimana butir II.B.4.a.i.(1) pada periode pengamatan berbeda menjadi poligon **deforestasi** (DEF) (*tahun 2021 H dan tahun 2022 NH*), poligon **tetap berhutan** (H) (*tahun 2021 H dan tahun 2022 H*), poligon **tetap tidak berhutan** (NH) (*tahun 2021 NH dan tahun 2022 NH*), serta poligon **reforestasi** (REF) (*tahun 2021 NH dan tahun 2022 H*), yang diuraikan secara detil dengan formula sebagai berikut:

$$L_t \rightarrow L_{t+1} \begin{cases} L_t = H; L_{t+1} = H; (F) \\ L_t = H; L_{t+1} = NH; (DEF) \\ L_t = NH; L_{t+1} = NH; (NF) \\ L_t = NH; L_{t+1} = H; (REF) \end{cases} \quad \text{Formula (1)}$$

di mana:

L_t : luas penutupan lahan y pada tahun 2021, pada poligon x;

L_{t+1} : luas penutupan lahan y pada tahun 2022, pada poligon x;
y: variable kelompok penutupan lahan, dapat berupa H atau NH;
H: kelompok penutupan lahan berupa hutan, pada poligon x;
NH: kelompok penutupan lahan berupa bukan hutan, pada poligon x;
F: kelompok perubahan penutupan lahan (tetap berhutan);
NF: kelompok perubahan penutupan lahan (tetap bukan hutan);
DEF: kelompok perubahan penutupan lahan (yang mengalami deforestasi);
REF: kelompok perubahan penutupan lahan (yang mengalami reforestasi);

atau dengan Tabel II.2 berikut:

Tabel II. 2 Logika penentuan suatu poligon hasil analisis perubahan penutupan lahan termasuk sebagai H, NH, DEF, atau REF

Perubahan Penutupan lahan		L_{t+1}	
		H	NH
L_t	H	$\sum_t^{t+1} H$	$\sum_t^{t+1} DEF$
	NH	$\sum_t^{t+1} REF$	$\sum_t^{t+1} NH$

- (3) Formula (1) atau Tabel II.2 kemudian menjadi dasar dalam memperhitungkan besaran akumulasi dari penjumlahan setiap poligon yang teridentifikasi sebagai **deforestasi** (DEF) (*tahun 2021 sebagai hutan dan tahun 2022 sebagai bukan hutan*), **reforestasi** (REF) (*tahun 2021 sebagai bukan hutan dan tahun 2022 sebagai hutan*), **tetap berhutan** (H) (*tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai hutan*), atau **tetap tidak berhutan** (NH) (*tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai bukan hutan*) yang diuraikan secara detail dengan formula sebagai berikut:

$$\sum_t^{t+1} DEF = \sum_t^{t+1} (L_t = H \rightarrow L_{t+1} = NH) \quad \text{Formula (2)}$$

$$\sum_t^{t+1} REF = \sum_t^{t+1} (L_t = NH \rightarrow L_{t+1} = H) \quad \text{Formula (3)}$$

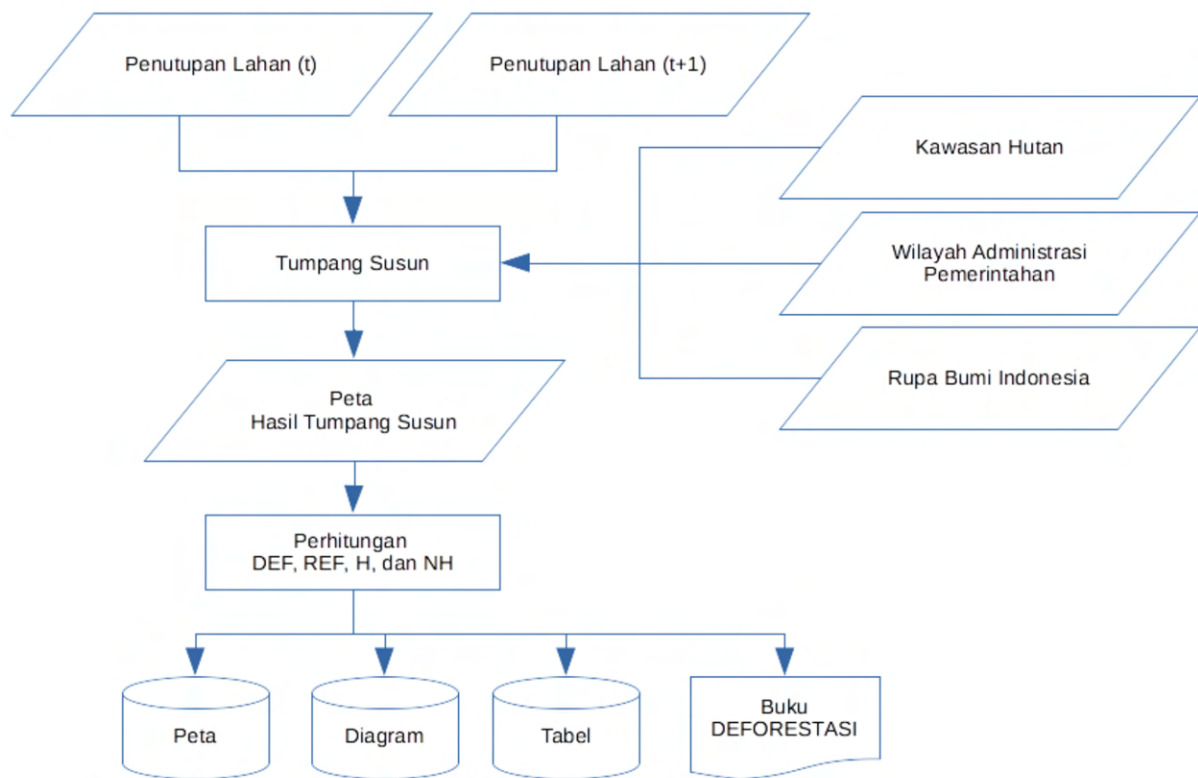
$$\sum_t^{t+1} H = \sum_t^{t+1} (L_t = H \rightarrow L_{t+1} = H) \quad \text{Formula (4)}$$

$$\sum_t^{t+1} NH = \sum_t^{t+1} (L_t = NH \rightarrow L_{t+1} = NH) \quad \text{Formula (5)}$$

- ii. Penghitungan deforestasi **TIDAK** dilakukan dengan menghitung (pada tabel) selisih jumlah luas areal berhutan tahun 2021 dengan jumlah luas areal berhutan tahun 2022;
- iii. Penghitungan Deforestasi Netto dilakukan pada kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2021 merupakan Hutan sedangkan pada liputan tahun 2022 mengalami perubahan menjadi Tidak Berhutan (Non Hutan) [mengalami Deforestasi], dikurangi kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2021 merupakan Tidak Berhutan (Non Hutan) dan pada liputan tahun 2022 merupakan penutupan Berhutan [mengalami Reforestasi], yang diuraikan secara detil dengan formula sebagai berikut:

$$\Delta DEF_{Netto} = \sum_t^{t+1} DEF - \sum_t^{t+1} REF \quad \text{Formula (6)}$$

- iv. Penghitungan Deforestasi Netto Hutan Alam dilakukan pada kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2021 merupakan Hutan Alam sedangkan pada liputan tahun 2022 mengalami perubahan menjadi Tidak Berhutan (Non Hutan) [mengalami Deforestasi], dikurangi kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2021 merupakan Tidak Berhutan (Non Hutan) sedangkan pada liputan tahun 2022 mengalami perubahan menjadi Berhutan Alam [mengalami Reforestasi].
- b. Perhitungan besaran deforestasi dilakukan dengan parameter sebagai berikut:
- i. Proyeksi Mercator
 - ii. Sistem koordinat lintang dan bujur;
 - iii. Datum WGS84;
 - iv. Satuan luas (dalam berkas Geodatabase) hektar (disajikan dalam buku dalam satuan ribuan hektar).



Gambar 1. Bagan Alur Proses Perhitungan Deforestasi Indonesia

BAB III

HASIL PERHITUNGAN DEFORESTASI INDONESIA



BAB III

HASIL PENGHITUNGAN DEFORESTASI INDONESIA

Berikut ini akan disajikan hasil perhitungan deforestasi Indonesia pada periode pengamatan tahun 2021-2022 dengan urutan deforestasi seluruh wilayah Indonesia (dianalisis pada setiap kelompok pulau), disusul kemudian deforestasi pada setiap provinsi, dan terakhir deforestasi pada setiap fungsi kawasan hutan. Untuk deforestasi Indonesia dan deforestasi pada setiap provinsi akan diuraikan lebih detil lagi dengan deforestasi bruto, reforestasi, dan kemudian deforestasi netto.

A. Deforestasi Indonesia

Deforestasi yang dihitung dalam buku ini meliputi deforestasi bruto, reforestasi, dan deforestasi netto. Deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan deforestasi bruto dengan reforestasi (Formula 6). Oleh karena itu, sebelum menyajikan deforestasi netto maka terlebih dahulu perlu disajikan deforestasi bruto dan reforestasi Indonesia, yang disajikan untuk setiap kelompok pulau, dan setiap provinsi. Perhitungan deforestasi dan reforestasi juga dilakukan secara kelompok hutan (hutan alam dan hutan tanaman) maupun maupun kelompok hutan alam saja

(1) Deforestasi Bruto Indonesia

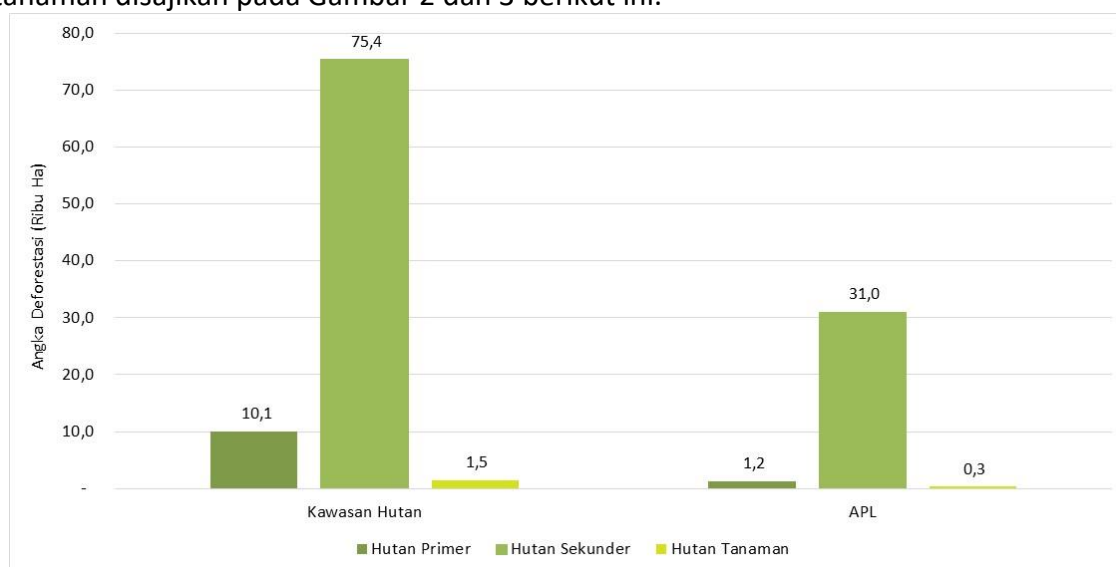
Deforestasi bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori non-hutan (tidak berhutan). Perubahan tersebut berdasarkan perhitungan data geospasial (digita) hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI* liputan tahun 2021 dan 2022. Deforestasi bruto dalam hal ini juga mencakup deteksi perubahan tutupan dari hutan tanaman menjadi penutupan lahan hutan lain secara permanen (misal untuk pertambangan)

Deforestasi bruto Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 119,4 ribu ha. Dari besaran tersebut, proporsi terbesar terjadi pada penutupan hutan sekunder yaitu sebesar 106,4 ribu ha (89,1%), diikuti pada hutan primer sebesar 11,3 ribu ha (9,4%) dan hutan tanaman sebesar 1,8 ribu ha (1,5%).

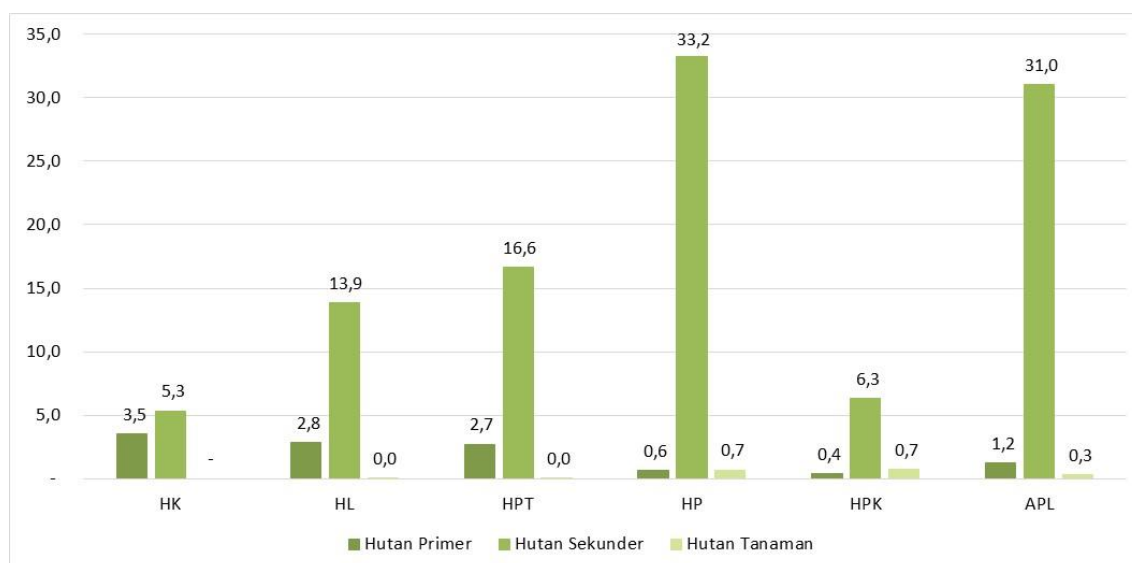
Kemudian, deforestasi bruto yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 86,9 ribu ha atau 72,7% dari total deforestasi bruto 119,4 ribu ha, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 32,6 ribu ha (27,3%). Deforestasi bruto di dalam kawasan hutan paling tinggi terjadi di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu sebesar 34,6 ribu ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu sebesar 19,4 ribu ha. Deforestasi bruto juga terjadi pada fungsi lindung bahkan konservasi, walaupun tidak sebesar yang terjadi di HP yaitu di Hutan Konservasi (HK) sebesar 8,8 ribu ha dan Hutan Lindung (HL) sebesar 16,7 ribu ha.

Deforestasi Bruto Hutan Alam adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan hanya kategori Hutan Alam (Hutan Primer dan Hutan Sekunder) menjadi kelas penutupan lahan kategori non hutan (tidak berhutan). Deforestasi Bruto Hutan Alam Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 117,7 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan sebesar 85,4 ha atau 72,6 % dari total deforestasi bruto hutan alam, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 32,2 (27,4%). Deforestasi bruto Hutan Alam di dalam kawasan hutan paling tinggi terjadi di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu sebesar 33,9 ribu ha (28,8%) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu sebesar 19,3 ribu ha (16,4%). Deforestasi Bruto Hutan Alam juga terjadi pada fungsi HK sebesar 8,8 ribu ha (7,5%) dan HL sebesar 16,7 ribu ha (14,2%). Apabila perhatian hanya difokuskan pada menjaga hutan alam, maka deforestasi bruto hutan alam inilah yang terkait dengan mekanisme REDD+.

Secara lengkap, deforestasi bruto Indonesia pada tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman disajikan pada Gambar 2 dan 3 berikut ini.



Gambar 2. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2021-2022 (Ribu ha) pada Hutan Primer, Sekunder dan Tanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

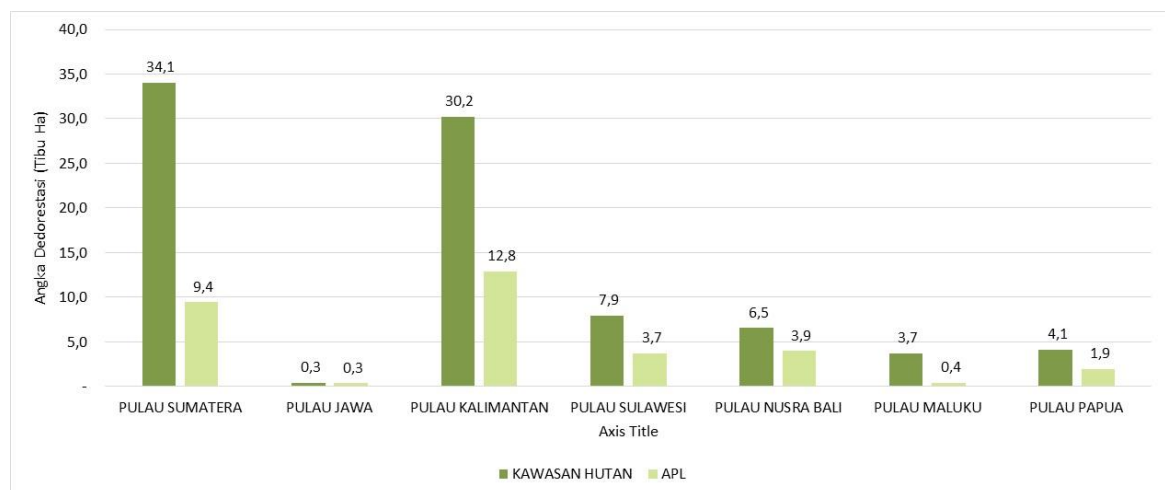


Gambar 3. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2021-2022 (Ribu Ha)

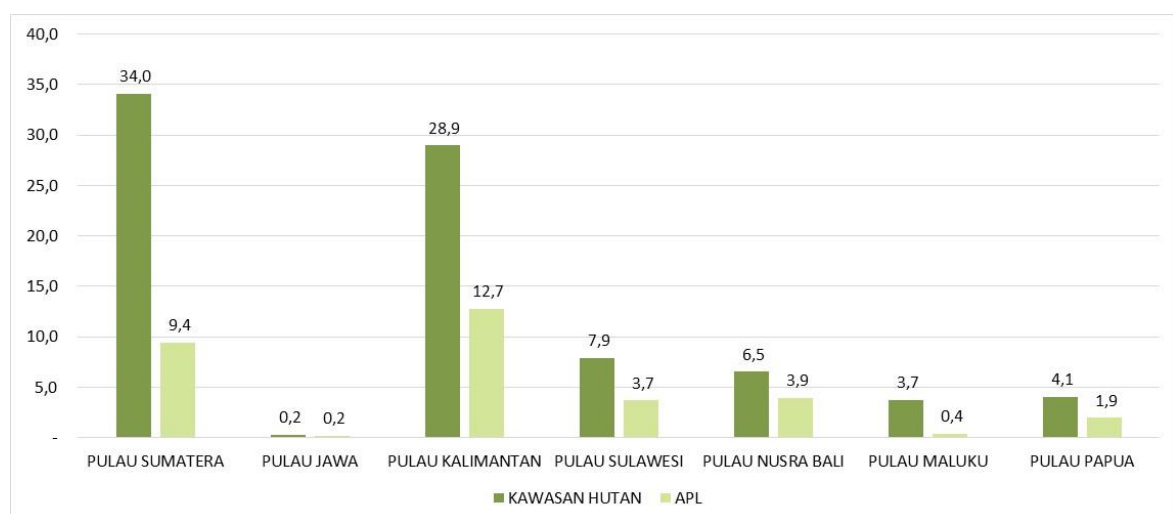
Sebaran deforestasi bruto di setiap kelompok pulau di Indonesia menunjukkan angka yang berbeda. Deforestasi bruto tertinggi terjadi di Kelompok Pulau Sumatera yaitu sebesar 43,5 ribu ha atau 36,4% dari total deforestasi bruto Indonesia, diikuti dengan Kelompok Pulau Kalimantan dengan deforestasi bruto sebesar 43,1 ribu ha (36,1%). Deforestasi bruto terendah terjadi di Kelompok Pulau Jawa sebesar 0,7 ribu ha (0,6%).

Deforestasi bruto hutan alam tertinggi terjadi di Kelompok Pulau Sumatera yaitu sebesar 43,4 ribu ha atau 36,9% dari total Deforestasi Bruto Hutan Alam Indonesia, diikuti dengan Kelompok Pulau Kalimantan dengan deforestasi bruto hutan alam sebesar 41,7 ribu ha (35,5%). Deforestasi bruto hutan alam terendah terjadi di Kelompok Pulau Jawa sebesar 0,4 ribu ha (0,4%).

Sebaran Deforestasi Bruto di setiap kelompok pulau di Indonesia selengkapnya disajikan pada Gambar 4, sementara Deforestasi Bruto Hutan Alam di setiap kelompok pulau di Indonesia disajikan pada Gambar 5.



Gambar 4. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia tahun 2021-2022 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan



Gambar 5. Diagram Deforestasi Bruto Hutan Alam tahun 2021-2022 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

(2) Reforestasi Indonesia

Reforestasi adalah kelompok penutupan lahan yang pada periode pengamatan tahun 2021 dinyatakan sebagai bukan hutan, kemudian pada tahun 2022 dinyatakan sebagai hutan. Reforestasi terjadi karena beberapa hal, antara lain yang terjadi alami (sebagai contoh pertumbuhan dari belukar menjadi hutan sekunder) atau karena aktivitas penanaman, baik yang berupa pertumbuhan tanaman (*regrowth*), atau hasil dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Reforestasi dapat terjadi di dalam kawasan hutan (areal perizinan berusaha hutan tanaman, tumbuh alami, maupun areal rehabilitasi) maupun di luar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu sumber terjadinya reforestasi. Reforestasi yang bersumber dari reforestasi didapatkan dari hasil identifikasi penutupan lahan kemudian ditumpang-susunkan dengan lokasi penanaman kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi lapangan pada beberapa titik sampel, hasil upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum dapat terdeteksi secara jelas sebagai salah satu sumber reforestasi.

Reforestasi Indonesia yang terdeteksi untuk periode pengamatan tahun 2021-2022 adalah sebesar 15,4 ribu ha. Reforestasi tersebut bersumber dari kelas penutupan lahan berupa hutan sekunder dan hutan tanaman yaitu masing-masing sebesar 1,2 ribu ha (7,7%) dan 14,2 ribu ha (92,3%).

Reforestasi di dalam kawasan hutan tertinggi terjadi di kawasan HP yaitu 13,4 ribu ha atau 86,7%, diikuti di HPT sebesar 0,3 ribu ha (1,9%) dan pada HPK sebesar 0,1 ribu ha (0,7%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) yaitu sebesar 1,6 ribu ha (10,7%). Sementara pada kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung belum terdeteksi terjadinya reforestasi.

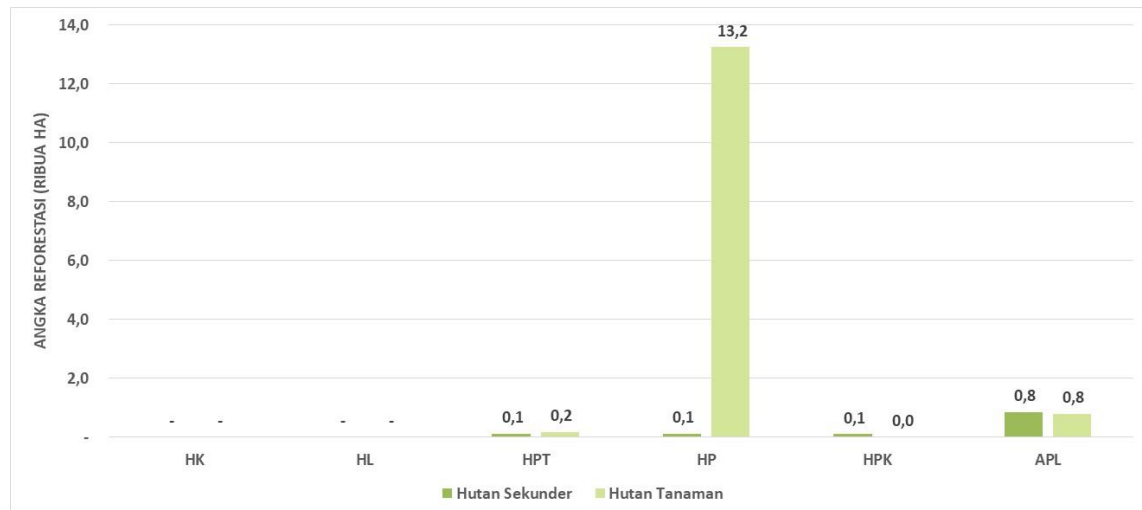
Sementara itu, Reforestasi Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori non hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan Alam (Hutan Primer dan Hutan Sekunder). Reforestasi Hutan Alam Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 1,2 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan sebesar 0,3 ribu ha atau 28,2 %, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 0,9 ribu ha (71,8 %). Reforestasi Hutan Alam di dalam kawasan hutan terjadi pada HPT, HP dan HPK masing-masing luasnya sama yaitu sebesar 0,1 ribu ha. Secara lengkap, reforestasi Indonesia pada tipe sekunder dan tanaman disajikan pada Gambar 6.

Berdasarkan sebaran reforestasi pada tujuh kelompok pulau, reforestasi tertinggi terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 9,8 ribu ha atau 63,5 % dari reforestasi Indonesia, diikuti dengan reforestasi di Kelompok Pulau Sumatera sebesar 3,6 ribu ha (23,2%), Kelompok Pulau Papua sebesar 1,2 ribu ha (7,9%), Kelompok Pulau Jawa sebesar 0,8 ribu ha (5,0%) dan Kelompok Pulau Bali Nusa Tenggara sebesar 0,1 ribu ha (0,5%). Reforestasi tidak terjadi pada Kelompok Pulau Sulawesi dan Maluku.

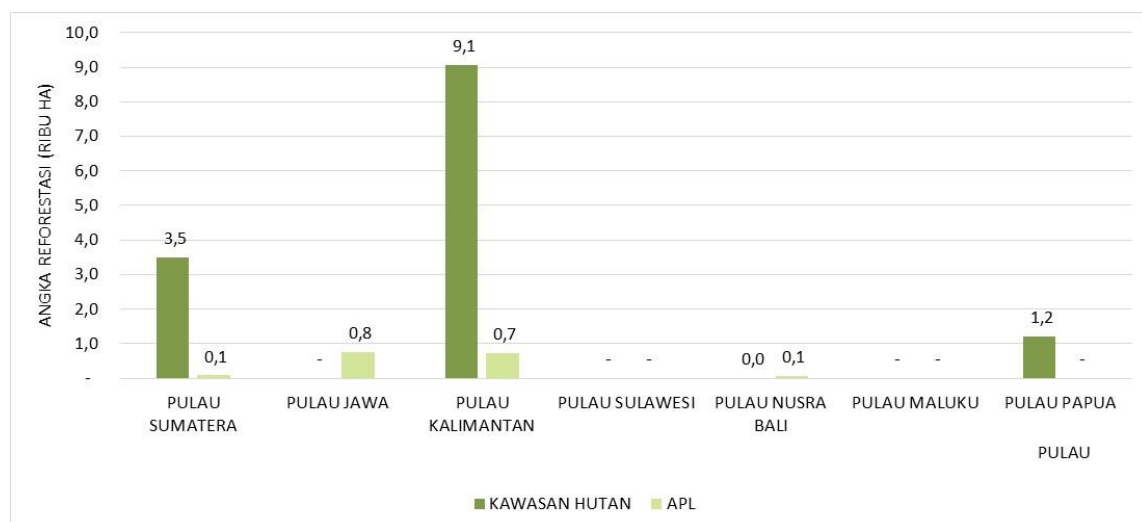
Sementara itu, sebaran Reforestasi Hutan Alam di setiap kelompok pulau di Indonesia menunjukkan tingkatan antar pulau yang berbeda dengan reforestasi secara keseluruhan. Reforestasi hutan alam terjadi di Kelompok Pulau Sumatera, Jawa,

Kalimantan, dan Bali Nusa Tenggara. Reforestasi Hutan Alam tertinggi terjadi pada Kelompok Pulau Jawa seluas 0,77 ribu ha, diikuti Kelompok Pulau Kalimantan seluas 0,36 ribu ha, Kelompok Kepulauan Bali Nusa Tenggara seluas 0,03 ribu ha dan Kelompok Pulau Sumatera seluas 0,02 ribu ha. Reforestasi pada hutan alam tidak teridentifikasi pada Kelompok Pulau Papua.

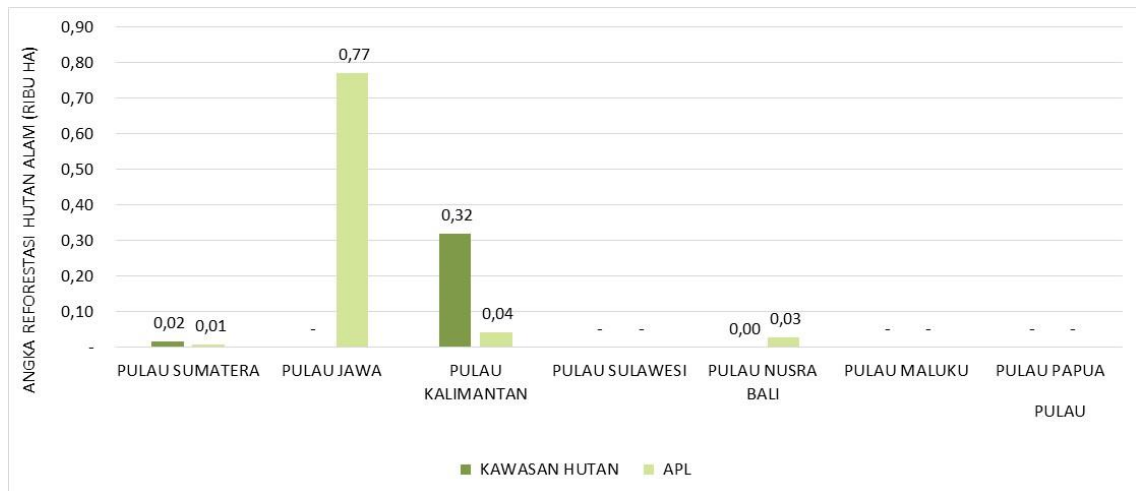
Sebaran Reforestasi di setiap kelompok pulau di Indonesia selengkapnya disajikan pada Gambar 7, sementara Reforestasi Hutan Alam di setiap kelompok pulau di Indonesia disajikan pada Gambar 8.



Gambar 6. Diagram Reforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 (Ribu Ha)



Gambar 7. Diagram Reforestasi tahun 2021-2022 (Ribu Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



Gambar 8. Diagram Reforestasi Hutan Alam tahun 2021-2022 (Ribu Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

(3) Deforestasi Netto Indonesia

Deforestasi Netto dihitung berdasarkan selisih deforestasi bruto dan reforestasi (Formula 6), dengan hasil perhitungan deforestasi netto selengkapnya sebagai berikut:

Tabel III. 1 Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Deforestasi Netto Hutan Alam (A+B)	8,8	16,7	19,2	33,8	78,5	6,6	85,1	31,4	116,5
	A. Hutan Primer	3,5	2,8	2,7	0,6	9,7	0,4	10,1	1,2	11,3
	B. Hutan Sekunder	5,3	13,9	16,5	33,1	68,9	6,2	75,0	30,2	105,2
2.	Deforestasi Netto (A+B+C)	8,8	16,7	19,1	21,2	65,8	7,3	73,1	30,9	104,0
	C. Hutan Tanaman*	-	0,0	0,1	12,6	12,7	0,7	12,0	0,5	12,5

a. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

- Deforestasi Netto tahun 2021-2022 sebesar 104,0 ribu ha dengan rincian seluas 73,1 ribu ha (70,3%) berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya seluas 30,9 ribu ha (29,7%) berada di APL. Selengkapnya disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

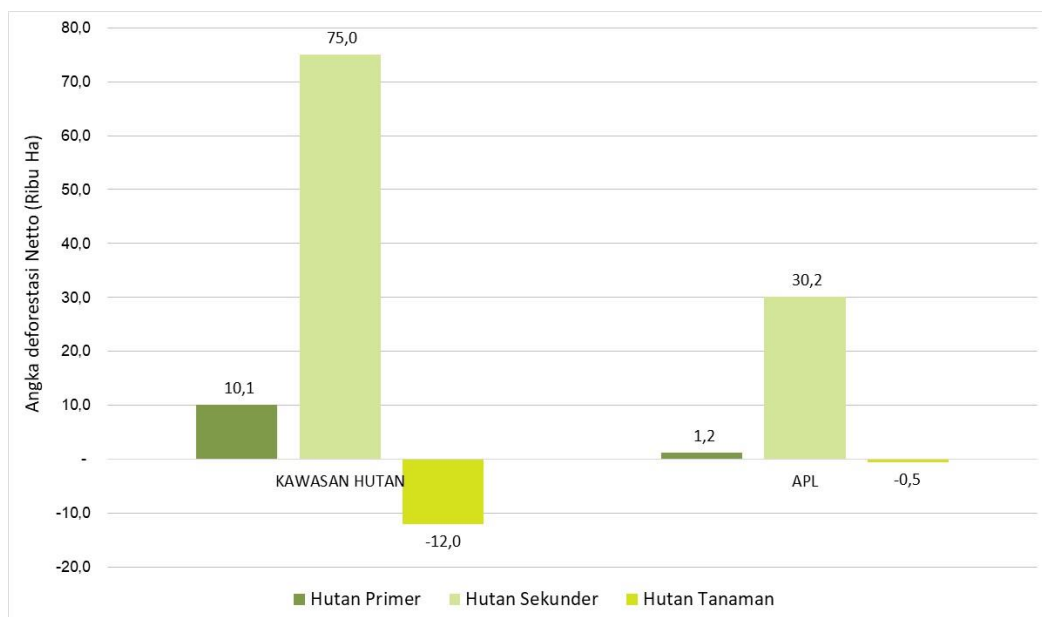
- Deforestasi Netto Hutan Alam tahun 2021-2022 sebesar 116,5 ribu ha, seluas 85,1 ribu ha (73,1%) berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya seluas 31,4 ribu ha (26,9%) berada di APL. Selengkapnya disajikan pada Gambar 10.



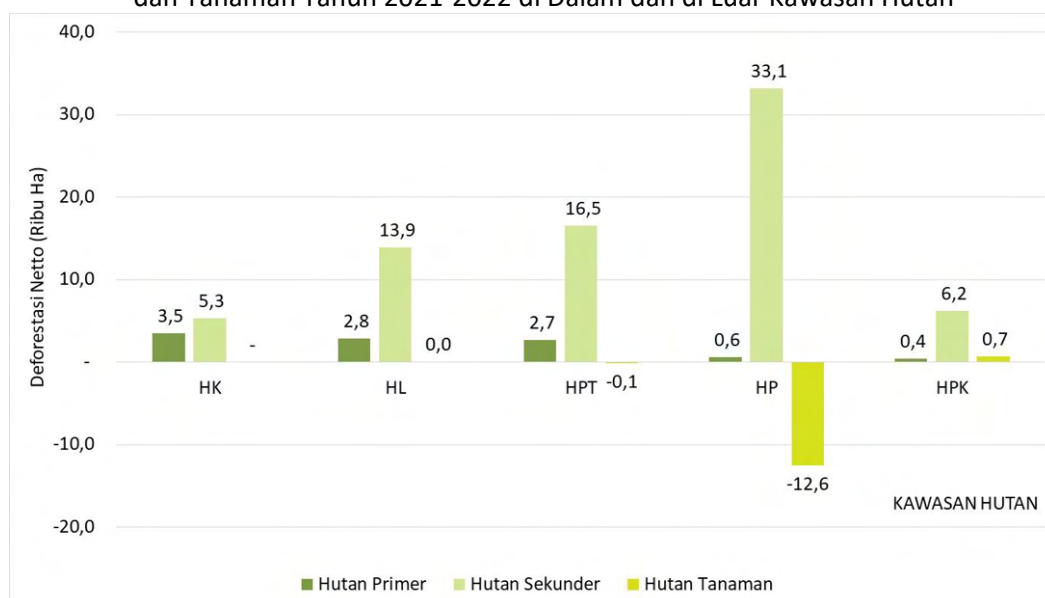
Gambar 10. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2021-2022 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (APL)

b. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Tipe Hutan

- Deforestasi Netto di dalam kawasan hutan sebesar 73,1 ribu ha terdiri atas deforestasi di tipe hutan hutan primer sebesar 10,1 ribu ha dan hutan sekunder sebesar 75,0 ribu ha dan pada Hutan Tanaman sebesar -12,0 ribu ha yang artinya luas deforestasi brutonya lebih kecil dibandingkan dengan reforestasi. Sedangkan pada APL terjadi Deforestasi Netto sebesar 30,9 ribu ha terdiri atas deforestasi di tipe hutan primer sebesar 1,2 ribu ha, hutan sekunder sebesar 30,1 ribu ha dan hutan tanaman -0,5 ribu ha sebagaimana disajikan pada Gambar 11.
- Deforestasi netto di dalam Kawasan hutan tertinggi terjadi di HP yaitu pada tipe hutan sekunder seluas 33,1 ribu ha, hutan primer 0,6 ribu ha dan hutan tanaman -12,6 ribu ha. Sedangkan untuk Deforestasi Netto Hutan Alam tertinggi di dalam Kawasan hutan tertinggi terjadi di HP yaitu pada tipe hutan sekunder seluas 33,1 ribu ha dan hutan primer 0,6 ribu ha. Selengkapnya disajikan pada Gambar 12.



Gambar 11. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



Gambar 12. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam Kawasan Hutan

c. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Fungsi Kawasan Hutan

- Sebaran Deforestasi Netto di kawasan hutan seluruh Indonesia selama tahun 2021-2022 yaitu di HK sebesar 8,8 ribu ha (8,5%), HL sebesar 16,7 ribu ha (16,1 %), dan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) sebesar 47,6 ribu ha (45,7%). Sedangkan Deforestasi Netto di APL sebesar 30,9 ribu ha (29,7%).
- Sebaran Deforestasi Netto Hutan Alam di kawasan hutan seluruh Indonesia selama tahun 2021-2022 yaitu di HK sebesar 8,8 ribu ha (7,6%), HL sebesar 16,7 ribu ha (14,3%), dan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) sebesar 59,6 ribu ha (51,1%). Sedangkan Deforestasi Netto di APL sebesar 31,4 ribu ha (26,9%).
- Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Fungsi Kawasan Hutan baik secara keseluruhan maupun di Hutan Alam selengkapnya disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III. 2 Deforestasi Netto pada Fungsi Kawasan Hutan (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

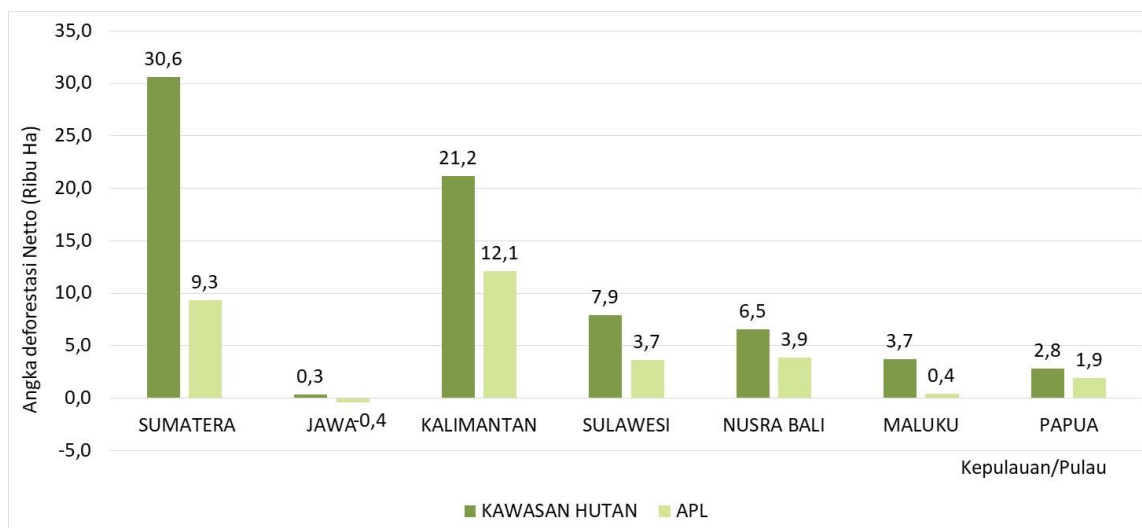
NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS DEFORESTASI NETTO		LUAS DEFORESTASI NETTO HUTAN ALAM	
		Luas (Ribu Ha)	%	Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	8,8	8,5	8,8	7,6
2	Kawasan Hutan Lindung	16,7	16,1	16,7	14,3
3	Kawasan Hutan Produksi		-		-
	a. HPT	19,1	18,4	19,2	16,5
	b. HP	21,2	20,4	33,8	29,0
	c. HPK	7,3	7,0	6,6	5,6
	sub Total	47,6	45,7	59,6	51,1
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	73,1	70,3	85,1	73,1
4	Areal Penggunaan Lain	30,9	29,7	31,4	26,9
	Total Deforestasi (1+ 2 + 3 + 4)	104,0	100,0	116,5	100,0

d. Sebaran Deforestasi Netto menurut Kelompok Pulau

- Sebaran Deforestasi Netto tahun 2021-2022 menurut kelompok pulau, yang terbesar terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 48,0 ribu ha atau 42,3% dari total Deforestasi Netto di Indonesia, diikuti Kelompok Pulau Sumatera sebesar 41,7 ribu ha (36,7%). Data selengkapnya disajikan pada Tabel III.3 dan Gambar 13.
- Sebaran Deforestasi Netto Hutan Alam tahun 2021-2022 menurut kelompok pulau, yang terbesar terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 65,7 ribu ha atau 48,9% dari total Deforestasi Netto Hutan Alam di Indonesia, diikuti Pulau Sumatera sebesar 43,6 ribu ha (32,4%). Data selengkapnya disajikan pada Tabel III.4 dan Gambar 14.

Tabel III. 3 Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

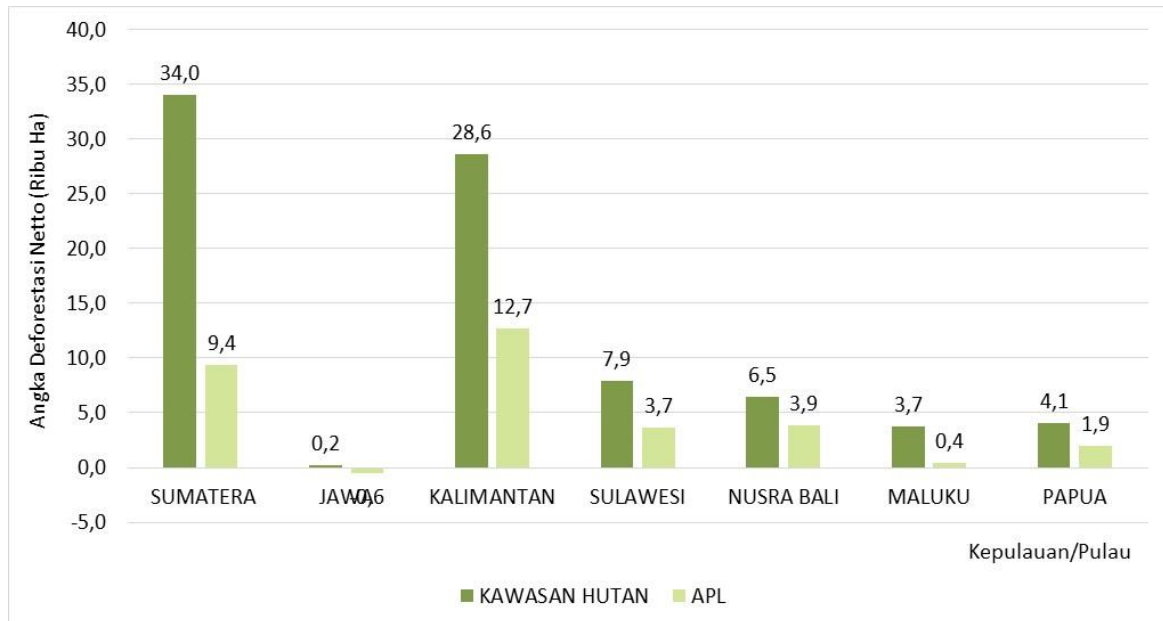
NO.	DEFORESTASI PADA KELOMPOK PULAU	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PULAU SUMATERA	7,8	9,5	7,1	5,2	29,7	0,9	30,6	9,3	39,9
2	PULAU JAWA	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	-0,4	-0,1
3	PULAU KALIMANTAN	0,2	1,4	5,4	10,9	17,8	3,4	21,2	12,1	33,3
4	PULAU SULAWESI	0,2	2,7	2,9	1,0	6,8	1,1	7,9	3,7	11,6
5	PULAU NUSRA BALI	0,4	2,6	1,8	1,7	6,5	0,0	6,5	3,9	10,4
6	PULAU MALUKU	0,0	0,3	0,4	1,9	2,7	1,0	3,7	0,4	4,1
7	PULAU PAPUA	0,2	0,1	1,2	0,4	1,9	0,9	2,8	1,9	4,8



Gambar 13. Diagram Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribu Ha) di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022

Tabel III. 4 Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

NO.	DEFORESTASI PADA KELOMPOK PULAU	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PULAU SUMATERA	7,8	9,5	7,2	8,6	33,1	0,9	34,0	9,4	43,4
2	PULAU JAWA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	-0,6	-0,3
3	PULAU KALIMANTAN	0,2	1,4	5,5	18,9	26,0	2,7	28,6	12,7	41,3
4	PULAU SULAWESI	0,2	2,7	2,9	1,0	6,8	1,1	7,9	3,7	11,6
5	PULAU NUSRA BALI	0,4	2,6	1,8	1,7	6,5	0,0	6,5	3,9	10,4
6	PULAU MALUKU	0,0	0,3	0,4	1,9	2,7	1,0	3,7	0,4	4,1
7	PULAU PAPUA	0,2	0,1	1,2	1,6	3,2	0,9	4,1	1,9	6,0

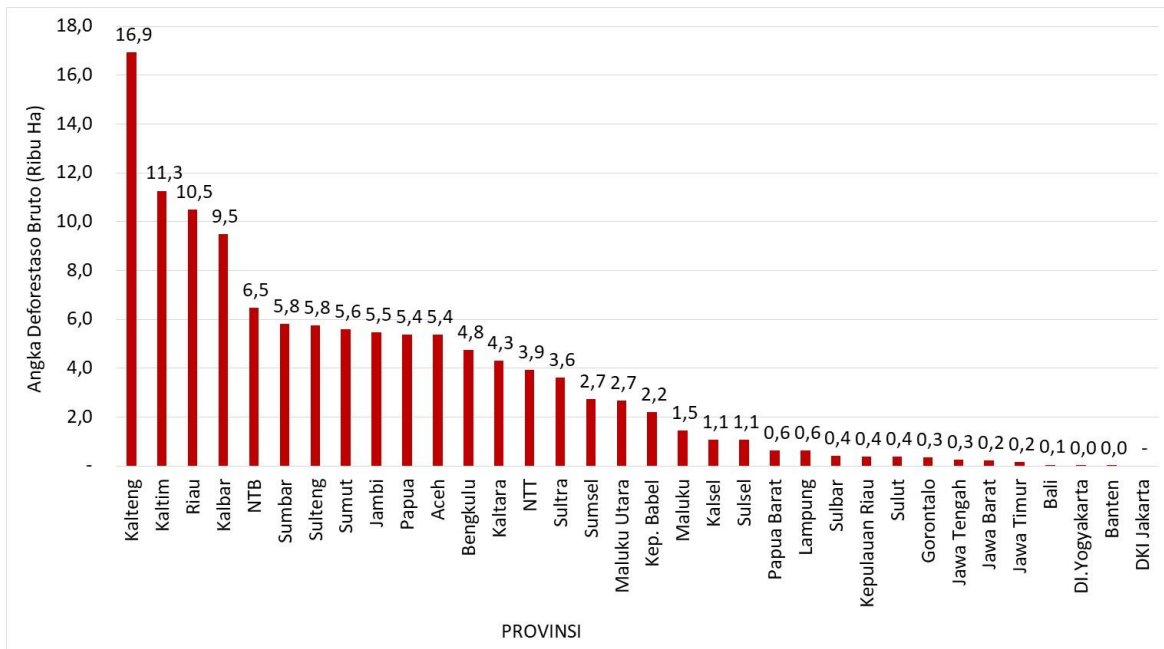


Gambar 14. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

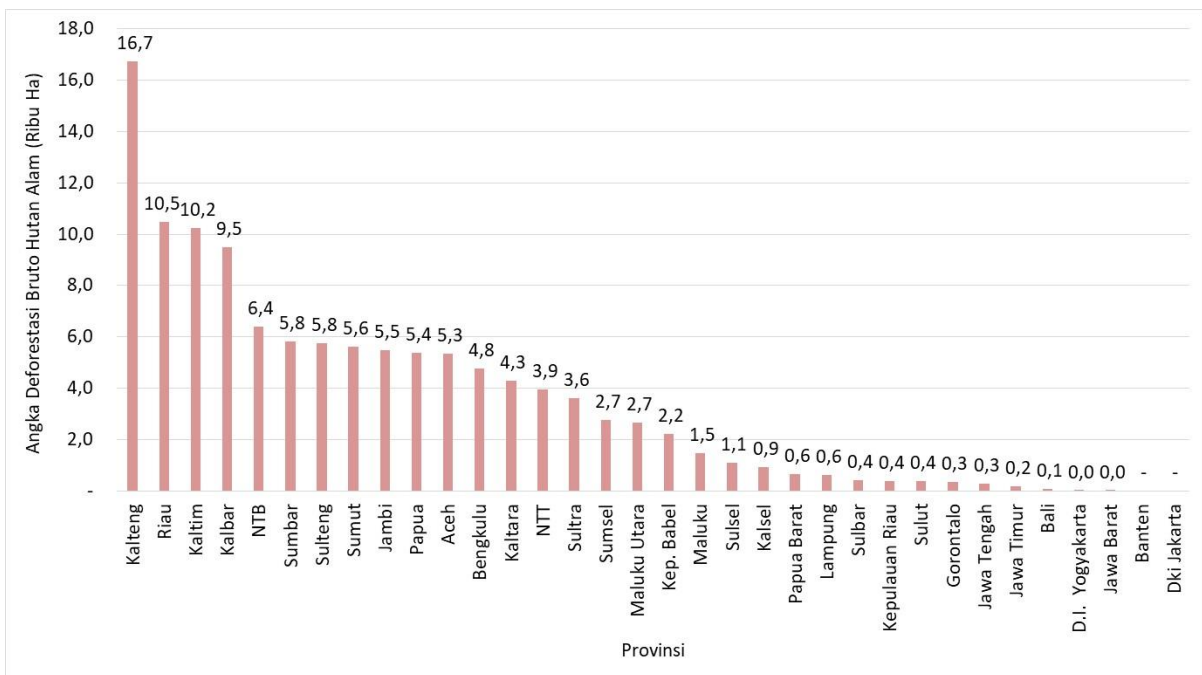
B. Deforestasi Indonesia per Provinsi

(1) Deforestasi Bruto Indonesia per Provinsi

- Pada perhitungan periode tahun 2021-2022, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi yaitu sebesar 16,9 ribu ha (14,2%), Kalimantan Timur sebesar 11,3 ribu ha (9,4%), Riau sebesar 10,5 ribu ha (8,8%), Kalimantan Barat sebesar 9,5 ribu ha (8,0%), Nusa Tenggara Barat sebesar 6,5 ribu ha (5,4%). Sebaliknya terdapat provinsi yang tidak teridentifikasi mengalami deforestasi bruto yaitu Provinsi DKI Jakarta. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 15.
- Selanjutnya Angka Deforestasi Bruto Hutan Alam tertinggi terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 16,7 ribu ha (14,2%), berikutnya Riau sebesar 10,5 ribu ha (8,9%), Kalimantan Timur sebesar 10,2 ribu ha (8,7%), Kalimantan Barat sebesar 9,5 ribu ha (8,1%), dan Nusa Tenggara Barat sebesar 6,4 ribu ha (5,4%). Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 16.



Gambar 15. Grafik Deforestasi Bruto per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

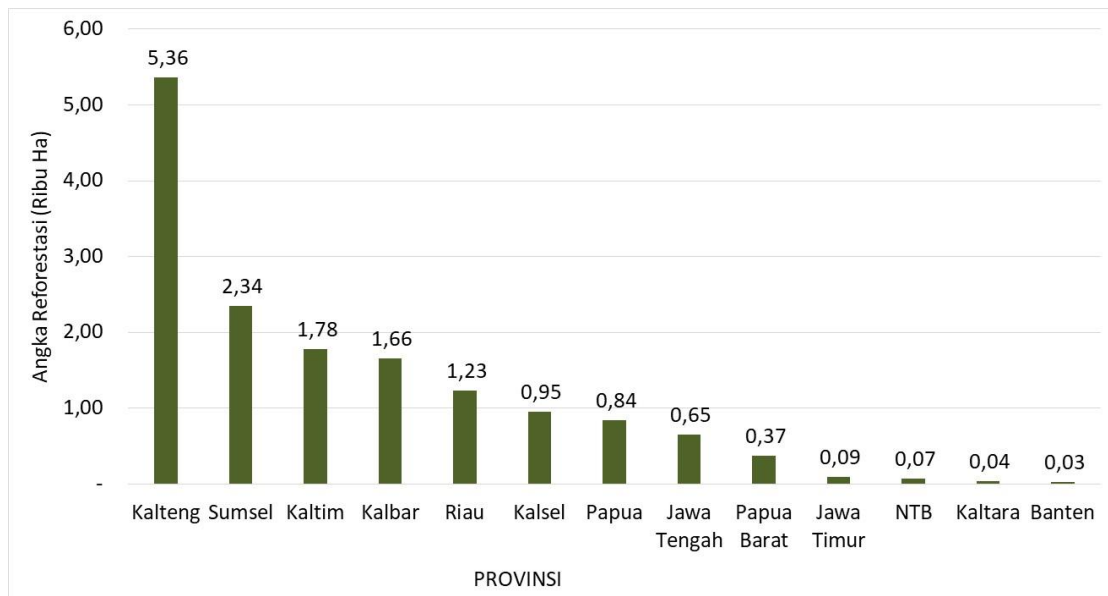


Gambar 16. Grafik Deforestasi Bruto Hutan Alam per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

(2) Reforestasi Indonesia per Provinsi

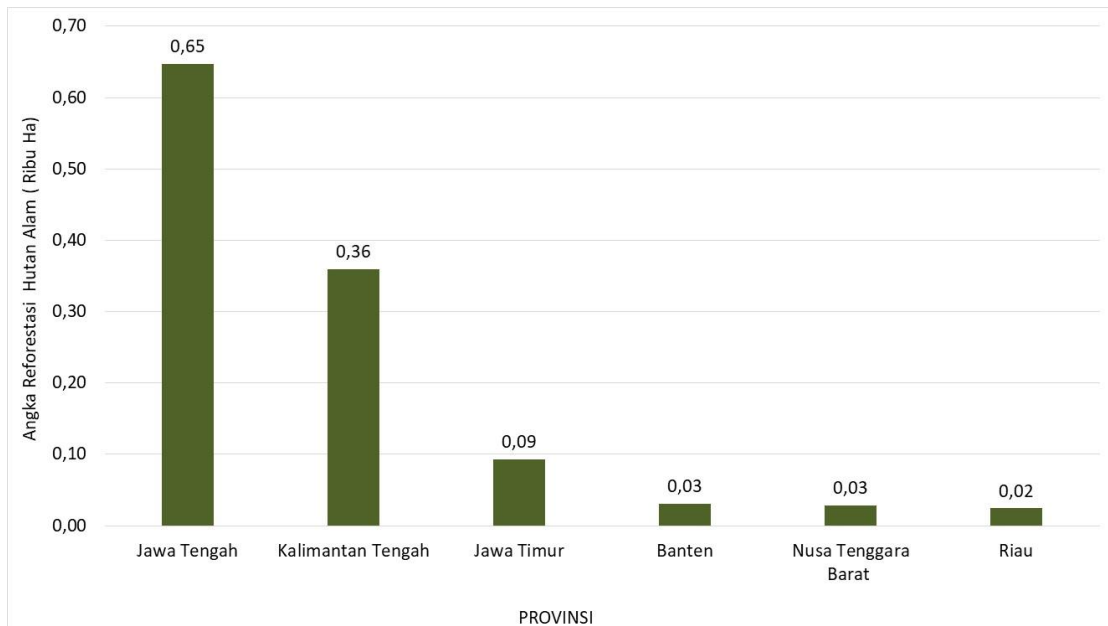
- Pada periode ini, reforestasi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Banten.

- Angka reforestasi tertinggi teridentifikasi pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,36 ribu ha (34,77%), diikuti dengan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,34 ribu ha (15,20%), Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,78 ribu ha (11,52%), Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,66 ribu ha (10,75%) dan Provinsi Riau sebesar 1,23 ribu ha (7,99%). Sementara luas reforestasi pada provinsi lainnya kurang dari 1.000 ha. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 17.



Gambar 17. Grafik Reforestasi per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

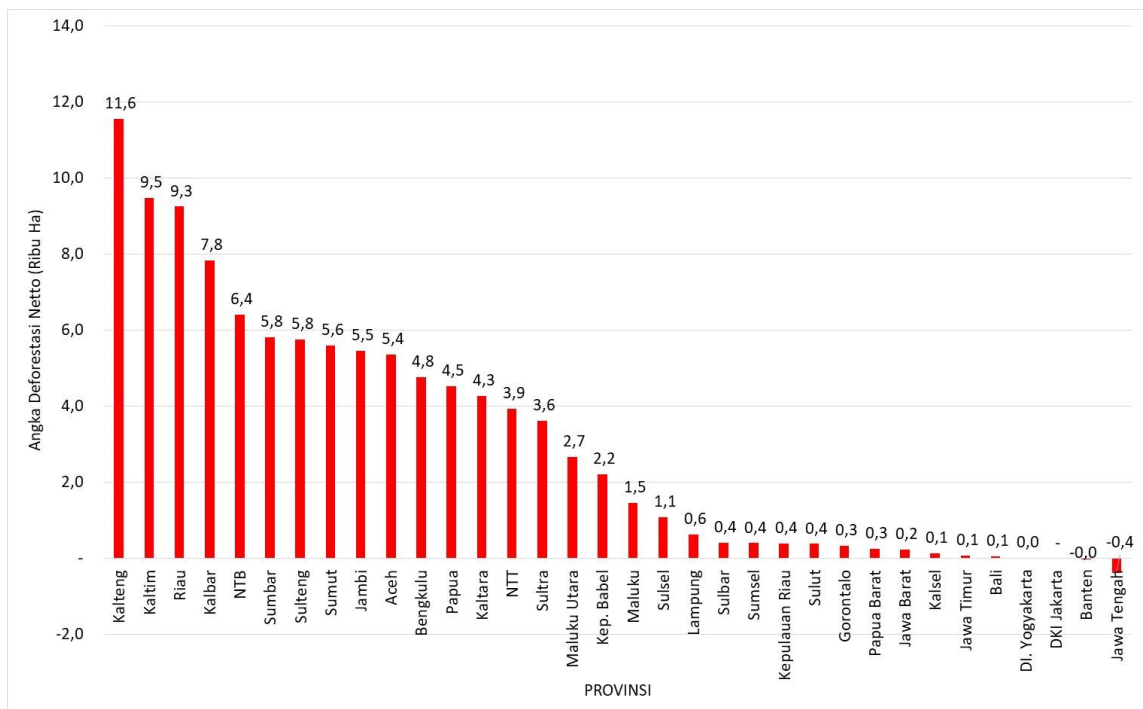
- Reforestasi pada hutan alam teridentifikasi dalam 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Riau. Angka tertinggi teridentifikasi di Jawa Tengah dengan luasan 0,65 ribu ha. Kondisi reforestasi pada hutan alam di provinsi lain dapat dilihat di Gambar 18.



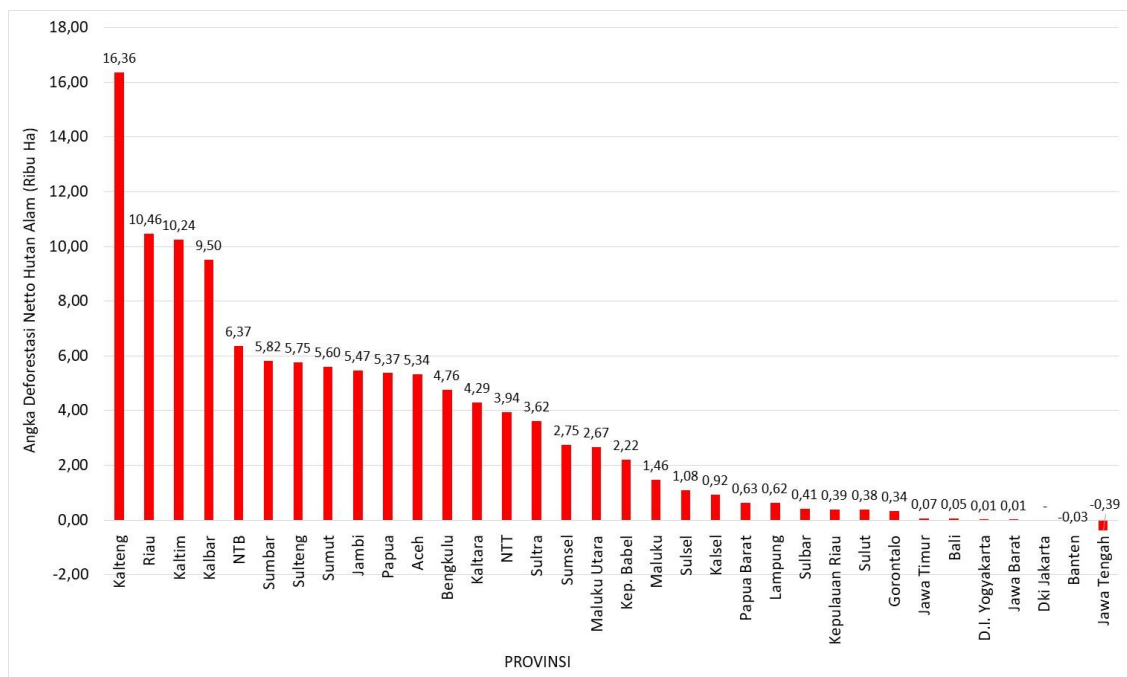
Gambar 18. Grafik Reforestasi Hutan Alam per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2021-2022

(3) Deforestasi Netto Indonesia per Provinsi

- Penghitungan Deforestasi Netto 2021-2022 menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan berhutan menjadi tidak berhutan tidak terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
- Deforestasi Netto 2021-2022 terdapat nilai negatif di Provinsi Banten dan Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa reforestasi memiliki nilai yang lebih luas.
- 5 provinsi dengan nilai deforestasi netto tertinggi sama dengan deforestasi bruto, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 19.
- Deforestasi netto 2021-2022 pada hutan alam juga tidak teridentifikasi pada provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
- Deforestasi netto pada hutan alam tahun 2021-2022 pada Provinsi Banten menunjukan angka negatif (-0,28 ribu ha) tidak ada yang menunjukkan angka negatif yang menandakan bahwa reforestasi memiliki nilai yang lebih luas.
- 5 provinsi dengan deforestasi netto 2021-2022 pada hutan alam tertinggi sama dengan 5 provinsi di deforestasi netto secara keseluruhan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 20.



Gambar 19. Grafik Deforestasi Netto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022



Gambar 20. Grafik Deforestasi Netto Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022

C. Deforestasi Indonesia per Fungsi Kawasan Hutan

Angka Deforestasi Indonesia yang dimaksud pada bagian C ini adalah Deforestasi Netto Indonesia pada hutan alam dan hutan tanaman. Perhitungan disajikan menurut fungsi Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat di-Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan tipe hutan (hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman) pada 34 provinsi Indonesia. Selanjutnya penyajian tabel Angka Deforestasi Indonesia untuk masing-masing provinsi juga disajikan secara lengkap pada lampiran 3.

(1) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Konservasi per provinsi disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III. 5 Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi						Total
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	234,5	2,7	114,5	1,3	-	-	349,1
2	Sumatera Utara	112,6	1,3	164,3	1,9	-	-	276,9
3	Riau	11,4	0,1	1.462,1	16,5	-	-	1.473,5
4	Sumatera Barat	958,0	10,8	757,5	8,6	-	-	1.715,5
5	Jambi	1.520,9	17,2	1.615,7	18,3	-	-	3.136,6
6	Sumatera Selatan	35,2	0,4	101,1	1,1	-	-	136,3
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	12,6	0,1	-	-	12,6
8	Bengkulu	241,7	2,7	272,4	3,1	-	-	514,1
9	Lampung	136,7	1,5	28,7	0,3	-	-	165,4
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
	SUMATERA	3.251,1	36,8	4.529,0	51,2	-	-	7.780,1
			-		-		-	
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	6,2	0,1	-	-	6,2
15	D.I. Yogyakarta	-	-	12,9	0,1	-	-	12,9
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
	JAWA	-	-	19,2	0,2	-	-	19,2
			-		-		-	
17	Kalimantan Barat	16,0	0,2	68,4	0,8	-	-	84,4
18	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Tengah	-	-	7,2	0,1	-	-	7,2
20	Kalimantan Timur	-	-	59,2	0,7	-	-	59,2
21	Kalimantan Utara	6,6	0,1	1,6	0,0	-	-	8,1
	KALIMANTAN	22,5	0,3	136,4	1,5	-	-	158,9
			-		-		-	
22	Sulawesi Utara	11,2	0,1	2,7	0,0	-	-	13,9
23	Gorontalo	13,8	0,2	4,9	0,1	-	-	18,7
24	Sulawesi Tengah	1,4	0,0	94,2	1,1	-	-	95,6
25	Sulawesi Tenggara	-	-	48,4	0,5	-	-	48,4
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	12,1	0,1	4,8	0,1	-	-	16,9
	SULAWESI	38,6	0,4	155,0	1,8	-	-	193,5
			-		-		-	
28	Bali	-	-	-	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	-	-	354,8	4,0	-	-	354,8
30	Nusa Tenggara Timur	37,2	0,4	23,8	0,3	-	-	61,1
	BALI NUSA TENGGARA	37,2	0,4	378,7	4,3	-	-	415,9
			-		-		-	
31	Maluku Utara	14,8	0,2	20,2	0,2	-	-	35,0
32	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
	MALUKU	14,8	0,2	20,2	0,2	-	-	35,0
			-		-		-	
33	Papua	119,9	1,4	67,0	0,8	-	-	186,8
34	Papua Barat	30,3	0,3	20,3	0,2	-	-	50,6
	PAPUA	150,2	1,7	87,3	1,0	-	-	237,5
	INDONESIA	3.514,5	39,8	5.325,6	60,2	-	-	8.840,0

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HK per provinsi pada Tabel III.5, terlihat bahwa:

- a. Deforestasi pada fungsi kawasan HK terjadi pada hutan primer dan hutan sekunder. Deforestasi pada hutan sekunder lebih besar dari pada hutan primer dalam kawasan hutan konservasi. Deforestasi di hutan sekunder sebesar 5,3 ribu ha atau 60,2% sedangkan deforestasi di hutan primer sebesar 3,5 ribu ha atau 39,8%. Sedangkan pada hutan tanaman dalam kawasan hutan konservasi tidak terjadi deforestasi.
- b. Provinsi Jambi mengalami deforestasi hutan konservasi terbesar yaitu 3,1 ribu ha. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan primer yaitu 1,5 ribu ha dan di hutan sekunder 1,6 ribu ha. Berdasarkan deforestasi 2021-2022, Provinsi Jambi juga memiliki nilai deforestasi terbesar pada kawasan hutan konservasi.
- c. Provinsi yang mengalami deforestasi tertinggi dari tiap kelompok Pulau/Kepulauan dalam kawasan hutan konservasi diantaranya, Provinsi Jambi (Pulau Sumatera), Provinsi D.I Yogyakarta (Pulau Jawa), Provinsi Kalimantan Barat (Pulau Kalimantan), Provinsi Sulawesi Tengah (Pulau Sulawesi), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kepulauan Bali Nusa Tenggara), Provinsi Maluku Utara (Pulau Maluku) dan Provinsi Papua (Pulau Papua).
- d. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam **kisaran >100,0 ha** pada kawasan HK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.6:

Tabel III. 6 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Jambi	3.136,6
2	Sumatera Barat	1.715,5
3	Riau	1.473,5
4	Bengkulu	514,1
5	Nusa Tenggara Barat	354,8
6	Aceh	349,1
7	Sumatera Utara	276,9
8	Papua	186,8
9	Lampung	165,4
10	Sumatera Selatan	136,3

- e. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam **kisaran <100,0 ha** pada kawasan HK antara lain, sebagaimana diuraikan pada Tabel III.7

Tabel III. 7 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran <100,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sulawesi Tengah	95,6
2	Kalimantan Barat	84,4
3	Nusa Tenggara Timur	61,1
4	Kalimantan Timur	59,2
5	Papua Barat	50,6
6	Sulawesi Tenggara	48,4
7	Maluku Utara	35,0
8	Gorontalo	18,7
9	Sulawesi Selatan	16,9
10	Sulawesi Utara	13,9
11	D.I. Yogyakarta	12,9
12	Kepulauan Bangka Belitung	12,6
13	Kalimantan Utara	8,1
14	Kalimantan Tengah	7,2
15	Jawa Tengah	6,2

- f. Terdapat provinsi yang tidak mengalami deforestasi pada kawasan HK yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hutan Konservasi (HK) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan HK terdiri atas:

1. Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM)
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam (TWA)
3. Taman Buru.

Masing-masing kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pengelolaannya pun akan berbeda pula. Deforestasi pada masing-masing kawasan konservasi hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaannya serta menjadi salah satu fokus dalam upaya pengamanan hutan.

(2) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) per provinsi disajikan pada Tabel III.8 berikut.

Tabel III. 8 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	440,6	668,7	-	1.109,4
2	Sumatera Utara	144,2	1.284,7	-	1.428,9
3	Riau	10,5	1.126,9	-	1.137,5
4	Sumatera Barat	974,1	1.249,4	-	2.223,5
5	Jambi	119,6	33,0	-	152,6
6	Sumatera Selatan	113,0	1.681,1	-	1.794,1
7	Kepulauan Bangka Belitung	12,9	327,6	-	340,5
8	Bengkulu	352,4	614,3	-	966,6
9	Lampung	14,9	341,9	-	356,8
10	Kepulauan Riau	-	13,5	-	13,5
	SUMATERA	2.182,3	7.341,1	-	9.523,4
11	Banten	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	74,2	-	74,2
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	19,4	-	19,4
	JAWA	-	93,6	-	93,6
17	Kalimantan Barat	99,0	702,7	-	801,8
18	Kalimantan Selatan	3,0	288,3	-	291,2
19	Kalimantan Tengah	-	95,5	-	95,5
20	Kalimantan Timur	22,0	148,3	-	170,3
21	Kalimantan Utara	-	28,0	-	28,0
	KALIMANTAN	124,0	1.262,8	-	1.386,8
22	Sulawesi Utara	11,2	4,8	-	16,1
23	Gorontalo	-	24,2	-	24,2
24	Sulawesi Tengah	66,3	288,1	-	354,4
25	Sulawesi Tenggara	34,0	1.744,7	-	1.778,7
26	Sulawesi Barat	2,5	60,4	-	62,9
27	Sulawesi Selatan	80,5	378,0	-	458,5
	SULAWESI	194,5	2.500,2	-	2.694,7
28	Bali	-	51,2	-	51,2
29	Nusa Tenggara Barat	67,5	1.520,0	6,4	1.593,8
30	Nusa Tenggara Timur	197,3	716,1	-	913,4
	BALI NUSA TENGGARA	264,7	2.287,3	6,4	2.558,4
31	Maluku Utara	39,7	127,3	-	167,0
32	Maluku	-	174,1	-	174,1
	MALUKU	39,7	301,4	-	341,2
33	Papua	23,2	44,0	-	67,1
34	Papua Barat	-	38,8	-	38,8
	PAPUA	23,2	82,8	-	106,0
	INDONESIA	2.828,5	13.869,2	6,4	16.704,0

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HL per provinsi pada Tabel III.8, terlihat bahwa :

- a. Deforestasi dalam fungsi kawasan HL terjadi pada hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman. Sebagian besar deforestasi terjadi di hutan sekunder dengan total luasan 13,9 ribu ha atau 83,03% dan deforestasi pada hutan primer seluas 2,8 ribu ha atau 79,9%.
- b. Provinsi Sumatera Barat teridentifikasi mengalami deforestasi tertinggi pada hutan lindung dengan luas 2,2 ribu ha. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder seluas 1,3 ribu ha atau 56,2%.
- c. Provinsi dengan angka deforestasi dalam kawasan HL tertinggi di tiap kelompok Pulau/Kepulauan diantaranya: Provinsi Sumatera Barat untuk Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Tengah untuk Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku untuk Kepulauan Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, dan Provinsi Papua untuk Pulau Papua.
- d. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran sekitar **>1.000 ha** pada kawasan HL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.9:

Tabel III. 9 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran >1 ribu ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sumatera Barat	2.223,5
2	Sumatera Selatan	1.794,1
3	Sulawesi Tenggara	1.778,7
4	Nusa Tenggara Barat	1.593,8
5	Sumatera Utara	1.428,9
6	Riau	1.137,5
7	Aceh	1.109,4

- e. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran **100,0–1.000,0 ha** pada kawasan HL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.10:

Tabel III. 10 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran 100,0 – <1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Bengkulu	966,6
2	Nusa Tenggara Timur	913,4
3	Kalimantan Barat	801,8
4	Sulawesi Selatan	458,5
5	Lampung	356,8
6	Sulawesi Tengah	354,4
7	Kepulauan Bangka Belitung	340,5
8	Kalimantan Selatan	291,2
9	Maluku	174,1
10	Kalimantan Timur	170,3
11	Maluku Utara	167,0
12	Jambi	152,6

- f. Deforestasi di kawasan HL dalam kisaran <100,0 ha antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.11:

Tabel III. 11 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran <100,0

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Tengah	95,5
2	Jawa Tengah	74,2
3	Papua	67,1
4	Sulawesi Barat	62,9
5	Bali	51,2
6	Papua Barat	38,8
7	Kalimantan Utara	28,0
8	Gorontalo	24,2
9	Jawa Timur	19,4
10	Sulawesi Utara	16,1
11	Kepulauan Riau	13,5

- g. Deforestasi tidak teridentifikasi pada beberapa provinsi, diantaranya DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Hutan Lindung (HL) merupakan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah dan mencegah intrusi air laut. Di sisi lain pertambahan penduduk telah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan, khususnya HL, untuk memenuhi kebutuhan akan lahan garapan bagi masyarakat sekitar hutan.

Terbukanya areal berhutan pada HL akibat penebangan liar dan alih guna lahan menjadi lahan pertanian telah menyebabkan berbagai bencana erosi dan tanah longsor, timbulnya kekeringan pada saat musim kemarau, dan banjir pada saat musim hujan, seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk mencegah terbukanya penutupan lahan berhutan di HL, pengelolaan kawasan HL harus mengelola kawasan sesuai daya dukung kawasan yaitu dengan mempertahankan kelestarian blok perlindungan serta melaksanakan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan lestari berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian dapat mempertahankan kepentingan fungsi tata air HL tanpa mengabaikan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.

(3) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Produksi

Deforestasi di dalam kawasan hutan produksi terjadi pada HP, HPT, dan HPK.

a. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per provinsi disajikan pada Tabel III.12 berikut.

Tabel III. 12 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	67,2	285,3	-	352,5
2	Sumatera Utara	3,9	752,5	-	756,3
3	Riau	276,6	2.187,6	-58,3	2.405,9
4	Sumatera Barat	16,5	320,8	-	337,3
5	Jambi	80,7	750,9	-	831,6
6	Sumatera Selatan	-	230,5	-	230,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
8	Bengkulu	31,1	2.140,8	-	2.171,9
9	Lampung	7,9	27,5	-	35,4
10	Kepulauan Riau	-	28,1	-	28,1
	SUMATERA	483,9	6.724,0	-58,3	7.149,5
11	Banten	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	5,2	23,9	29,0
14	Jawa Tengah	-	92,1	3,2	95,3
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
	JAWA	-	97,2	27,1	124,3
		0,7	2,1		
17	Kalimantan Barat	668,6	2.119,8	-120,1	2.668,3
18	Kalimantan Selatan	-	159,9	-	159,9
19	Kalimantan Tengah	-	1.196,3	-	1.196,3
20	Kalimantan Timur	16,1	888,5	-	904,6
21	Kalimantan Utara	103,8	349,0	-	452,9
	KALIMANTAN	788,5	4.713,5	-120,1	5.381,9
22	Sulawesi Utara	23,0	219,6	-	242,6
23	Gorontalo	18,1	178,6	-	196,7
24	Sulawesi Tengah	487,1	922,7	5,9	1.415,8
25	Sulawesi Tenggara	33,1	644,1	-	677,2
26	Sulawesi Barat	-	123,2	-	123,2
27	Sulawesi Selatan	38,1	249,2	-	287,3
	SULAWESI	599,4	2.337,4	5,9	2.942,7
28	Bali	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	23,0	1.542,0	8,6	1.573,5
30	Nusa Tenggara Timur	55,3	189,1	-	244,4
	BALI NUSA TENGGARA	78,3	1.731,0	8,6	1.817,9
31	Maluku Utara	56,6	283,8	-	340,4
32	Maluku	-	98,4	-	98,4
	MALUKU	56,6	382,2	-	438,8
33	Papua	691,4	515,9	-	1.207,3
34	Papua Barat	5,8	28,8	-	34,6
	PAPUA	697,2	544,7	-	1.241,9
	INDONESIA	2.703,9	16.530,1	-136,9	19.097,0

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HPT per provinsi pada Tabel III.12, terlihat bahwa:

- Deforestasi dalam fungsi kawasan HPT terjadi pada hutan primer, hutan dan sekunder. Sebagian besar deforestasi terjadi pada hutan sekunder dengan luas 16,5 ribu ha. Deforestasi pada hutan primer menyumbang sebesar 2,7 ribu ha. Nilai deforestasi pada hutan tanaman menunjukkan nilai negatif (-136,9 ha) yang mengindikasikan bahwa reforestasi lebih besar dari pada deforestasi bruto.
- Provinsi dengan deforestasi tertinggi di kawasan HPT adalah Provinsi Kalimantan Barat seluas 2,7 ribu ha dengan rincian pada hutan primer seluas 0,7 ribu ha, hutan sekunder seluas 2,1 ribu ha, dan hutan tanaman seluas -120,1 ha.
- Provinsi dengan deforestasi tertinggi di kawasan HPT tiap kelompok Pulau/Kepulauan diantaranya: Provinsi Riau untuk Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Barat untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, Provinsi Papua untuk Pulau Papua, dan Provinsi Jawa Tengah untuk Pulau Jawa.
- Angka Deforestasi pada kawasan HPT antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.13:

Tabel III. 13 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran >1.000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Barat	2.668,3
2	Riau	2.405,9
3	Bengkulu	2.171,9
4	Nusa Tenggara Barat	1.573,5
5	Sulawesi Tengah	1.415,8
6	Papua	1.207,3
7	Kalimantan Tengah	1.196,3

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran sekitar **100,0-1.000,0 ha** pada kawasan HPT antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.14:

Tabel III. 14 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran 100,0-1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Timur	904,6
2	Jambi	831,6
3	Sumatera Utara	756,3
4	Sulawesi Tenggara	677,2
5	Kalimantan Utara	452,9
6	Aceh	352,5
7	Maluku Utara	340,4
8	Sumatera Barat	337,3
9	Sulawesi Selatan	287,3
10	Nusa Tenggara Timur	244,4
11	Sulawesi Utara	242,6
12	Sumatera Selatan	230,5
13	Gorontalo	196,7
14	Kalimantan Selatan	159,9
15	Sulawesi Barat	123,2

- Provinsi yang memiliki deforestasi kurang dari **100 ha** pada kawasan HPT antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.15:

Tabel III. 15 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT di bawah 100 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Maluku	98,4
2	Jawa Tengah	95,3
3	Lampung	35,4
4	Papua Barat	34,6
5	Jawa Barat	29,0
6	Kepulauan Riau	28,1

- Beberapa provinsi tidak teridentifikasi mengalami deforestasi, diantaranya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Bali.

b. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per provinsi disajikan pada Tabel III.16 berikut.

Tabel III. 16 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	234,9	743,3	20,5	998,6
2	Sumatera Utara	0,9	685,2	-	686,1
3	Riau	-	3.424,5	-1.074,6	2.349,9
4	Sumatera Barat	12,2	374,2	-	386,3
5	Jambi	153,6	820,2	-	973,9
6	Sumatera Selatan	-	44,1	-2.341,6	-2.297,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	34,0	1.296,7	-	1.330,7
8	Bengkulu	-	770,7	-	770,7
9	Lampung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	30,7	-	30,7
	SUMATERA	435,5	8.189,6	-3.395,7	5.229,4
11	Banten	-	-	3,5	3,5
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	73,3
14	Jawa Tengah	-	24,4	9,8	34,2
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
	JAWA	-	24,4	86,6	110,9
17	Kalimantan Barat	8,7	2.957,0	-1.530,1	1.435,7
18	Kalimantan Selatan	-	351,5	-183,6	167,8
19	Kalimantan Tengah	-	11.172,6	-4.800,5	6.372,1
20	Kalimantan Timur	-	4.088,9	-1.523,5	2.565,5
21	Kalimantan Utara	5,4	325,3	-20,6	310,2
	KALIMANTAN	14,2	18.895,3	-8.058,2	10.851,3
22	Sulawesi Utara	11,6	2,9	-	14,6
23	Gorontalo	-	11,2	-	11,2
24	Sulawesi Tengah	59,2	532,3	-	591,5
25	Sulawesi Tenggara	3,8	185,4	-	189,2
26	Sulawesi Barat	-	130,8	-	130,8
27	Sulawesi Selatan	-	78,2	-	78,2
	SULAWESI	74,7	940,8	-	1.015,5
28	Bali	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	8,6	1.285,8	13,9	1.308,2
30	Nusa Tenggara Timur	88,1	349,0	-	437,1
	BALI NUSA TENGGARA	96,7	1.634,8	13,9	1.745,4
31	Maluku Utara	1,1	894,9	-	896,0
32	Maluku	-	990,3	-	990,3
	MALUKU	1,1	1.885,2	-	1.886,3
33	Papua	-	1.490,4	-839,5	650,9
34	Papua Barat	12,5	65,2	-364,5	-286,8
	PAPUA	12,5	1.555,6	-1.204,0	364,1
	INDONESIA	634,7	33.125,7	-12.557,5	21.202,9

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HP per provinsi pada Tabel III.16, terlihat bahwa:

- Deforestasi dalam kawasan HP terjadi pada hutan primer dan hutan sekunder. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder dengan luasan 33,12 ribu ha. Deforestasi pada hutan primer seluas 0,63 ribu ha. Total deforestasi lebih rendah dari deforestasi hutan sekunder karena terdapat reforestasi yang lebih besar dalam hutan tanaman seluas 12,56 ribu ha.
- Provinsi Kalimantan Tengah mengalami deforestasi dalam kawasan HP tertinggi yaitu seluas 6,4 ribu ha dimana terjadi pada hutan sekunder seluas 11,2 ribu ha dan pada hutan tanaman terjadi reforestasi seluas 4,8 ribu ha sehingga luas reforestasi menjadi pengurang pada deforestasi netto.
- Provinsi yang memiliki deforestasi **lebih dari 1.000 ha** pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.17:

Tabel III. 17 Luas Deforestasi pada Kawasan HP >1.000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Tengah	6.372,1
2	Kalimantan Timur	2.565,5
3	Riau	2.349,9
4	Kalimantan Barat	1.435,7
5	Kepulauan Bangka Belitung	1.330,7
6	Nusa Tenggara Barat	1.308,2

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran **100-1.000 ha** pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.18:

Tabel III. 18 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dalam kisaran 100–1000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Aceh	998,6
2	Maluku	990,3
3	Jambi	973,9
4	Maluku Utara	896,0
5	Bengkulu	770,7
6	Sumatera Utara	686,1
7	Papua	650,9
8	Sulawesi Tengah	591,5
9	Nusa Tenggara Timur	437,1
10	Sumatera Barat	386,3
11	Kalimantan Utara	310,2
12	Sulawesi Tenggara	189,2
13	Kalimantan Selatan	167,8
14	Sulawesi Barat	130,8

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kurang dari **100 ha** pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.19:

Tabel III. 19 Luas Deforestasi pada Kawasan HP < 100 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sulawesi Selatan	78,2
2	Jawa Barat	73,3
3	Jawa Tengah	34,2
4	Kepulauan Riau	30,7
5	Sulawesi Utara	14,6
6	Gorontalo	11,2
7	Banten	3,5

- Provinsi yang tidak mengalami deforestasi di dalam kawasan HP adalah Provinsi Lampung, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali.
- Provinsi yang memiliki deforestasi dengan angka negatif pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.20:

Tabel III. 20 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dengan angka negatif

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Papua Barat	-286,8
2	Sumatera Selatan	-2.297,5

- Deforestasi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka negatif yang mengindikasikan bahwa reforestasi lebih besar dari pada deforestasi bruto dalam kawasan hutan produksi. Penambahan terjadi dalam bentuk hutan tanaman yaitu di Provinsi Papua Barat seluas 364,5 ha, dan Provinsi Sumatera Selatan seluas -2,3 ribu ha.

Kawasan HP dapat dimanfaatkan melalui beberapa kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan HP diantaranya pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu berasal dari hutan yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil budidaya tanaman (hutan tanaman).

c. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per provinsi disajikan pada Tabel III.21 berikut.

Tabel III. 21 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	-	24,9	-	24,9
2	Sumatera Utara	-	111,3	-	111,3
3	Riau	-	530,9	-	530,9
4	Sumatera Barat	-	198,7	-	198,7
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
8	Bengkulu	-	9,0	-	9,0
9	Lampung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	19,5	-	19,5
	SUMATERA	-	894,3	0,0	894,3
11	Banten	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
	JAWA	-	-	-	-
17	Kalimantan Barat	-	138,8	-	138,8
18	Kalimantan Selatan	-	17,5	-	17,5
19	Kalimantan Tengah	-	2.167,0	-	2.167,0
20	Kalimantan Timur	-	269,3	727,4	996,7
21	Kalimantan Utara	-	78,7	-	78,7
	KALIMANTAN	-	2.671,3	727,4	3.398,7
22	Sulawesi Utara	-	8,0	-	8,0
23	Gorontalo	-	3,6	-	3,6
24	Sulawesi Tengah	88,5	944,7	-	1.033,2
25	Sulawesi Tenggara	-	7,2	-	7,2
26	Sulawesi Barat	-	12,9	-	12,9
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
	SULAWESI	88,5	976,3	-	1.064,8
28	Bali	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
30	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
	BALI NUSA TENGGARA	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	880,5	-	880,5
32	Maluku	1,9	147,9	-	149,8
	MALUKU	1,9	1.028,4	-	1.030,3
33	Papua	282,2	528,1	-	810,4
34	Papua Barat	-	98,3	10,5	87,8
	PAPUA	282,2	626,4	10,5	898,2
	INDONESIA	372,6	6.196,8	716,9	7.286,3

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HPK per provinsi pada Tabel III.21, terlihat bahwa:

- Deforestasi dalam fungsi HPK terjadi pada hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder yaitu 6,2 ribu ha (85,0%)
- Deforestasi tertinggi dalam fungsi kawasan HPK terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan angka 2,2 ribu ha pada hutan sekunder.
- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran sekitar **100,0–1.000,0 ha** pada kawasan HPK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.22:

Tabel III. 22 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Timur	996,7
2	Maluku Utara	880,5
3	Papua	810,4
4	Riau	530,9
5	Sumatera Barat	198,7
6	Maluku	149,8
7	Kalimantan Barat	138,8
8	Sumatera Utara	111,3

- Provinsi yang memiliki deforestasi **kurang dari 100 ha** pada kawasan HPK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.23:

Tabel III. 23 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK kurang dari 100 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Papua Barat	87,8
2	Kalimantan Utara	78,7
3	Aceh	24,9
4	Kepulauan Riau	19,5
5	Kalimantan Selatan	17,5
6	Sulawesi Barat	12,9
7	Bengkulu	9,0
8	Sulawesi Utara	8,0
9	Sulawesi Tenggara	7,2
10	Gorontalo	3,6

- Deforestasi tidak teridentifikasi pada Provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Hutan Produksi yang dapat Di-Konversi (HPK) adalah kawasan hutan di luar hutan tetap yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan. Pada umumnya diperuntukkan bagi kegiatan di luar kehutanan, antara lain transmigrasi dan perkebunan, dengan alternatif pelepasan kawasan menjadi kawasan Non Hutan Negara atau Areal Penggunaan Lain (APL).

(4) Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL)

Hasil penghitungan deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per provinsi disajikan pada Tabel III.24 berikut.

Tabel III. 24 Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per Provinsi (Ha)
Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			Total
		Hutan Primer Luas (Ha)	Hutan Sekunder Luas (Ha)	Hutan Tanaman Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	265,1	2.262,1	5,4	2.532,6
2	Sumatera Utara	0,0	2.339,4	-	2.339,4
3	Riau	-	1.431,2	- 74,0	1.357,1
4	Sumatera Barat	54,1	902,0	-	956,1
5	Jambi	83,7	288,7	-	372,3
6	Sumatera Selatan	45,0	497,5	- 2,0	540,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	2,5	528,7	-	531,3
8	Bengkulu	0,4	329,7	-	330,0
9	Lampung	-	66,1	-	66,1
10	Kepulauan Riau	-	298,1	-	298,1
	SUMATERA	450,7	8.943,5	- 70,6	9.323,5
11	Banten	-	- 31,2	3,8	- 27,4
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	127,9	127,9
14	Jawa Tengah	-	- 585,1	0,0	- 585,1
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	50,4	-	50,4
	JAWA	-	- 565,9	131,7	- 434,3
17	Kalimantan Barat	-	2.723,4	- 6,6	2.716,8
18	Kalimantan Selatan	-	98,8	- 600,3	- 501,5
19	Kalimantan Tengah	-	1.726,2	-	1.726,2
20	Kalimantan Timur	12,3	4.739,4	42,6	4.794,3
21	Kalimantan Utara	59,5	3.331,0	-	3.390,4
	KALIMANTAN	71,8	12.618,8	- 564,3	12.126,3
22	Sulawesi Utara	6,0	83,4	-	89,4
23	Gorontalo	-	83,2	-	83,2
24	Sulawesi Tengah	104,3	2.165,8	-	2.270,1
25	Sulawesi Tenggara	6,0	910,6	-	916,6
26	Sulawesi Barat	-	75,9	-	75,9
27	Sulawesi Selatan	-	239,3	-	239,3
	SULAWESI	116,3	3.558,3	-	3.674,6
28	Bali	-	2,0	-	2,0
29	Nusa Tenggara Barat	-	1.566,5	14,3	1.580,8
30	Nusa Tenggara Timur	223,3	2.065,4	-	2.288,8
	BALI NUSA TENGGARA	223,3	3.633,9	14,3	3.871,5
31	Maluku Utara	4,4	342,5	-	346,9
32	Maluku	-	50,5	-	50,5
	MALUKU	4,4	393,0	-	397,4
33	Papua	366,8	1.242,7	-	1.609,4
34	Papua Barat	-	334,0	-	334,0
	PAPUA	366,8	1.576,7	-	1.943,5
	INDONESIA	1.233,3	30.158,3	- 489,0	30.902,6

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di APL per provinsi pada Tabel III.24, terlihat bahwa:

- Deforestasi terjadi pada hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman. Sebagian besar deforestasi teridentifikasi pada hutan sekunder dengan luasan 30,2 ribu ha atau 97,6%.
- Provinsi Kalimantan Timur mengalami deforestasi tertinggi pada fungsi APL dengan luas 4,8 ribu ha dimana dominan terjadi pada hutan sekunder seluas 4,7 ribu ha.
- Provinsi dengan deforestasi dalam fungsi APL tertinggi tiap kelompok Pulau/Kepulauan di antaranya: Aceh untuk Pulau Sumatera, Jawa Tengah untuk Pulau Jawa, Kalimantan Timur untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi Tengah untuk Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, dan Papua untuk Pulau Papua.
- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran lebih dari 1.000 ha pada APL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.25:

Tabel III. 25 Luas Deforestasi pada APL lebih dari 1.000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Timur	4.794,3
2	Kalimantan Utara	3.390,4
3	Kalimantan Barat	2.716,8
4	Aceh	2.532,6
5	Sumatera Utara	2.339,4
6	Nusa Tenggara Timur	2.288,8
7	Sulawesi Tengah	2.270,1
8	Kalimantan Tengah	1.726,2
9	Papua	1.609,4
10	Nusa Tenggara Barat	1.580,8
11	Riau	1.357,1

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran 100,0–1000,0 ha pada APL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.26:

Tabel III. 26 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran 100,0–1000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sumatera Barat	956,1
2	Sulawesi Tenggara	916,6
3	Sumatera Selatan	540,5
4	Kepulauan Bangka Belitung	531,3
5	Jambi	372,3
6	Maluku Utara	346,9
7	Papua Barat	334,0
8	Bengkulu	330,0
9	Kepulauan Riau	298,1
10	Sulawesi Selatan	239,3
11	Jawa Barat	127,9

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran kurang dari 100,0 ha pada APL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.27:

Tabel III. 27 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran kurang dari 100,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sulawesi Utara	89,4
2	Gorontalo	83,2
3	Sulawesi Barat	75,9
4	Lampung	66,1
5	Maluku	50,5
6	Jawa Timur	50,4
7	Bali	2,0

- Provinsi yang tidak mengalami deforestasi di APL adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.
- Provinsi dengan Deforestasi angka negatif yaitu Provinsi Banten (-27,4 ha), Provinsi Kalimantan Selatan (-501,5 ha) dan Provinsi Jawa Tengah (-585,1 ha). Kondisi ini mengindikasikan bahwa reforestasi lebih besar dari pada deforestasi bruto dalam APL.

Keberadaan hutan primer pada APL memerlukan kecermatan dalam pengelolaannya terutama dalam hal pemanfaatannya, karena merupakan aset yang penting sebagai sistem penyangga kehidupan di tengah maraknya penebangan di dalam kawasan hutan. Areal ini juga dapat dicadangkan sebagai kawasan hutan negara sebagai alternatif pengganti peran fungsi hutan dari kawasan hutan yang telah terdegradasi.

BAB IV

SEBARAN DAN PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA

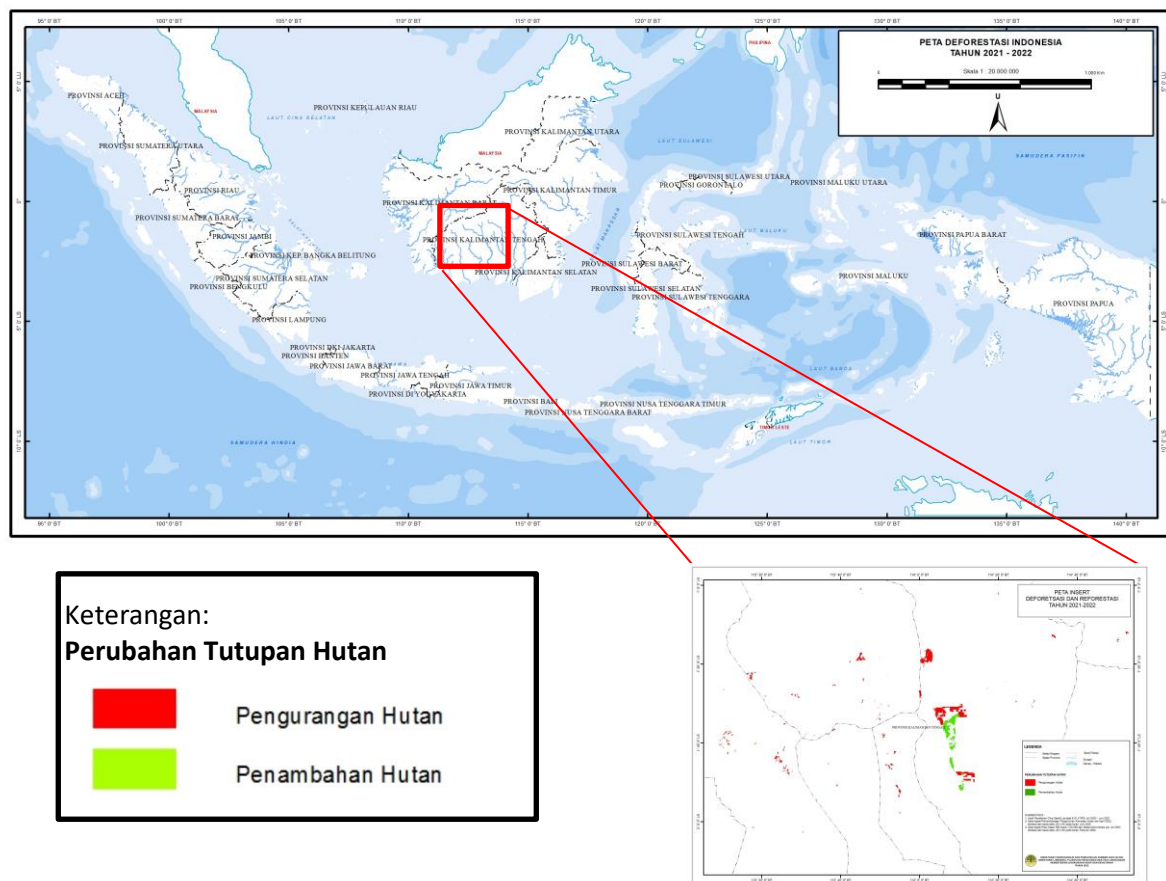


BAB IV

SEBARAN DAN PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA

A. Sebaran Deforestasi Indonesia

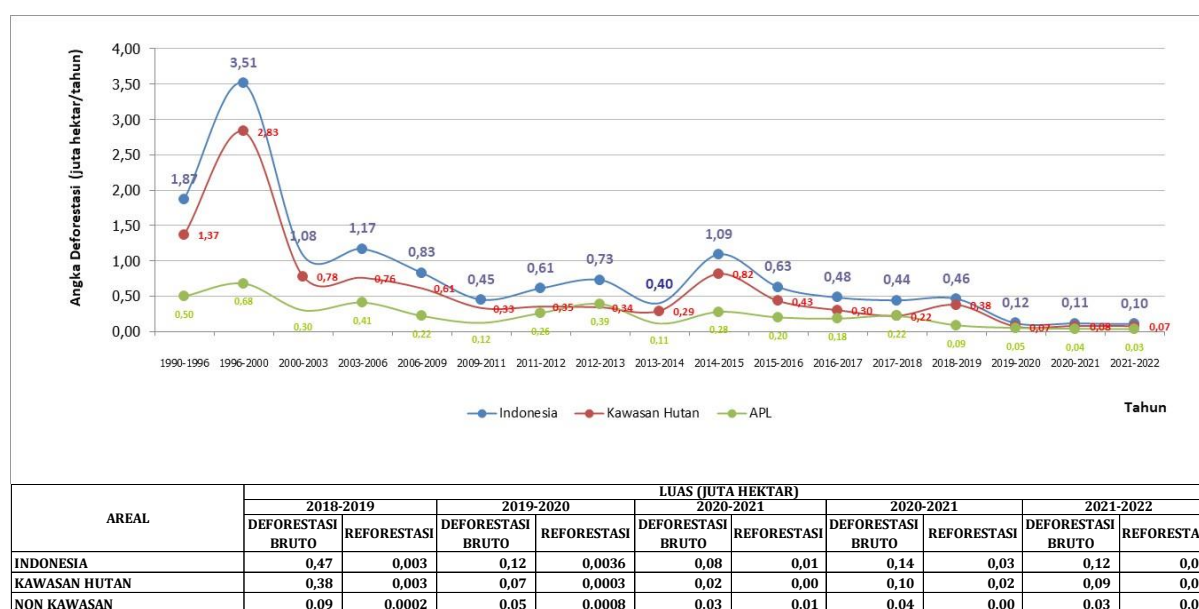
Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2021 dan 2022 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebagaimana disajikan pada Gambar 21. Peta tersebut menyajikan sebaran perubahan tutupan hutan meliputi pengurangan maupun penambahan hutan mencakup tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman. Pengurangan hutan menampilkan kejadian Deforestasi Bruto sementara penambahan hutan menampilkan kejadian Reforestasi. Peta Deforestasi per provinsi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022 disajikan selengkapnya pada Lampiran 3.



Gambar 21. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022

B. Perkembangan Deforestasi Indonesia

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatan hanya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020-2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2020-2021 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia netto tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami penurunan sebesar 14,1 %. Hutan tanaman pada periode ini cenderung mengalami reforestasi yang lebih besar dari pada deforestasi bruto. Deforestasi bruto pada hutan primer mengalami kenaikan sedangkan pada hutan sekunder juga mengalami penurunan dari periode 2020-2021. Kenaikan deforestasi pada hutan primer sebesar 7,7 ribu ha menjadi 11,3 ribu ha. Penurunan pada hutan sekunder sebesar 129,3 ribu ha menjadi 106,4 ribu ha. Perkembangan angka deforestasi tahun 1990 hingga 2022 dapat dilihat di gambar 22.



Gambar 22. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2022

Pemerintah merencanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup segala bidang kehidupan, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Sesuai dengan lingkup Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, perencanaan pembangunan di bidang kehutanan tidak hanya dilakukan pada

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetapi juga di luar kawasan hutan, atau APL. Perencanaan pembangunan di dalam kawasan hutan difokuskan pada pemanfaatan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan perencanaan pembangunan di luar kawasan hutan difokuskan pada perhutanan sosial. Perencanaan pembangunan selain pada bidang kehutanan juga dilakukan oleh berbagai bidang lain, yang masing-masing memiliki kebutuhan pemanfaatan lahan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, adanya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimungkinkan demi tercapainya target-target pembangunan tersebut.

Segala aktivitas pembangunan tersebut dapat mempengaruhi perubahan penutupan hutan dan lahan baik yang menyebabkan pertambahan areal penutupan hutan maupun pengurangan areal penutupan hutan. Perubahan penutupan hutan selain dipengaruhi oleh aktivitas yang terencana sebagaimana di atas terdapat juga faktor yang tidak terencana, salah satunya adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perubahan tersebut berbeda setiap tahunnya yang secara periodik dapat diamati dan dimonitor dalam bentuk kecenderungan (*trend*). Pemahaman terhadap *trend* ini merupakan informasi yang sangat berguna dalam urusan pengawasan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.

Kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan merupakan dinamika yang terjadi di kawasan hutan. Dinamika tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan (tidak berhutan), atau bahkan sebaliknya. Untuk menjaga agar dinamika perubahan tersebut dapat tetap terkendali, maka kebijakan integratif yang dipayungi dengan *Indonesia FOLU NetSink 2030* menjadi bernilai strategis. Hal ini karena kebijakan tersebut akan menjamin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konsisten menerapkan program-program yang saling mendukung, termasuk program untuk merehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan di dalam kawasan hutan.

Apabila kita memperhatikan besaran perhitungan deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya *corrective action* yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Deforestasi Indonesia tidak lengkap apabila tidak disajikan dalam informasi yang mencakup **di dalam** dan **diluar kawasan hutan**. Di dalam kawasan hutan mencakup yang terjadi di hutan produksi, baik **hutan produksi tetap (HP)**, **hutan produksi terbatas (HPT)** maupun **hutan produksi konversi (HPK)**, kemudian **hutan lindung (HL)** serta **hutan konservasi (HK)**. Di luar kawasan disajikan dalam **Areal Penggunaan Lain (APL)**.
2. Penyajian dalam informasi deforestasi bruto baik di hutan alam maupun hutan tanaman, deforestasi netto dan reforestasi, ditujukan agar memudahkan para **pengguna yang membutuhkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya**, misalnya untuk implementasi REDD+ (hanya untuk hutan alam), ataupun untuk pelaporan GRK (secara keseluruhan tanpa memperdulikan hutan alam maupun hutan tanaman).
3. **Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022** sebesar **104,0 ribu ha** (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut sama nilainya dengan deforestasi bruto sebesar **119,4 ribu ha** dikurangi reforestasi sebesar **15,4 ribu ha**. Deforestasi Netto di dalam **kawasan hutan sebesar 73,1 ribu ha (70,3%)**, sedangkan di **luar kawasan hutan (APL) sebesar 30,9 ribu ha (29,7%)**. Berdasarkan tipe hutan, deforestasi Netto tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106,4 ribu ha (89,1%), di mana 70,9% atau 75,4 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 31,0 ribu ha atau 29,1% berada di luar kawasan hutan.
4. **Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia tahun 2021-2022** sebesar **116,5 ribu ha** (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut berasal dari Deforestasi Bruto Hutan Alam sebesar **117,7 ribu ha** dikurangi dengan Reforestasi Hutan Alam sebesar **1,2 ribu ha**. Deforestasi Netto Hutan Alam di **dalam kawasan hutan sebesar 85,1 ribu ha (73,1%)**, sedangkan di **luar kawasan hutan (APL) seluas 31,4 ribu ha (26,9%)**. Berdasarkan tipe hutan, Deforestasi Netto Hutan Alam di hutan sekunder lebih tinggi dibandingkan di hutan primer yaitu seluas 105,2 ribu ha.
5. Berdasarkan tipe hutan, **deforestasi bruto** tertinggi terjadi pada tipe hutan sekunder yaitu 106,4 ribu ha, **reforestasi** tertinggi terjadi pada tipe hutan tanaman juga yaitu 14,2 ribu ha dan **deforestasi netto** tertinggi terjadi pada hutan sekunder yaitu 105,2 ribu ha.
6. **Deforestasi Netto** per fungsi kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 8,8 ribu ha (8,5%); HL sebesar 16,7 ribu ha (16,1%); Hutan Produksi sebesar 47,6 ribu ha (45,7%) yang terdiri atas : HPT sebesar 19,1 ribu ha (18,4 %); HP sebesar 21,2 ribu

ha (20,4%); HPK sebesar 7,3 ribu ha (7,0%). Deforestasi Netto di luar kawasan hutan atau APL sebesar 30,9 ribu ha (29,7%).

7. **Deforestasi Netto Hutan Alam** di dalam kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 8,8 ribu ha (7,6%); HL sebesar 16,7 ribu ha (14,3%); Hutan Produksi sebesar 59,6 ribu ha (51,1%) yang terdiri atas : HPT sebesar 19,2 ribu ha (16,5 %); HP sebesar 33,8 ribu ha (29,0%); HPK sebesar 6,6 ribu ha (5,6%). Deforestasi Netto Hutan Alam di luar kawasan hutan atau APL sebesar 31,4 ribu ha (26,9%).
8. Berdasarkan pulau/kepulauan besar, **Deforestasi Netto** tertinggi berturut-turut terjadi di Pulau Sumatera sebesar 39,9 ribu ha (38,4%), Kalimantan sebesar 33,3 ribu ha (32,0%), dan Pulau Sulawesi sebesar 11,6 ribu ha (11,1%).
9. Berdasarkan provinsi, **Deforestasi Netto** tertinggi pada fungsi HK adalah provinsi Jambi (3,1 ribu ha) sementara pada fungsi HL adalah Sumatera Barat (2,2 ribu ha). Deforestasi tertinggi pada fungsi Hutan Produksi terdiri atas Provinsi Kalimantan Barat (2,7 ribu) untuk fungsi HPT, Provinsi Kalimantan Tengah (6,4 ribu ha) untuk fungsi HP, dan Provinsi Kalimantan Tengah (2,2 ribu ha) untuk fungsi HPK.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu analisis yang lebih mendalam terhadap lokasi-lokasi yang memiliki deforestasi tinggi untuk mengidentifikasi perubahan penutupan lahan secara spesifik meliputi gambaran kondisi yang terjadi serta faktor utama yang diduga berpengaruh.
2. Pemutakhiran data penutupan lahan dan kawasan hutan yang dilanjutkan dengan rekalkulasi dan penghitungan deforestasi sumberdaya hutan perlu terus dilakukan secara periodik setiap tahun agar kondisi sumberdaya hutan dapat terpantau dengan baik.
3. Diseminasi data dan informasi terkait deforestasi perlu diselenggarakan secara maksimal sehingga data dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, data dan informasi ini dapat sesegera mungkin digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan yang kuat dalam kegiatan tata kelola kehutanan serta penentuan kebijakan strategis lainnya.
4. Penyempurnaan data dan informasi hasil penghitungan deforestasi pada kawasan hutan perlu didukung oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah sebagai pemangku kawasan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai Unit Pelaksana Teknis, eselon I terkait sebagai penentu kebijakan, hingga para pihak sebagai pengguna data.
5. Monitoring terhadap identifikasi terjadinya pelanggaran yang menyebabkan perubahan penutupan hutan menjadi tidak berhutan yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha pemegang izin ataupun pihak lain yang secara ilegal melakukan kegiatan pembukaan hutan sehingga dapat menjadi masukan untuk upaya penegakan hukum.

6. Perlu komunikasi dan integrasi data tentang perubahan kawasan hutan baik perubahan fungsi kawasan maupun perubahan status dan peruntukan kawasan pada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan.
7. Pemetaan areal deforestasi yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam penentuan lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini dapat meningkat.
8. Pemetaan areal deforestasi yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam penyelesaian masalah kawasan hutan khususnya yang terkait dengan masalah tenurial.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

[BSN]. 2014. *Metode Penghitungan Perubahan Penutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik Secara Visual*. SNI.8033:2014. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

[FAO]. 1993. *Forest Resources Assessment 1990 (Tropical Countries)*. FAO Forestry Paper 112. Rome: Food Agriculture Organization of the United Nations.

[FAO]. 1996. *Forest Resources Assessment 1990 : Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change Processes*. FAO Forestry Paper 130. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[FAO]. 2002. *Forest Resources Assessment 2000 (Tropical Countries)*. FAO Forestry Paper 190. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Holmes, D., 2002. *Where Have All the Forests Gone?* Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper. DC: The World Bank.

Holmes, D. 2000. *Deforestation in Indonesia. A Review of the situation in 1999*. Washington DC: The World Bank.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[KLHK]. 2020. *Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[KLHK]. 2020. *Rekalkulasi Penutupan lahan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.1/VII/IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Lahan.

Petunjuk Teknis Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional

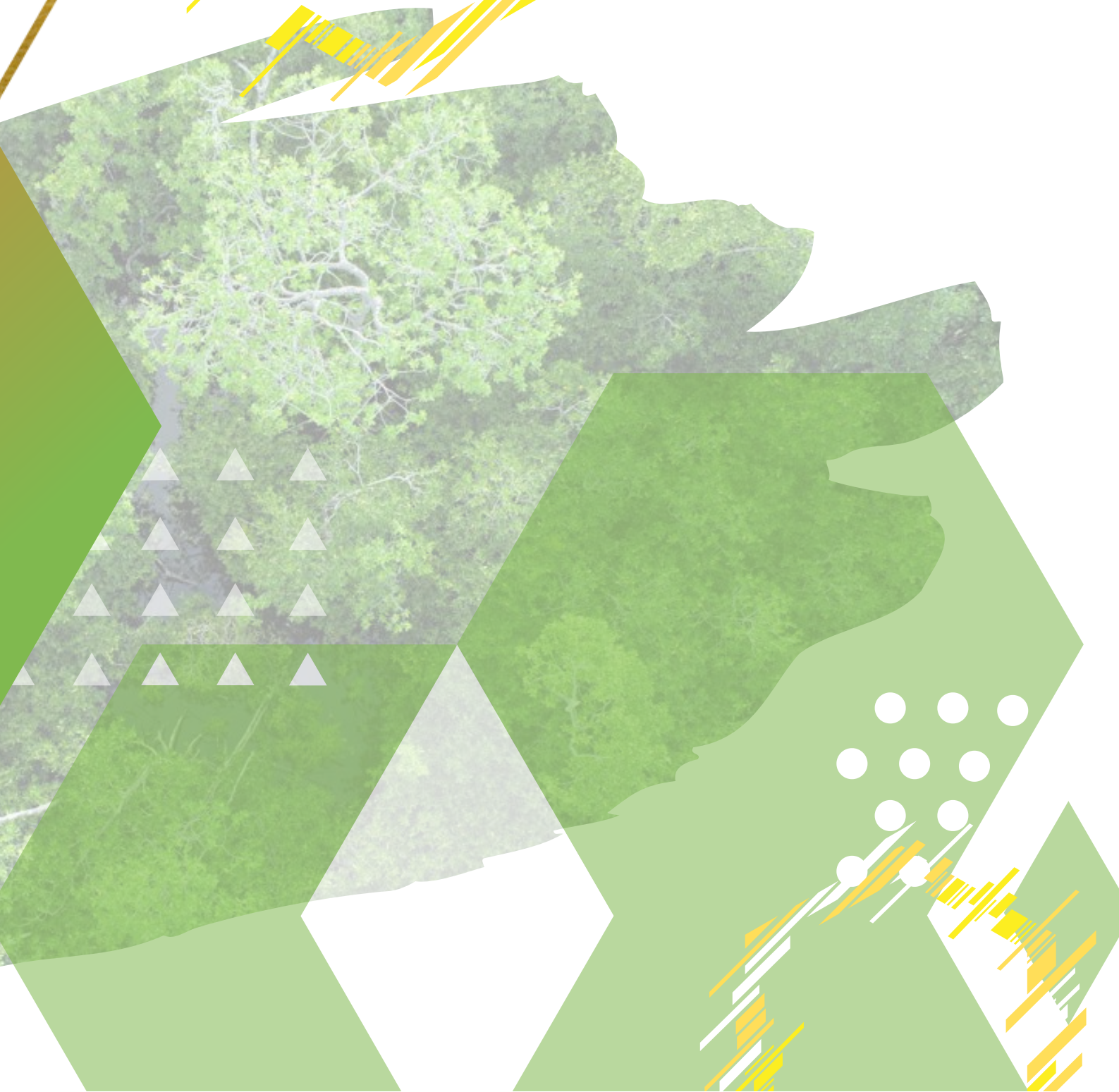
Revilla, J.A.V. 1993. *Preliminary Study on the Rate of Forest Cover Loss in Indonesia*. National Forest Inventory Project. Directorate General of Forest Inventory and Land Use Planning, Ministry of Forestry and Food and Agriculture Organization of the United Nations. Jakarta.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Deforestasi Bruto dan Reforestasi Indonesia Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022



TABEL 1.1 ANGKA DEFORESTASI BRUTO INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	3.514,5	2.828,5	2.703,9	634,7	9.681,5	372,6	10.054,1	1.233,3	11.287,4
	- Hutan lahan kering primer	3.335,0	2.815,6	2.041,2	570,9	8.762,7	105,2	8.867,9	1.076,4	9.944,3
	- Hutan rawa primer	169,5	-	662,7	17,3	849,4	267,4	1.116,8	72,9	1.189,7
	- Hutan mangrove primer	10,0	12,9	-	46,5	69,4	-	69,4	84,0	153,4
	B. Hutan Sekunder	5.325,6	13.869,2	16.643,0	33.247,0	69.084,7	6.297,0	75.381,8	31.008,2	106.390,0
	- Hutan lahan kering sekunder	4.807,3	10.393,7	15.164,8	22.527,8	52.893,5	4.216,2	57.109,7	21.962,8	79.072,5
	- Hutan rawa sekunder	368,5	294,5	1.142,9	9.904,2	11.710,0	1.977,4	13.687,4	7.099,6	20.787,1
	- Hutan mangrove sekunder	149,8	3.181,0	335,3	815,0	4.481,2	103,4	4.584,6	1.945,8	6.530,4
	C. Hutan Tanaman	-	6,4	41,5	687,2	735,1	727,5	1.462,5	309,3	1.771,8
	TOTAL	8.840,0	16.704,0	19.388,3	34.568,9	79.501,3	7.397,0	86.898,4	32.550,8	119.449,1

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan , Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pmutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL 1.2 ANGKA REFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ REFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	112,9	121,3	234,2	100,2	334,4	850,0	1.184,4
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	97,2	-	97,2	100,2	197,4	41,2	238,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	12,9	121,3	134,2	-	134,2	8,3	142,6
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	2,8	-	2,8	-	2,8	800,4	803,2
	C. Hutan Tanaman*	-	-	178,4	13.244,7	13.423,1	10,5	13.433,6	798,2	14.231,8
	TOTAL	-	-	291,3	13.366,0	13.657,3	110,7	13.768,0	1.648,2	15.416,2

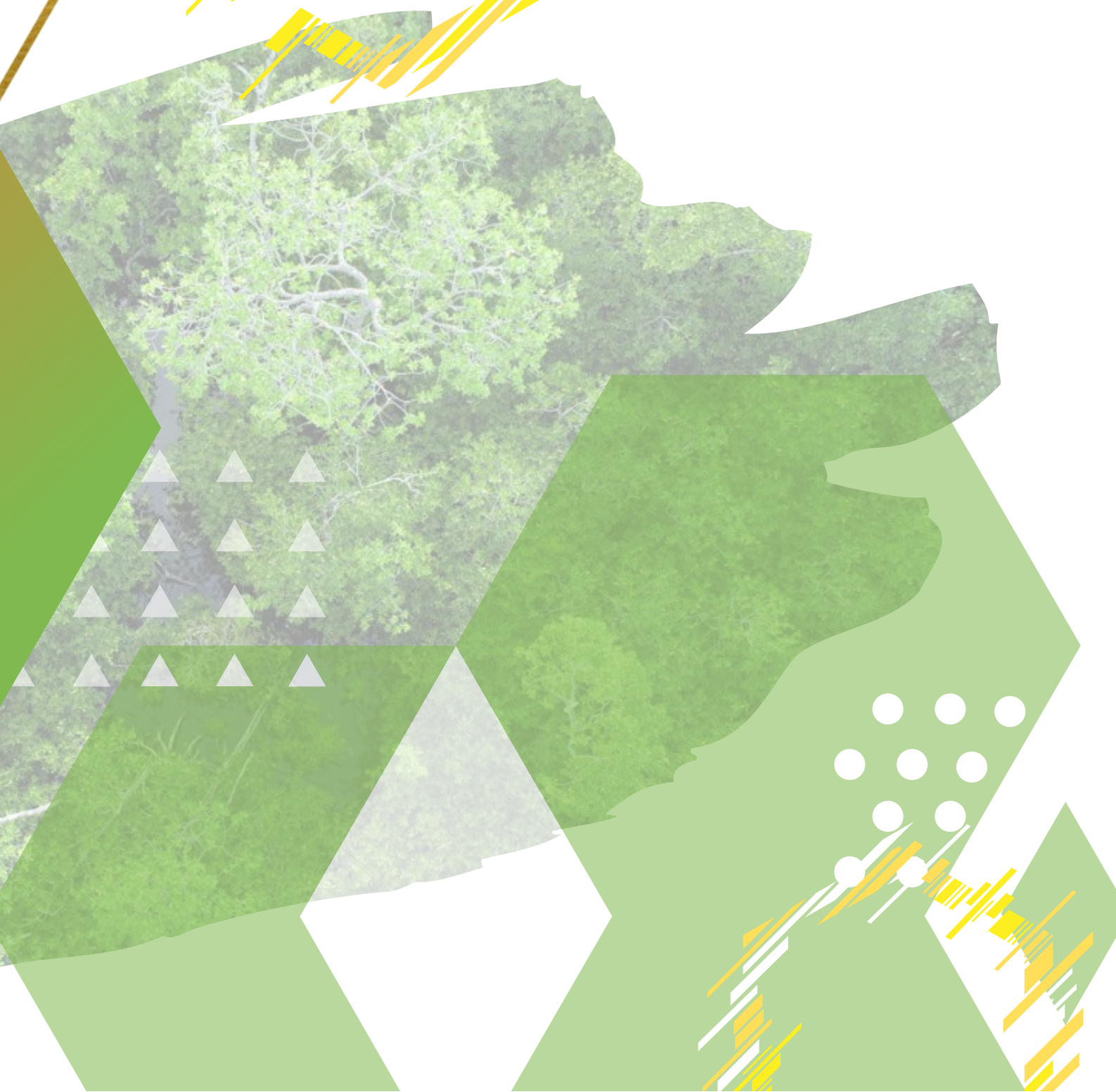
Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk reforestasi adalah bertambahnya tanaman hasil reforestasi baik di dalam maupun di luar Konsesi Hutan Tanaman Industri.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAMPIRAN 2

Deforestasi Indonesia dan Deforestasi Per Pulau Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022



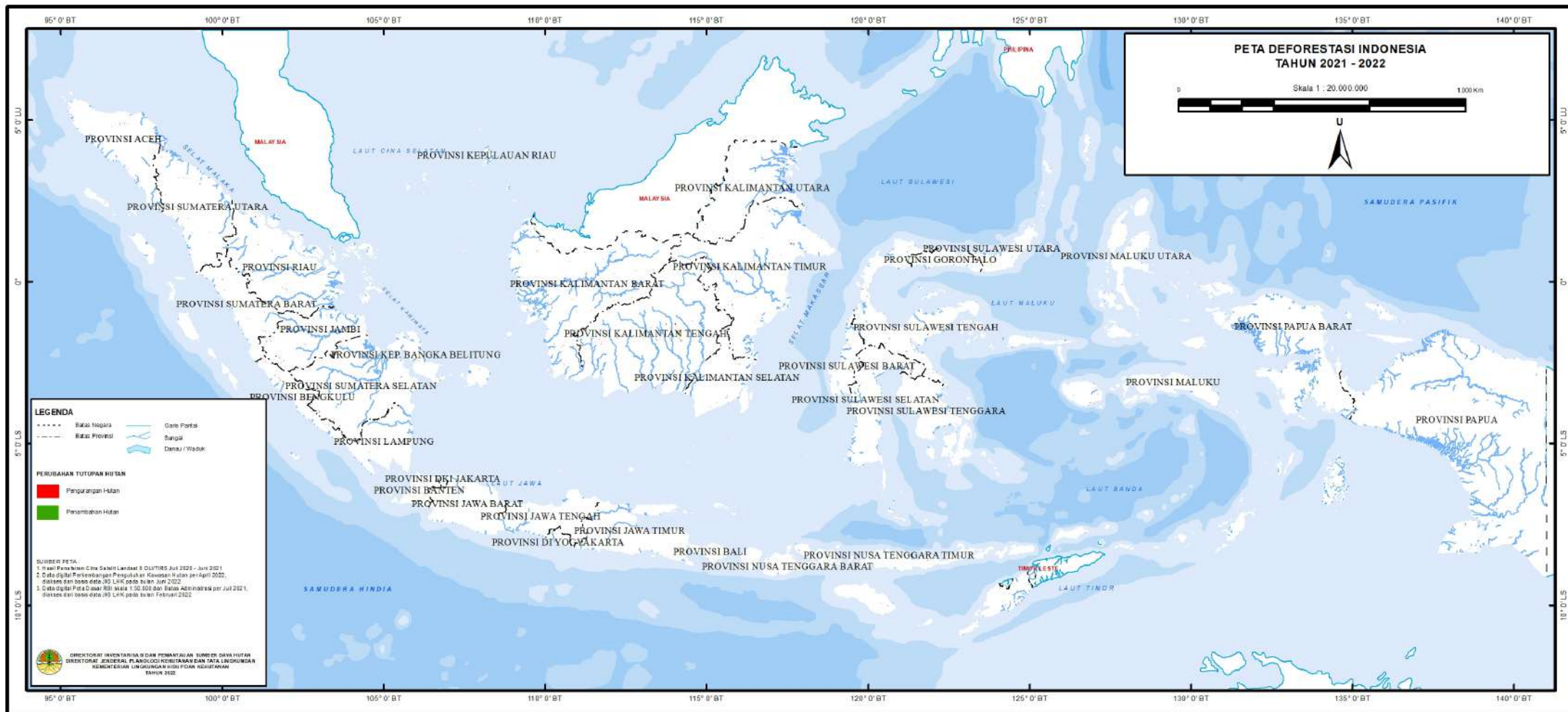
TABEL 2.1 ANGKA DEFORESTASI NETTO INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	3.514,5	2.828,5	2.703,9	634,7	9.681,5	372,6	10.054,1	1.233,3	11.287,4
	- Hutan lahan kering primer	3.335,0	2.815,6	2.041,2	570,9	8.762,7	105,2	8.867,9	1.076,4	9.944,3
	- Hutan rawa primer	169,5	-	662,7	17,3	849,4	267,4	1.116,8	72,9	1.189,7
	- Hutan mangrove primer	10,0	12,9	-	46,5	69,4	-	69,4	84,0	153,4
	B. Hutan Sekunder	5.325,6	13.869,2	16.530,1	33.125,7	68.850,6	6.196,8	75.047,3	30.158,3	105.205,6
	- Hutan lahan kering sekunder	4.807,3	10.393,7	15.067,6	22.527,8	52.796,4	4.116,0	56.912,4	21.921,6	78.834,0
	- Hutan rawa sekunder	368,5	294,5	1.129,9	9.782,9	11.575,8	1.977,4	13.553,2	7.091,3	20.644,5
	- Hutan mangrove sekunder	149,8	3.181,0	332,5	815,0	4.478,4	103,4	4.581,8	1.145,4	5.727,2
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	- 136,9	- 12.557,5	- 12.688,0	716,9	- 11.971,1	- 489,0	- 12.460,0
	TOTAL	8.840,0	16.704,0	19.097,0	21.202,9	65.844,0	7.286,3	73.130,4	30.902,6	104.032,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

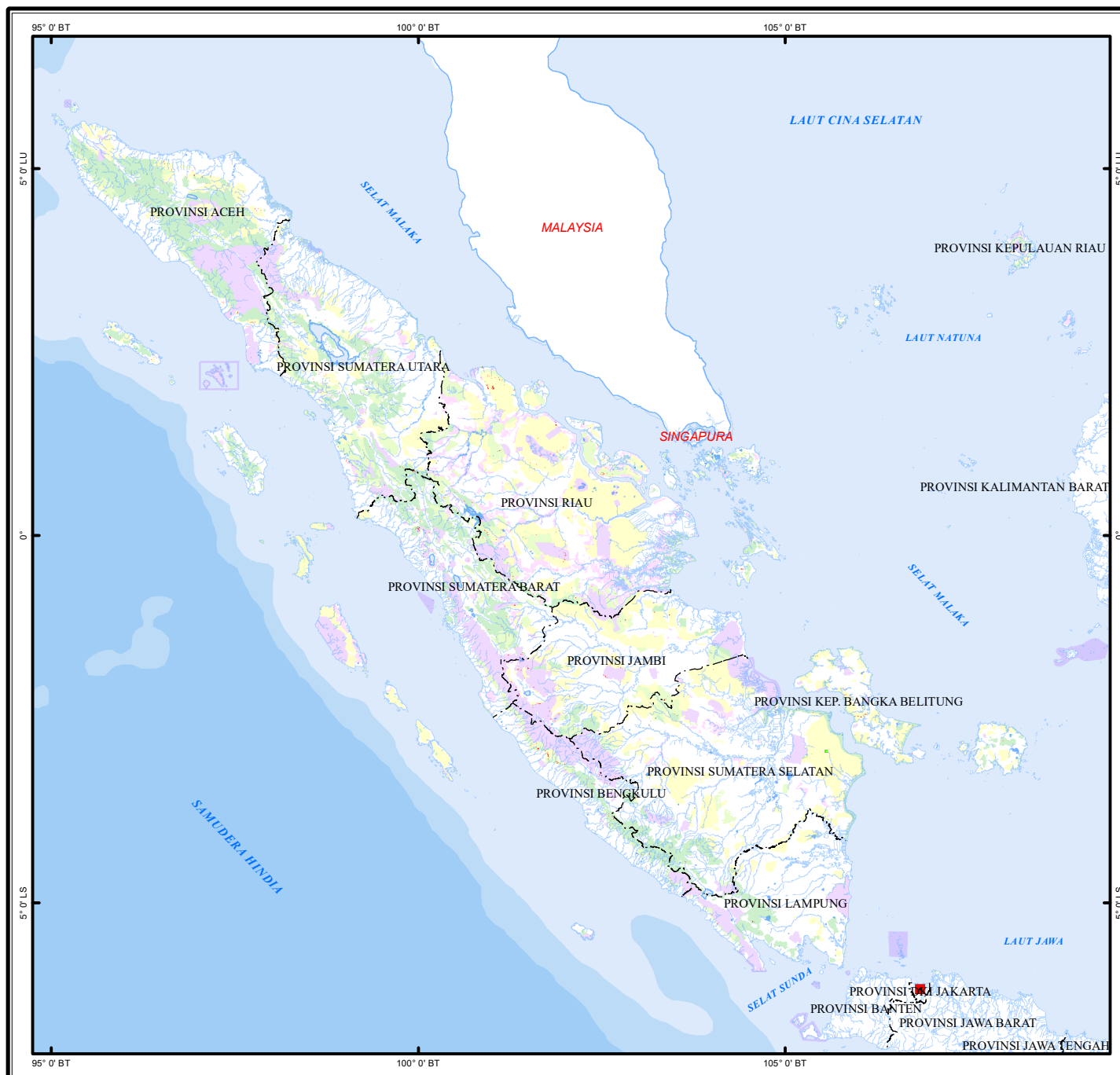


TABEL 2.2 ANGKA DEFORESTASI PULAU SUMATERA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU SUMATERA									
	A. Hutan Primer	3.251,1	2.182,3	483,9	435,5	6.352,8	-	6.352,8	450,7	6.803,4
	- Hutan lahan kering primer	3.072,4	2.169,4	483,9	389,7	6.115,3	-	6.115,3	331,3	6.446,6
	- Hutan rawa primer	169,5	-	-	11,8	181,3	-	181,3	71,9	253,2
	- Hutan mangrove primer	9,3	12,9	-	34,0	56,1	-	56,1	47,5	103,6
	B. Hutan Sekunder	4.529,0	7.341,1	6.724,0	8.189,6	26.783,7	894,3	27.678,0	8.943,5	36.621,4
	- Hutan lahan kering sekunder	4.103,1	5.708,2	5.457,6	3.803,8	19.072,7	366,3	19.439,0	6.305,6	25.744,5
	- Hutan rawa sekunder	345,2	210,2	955,2	3.912,6	5.423,2	459,2	5.882,4	1.711,0	7.593,4
	- Hutan mangrove sekunder	80,7	1.422,7	311,2	473,1	2.287,8	68,8	2.356,6	926,9	3.283,5
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-58,3	-3.395,7	-3.454,1	-	-3.454,1	-70,6	-3.524,7
	TOTAL	7.780,1	9.523,4	7.149,5	5.229,4	29.682,4	894,3	30.576,7	9.323,5	39.900,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PULAU SUMATERA

Skala 1: 9.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

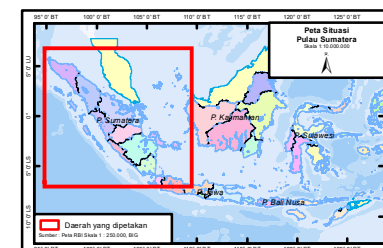
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



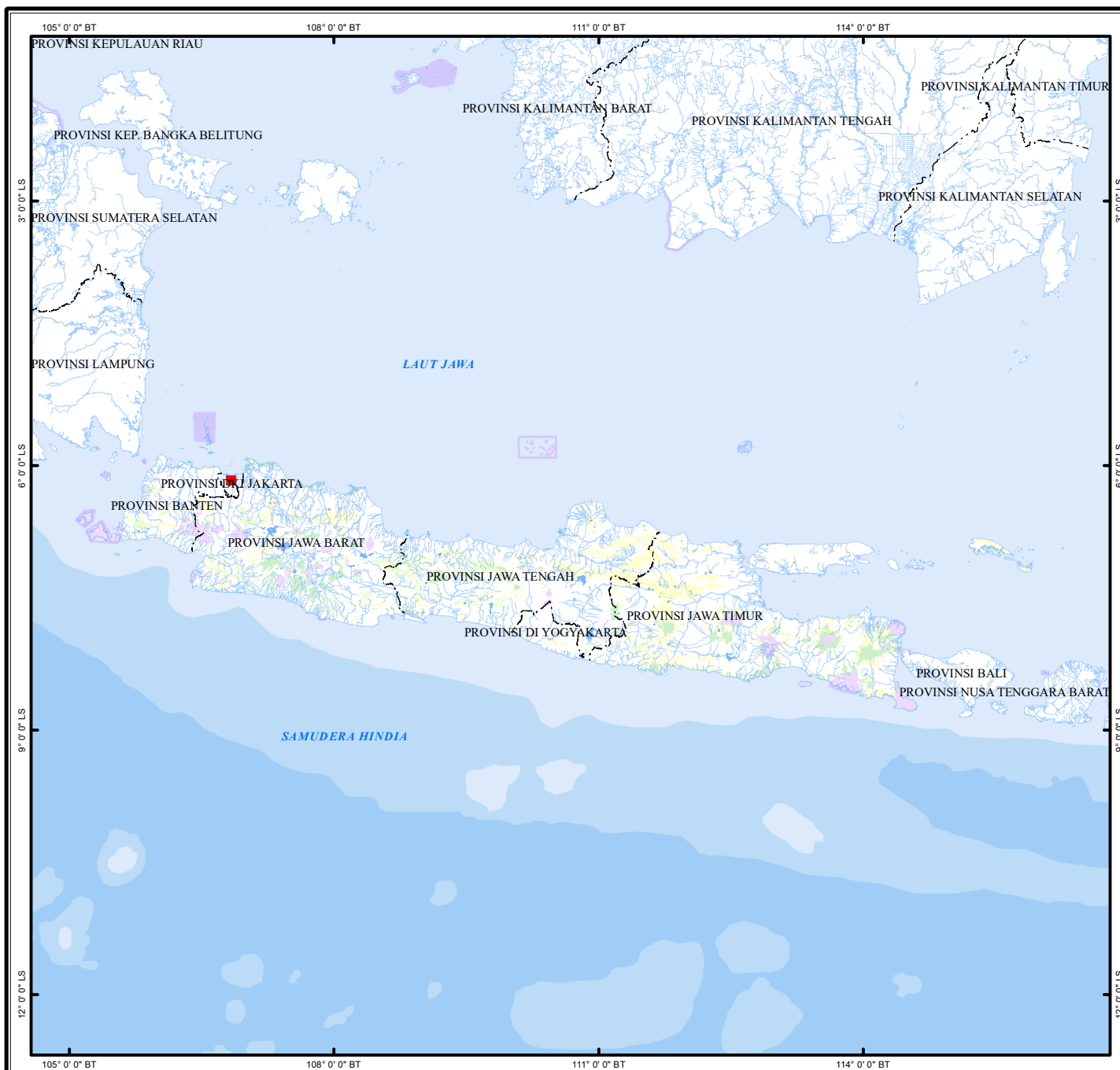
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN**
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 2.3 ANGKA DEFORESTASI PULAU JAWA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU JAWA									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	19,2	93,6	97,2	24,4	234,4	-	234,4	-565,9	-331,6
	- Hutan lahan kering sekunder	19,2	74,2	97,2	6,0	196,6	-	196,6	44,9	241,5
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,4	-	18,3	37,8	-	37,8	-610,8	-573,1
	C. Hutan Tanaman*	-	-	27,1	86,6	113,7	-	113,7	131,7	245,3
	TOTAL	19,2	93,6	124,3	110,9	348,0	-	348,0	-434,3	-86,2

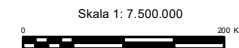
Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PULAU JAWA
Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

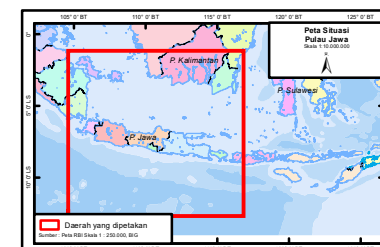
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



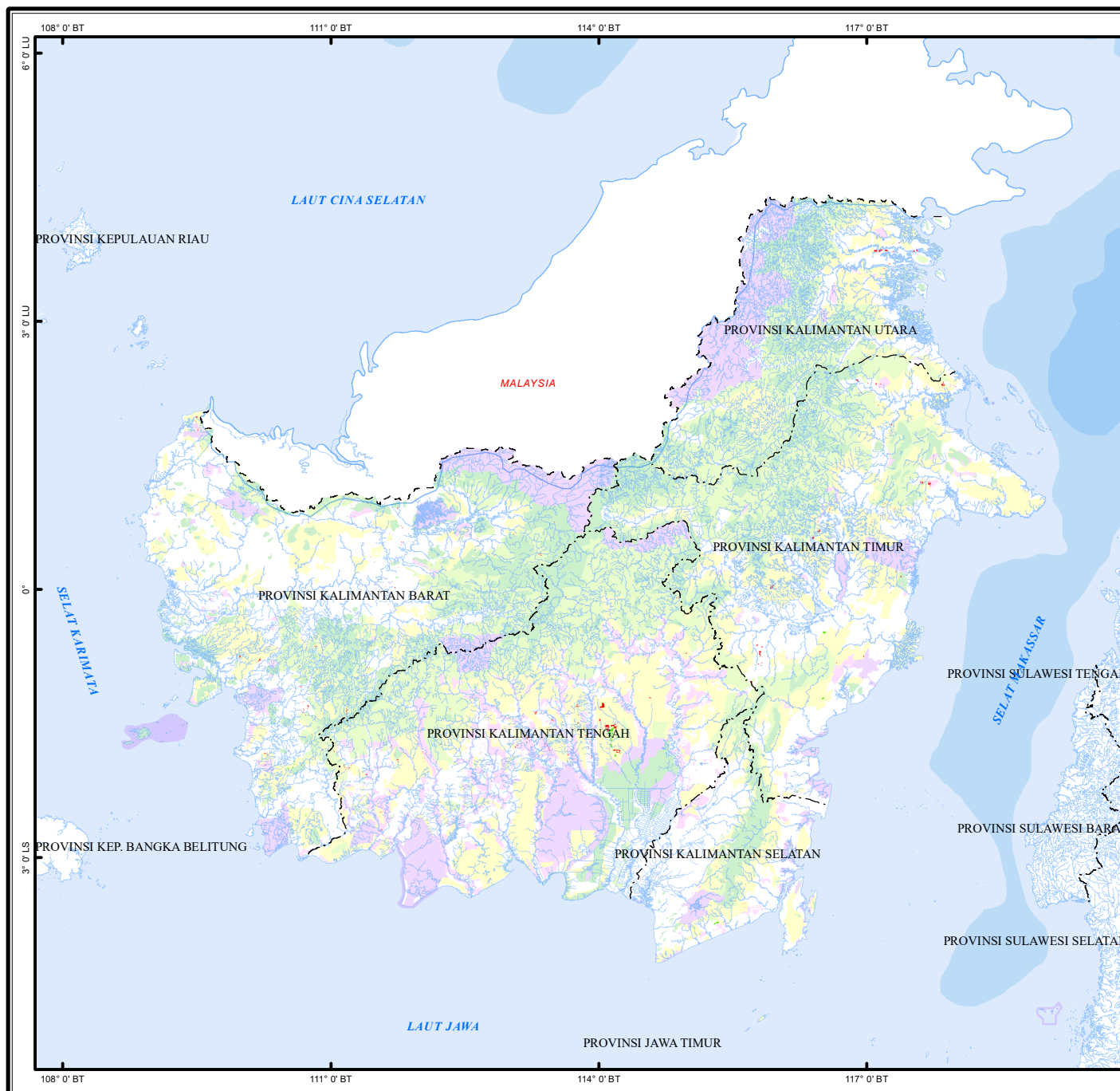
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 2.4 ANGKA DEFORESTASI PULAU KALIMANTAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU KALIMANTAN									
	A. Hutan Primer	22,5	124,0	788,5	14,2	949,2	-	949,2	71,8	1.021,0
	- Hutan lahan kering primer	22,5	124,0	788,5	8,7	943,8	-	943,8	65,7	1.009,4
	- Hutan rawa primer	-	-	-	5,4	5,4	-	5,4	-	5,4
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1
	B. Hutan Sekunder	136,4	1.262,8	4.713,5	18.895,3	25.008,0	2.671,3	27.679,3	12.618,8	40.298,1
	- Hutan lahan kering sekunder	59,5	1.185,8	4.692,0	14.250,1	20.187,4	1.179,4	21.366,8	7.214,9	28.581,7
	- Hutan rawa sekunder	23,3	21,8	11,4	4.397,0	4.453,4	1.472,0	5.925,4	5.175,3	11.100,6
	- Hutan mangrove sekunder	53,6	55,2	10,1	248,3	367,1	20,0	387,1	228,7	615,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-120,1	-8.058,2	-8.178,3	727,4	-7.450,8	-564,3	-8.015,1
	TOTAL	158,9	1.386,8	5.381,9	10.851,3	17.778,9	3.398,7	21.177,6	12.126,3	33.304,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PULAU KALIMANTAN

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

--- Batas Negara

--- Batas Provinsi

~ Sungai

~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

Pengurangan Hutan

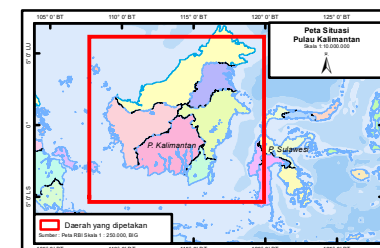
Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

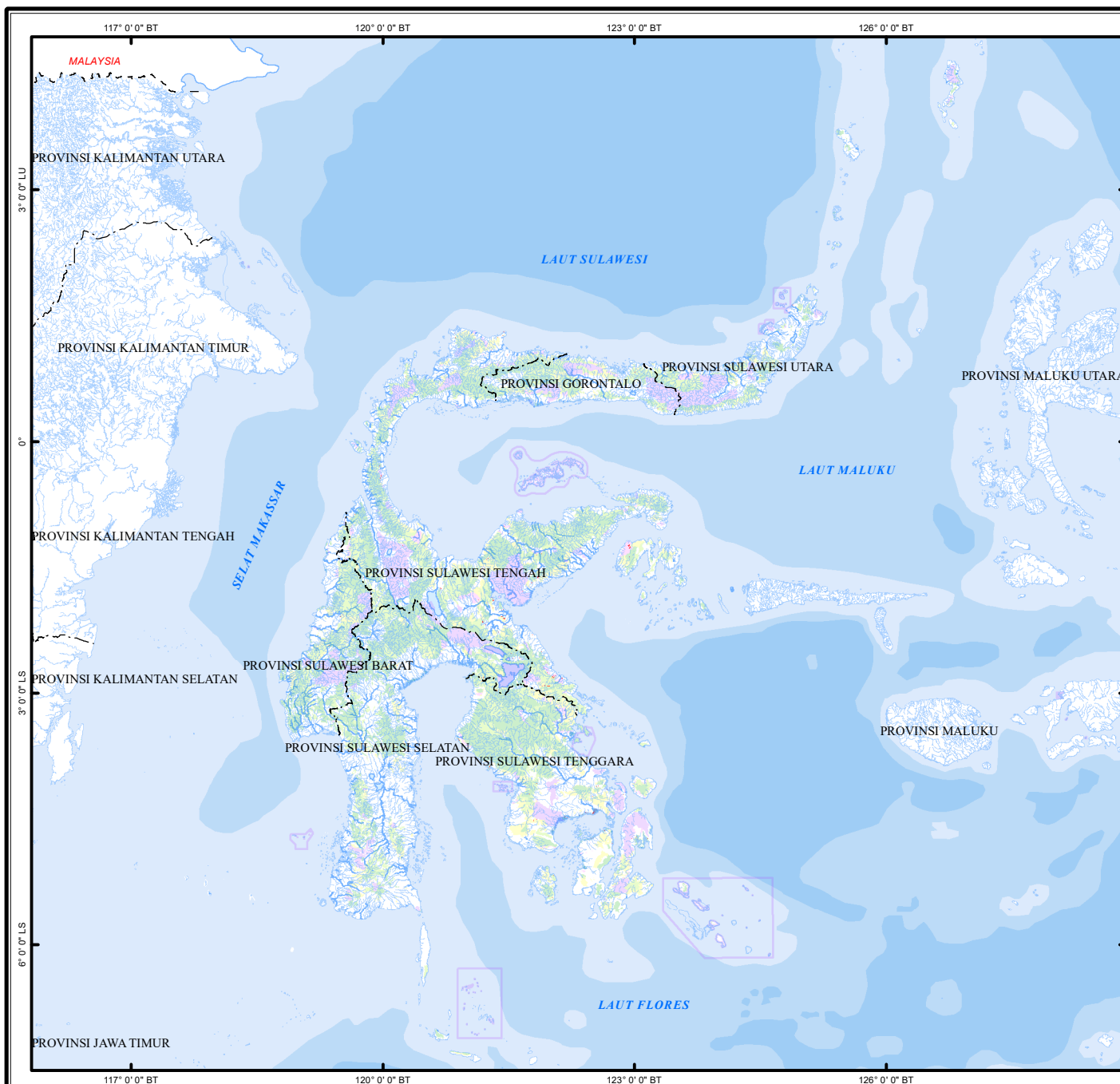
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 2.5 ANGKA DEFORESTASI PULAU SULAWESI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU SULAWESI									
	A. Hutan Primer	38,6	194,5	599,4	74,7	907,2	88,5	995,7	116,3	1.112,0
	- Hutan lahan kering primer	38,6	194,5	599,4	74,7	907,2	88,5	995,7	116,3	1.112,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	155,0	2.500,2	2.337,4	940,8	5.933,4	976,3	6.909,7	3.558,3	10.468,0
	- Hutan lahan kering sekunder	155,0	819,5	2.337,4	931,2	4.243,1	976,3	5.219,4	3.050,8	8.270,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	9,6	9,6	-	9,6	-	9,6
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.680,6	-	-	1.680,6	-	1.680,6	507,5	2.188,2
	C. Hutan Tanaman*	-	-	5,9	-	5,9	0,0	5,9	0,0	5,9
	TOTAL	193,5	2.694,7	2.942,7	1.015,5	6.846,5	1.064,8	7.911,3	3.674,6	11.585,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

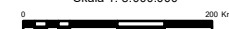
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PULAU SULAWESI

Skala 1: 8.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

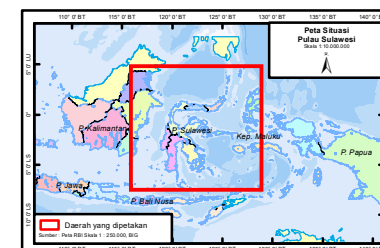
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

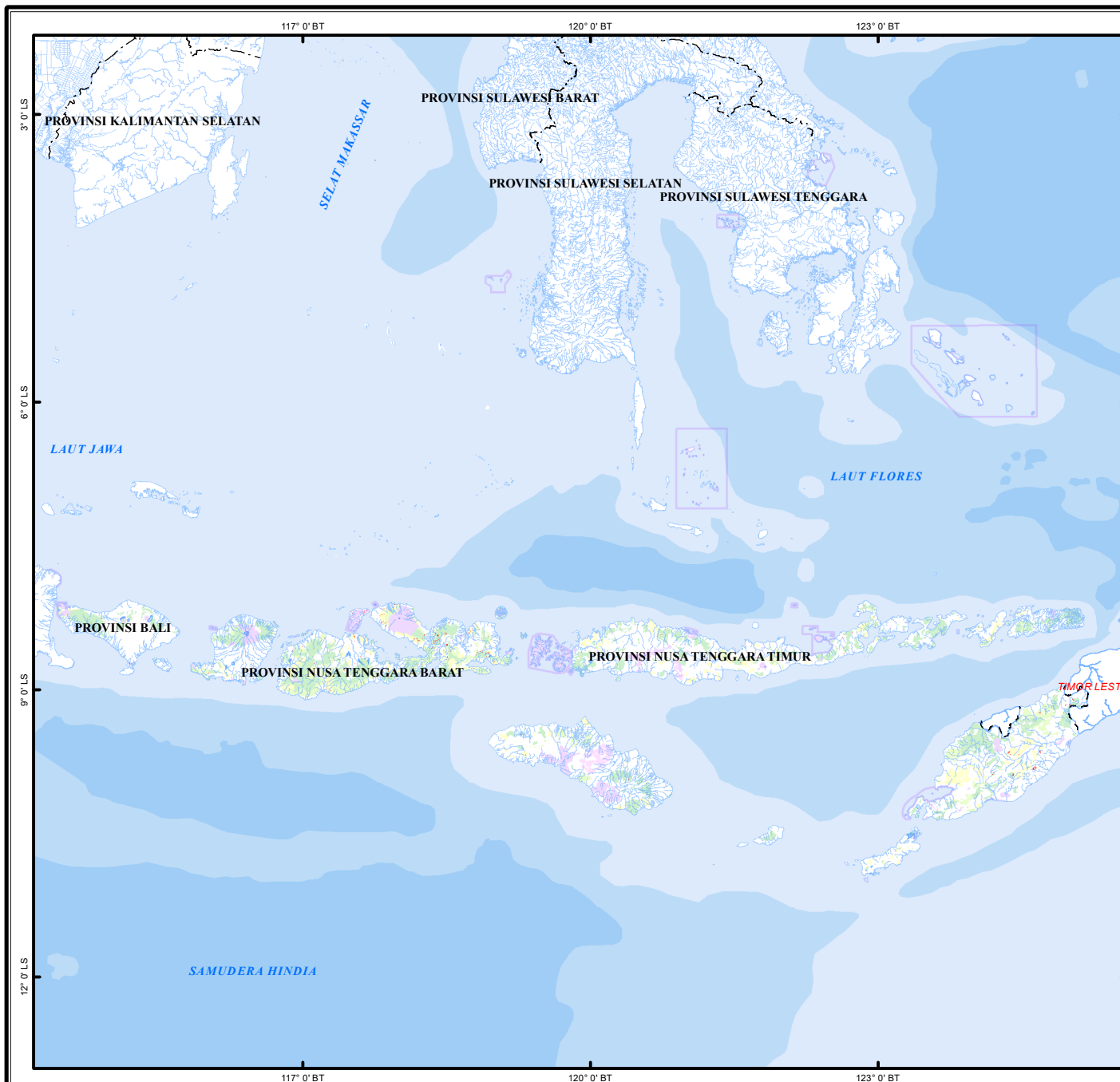
TABEL 2.6 ANGKA DEFORESTASI KEP. BALI DAN NUSA TENGGARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEP. BALI DAN NUSA TENGGARA									
	A. Hutan Primer	37,2	264,7	78,3	96,7	477,0	-	477,0	223,3	700,3
	- Hutan lahan kering primer	36,5	264,7	78,3	96,7	476,2	-	476,2	197,4	673,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	0,7	-	-	-	0,7	-	0,7	26,0	26,7
	B. Hutan Sekunder	378,7	2.287,3	1.731,0	1.634,8	6.031,8	-	6.031,8	3.633,9	9.665,7
	- Hutan lahan kering sekunder	378,7	2.287,3	1.720,0	1.634,8	6.020,8	-	6.020,8	3.549,5	9.570,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	11,0	-	11,0	-	11,0	84,4	95,5
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	8,6	13,9	28,8	-	28,8	14,3	43,0
	TOTAL	415,9	2.558,4	1.817,9	1.745,4	6.537,5	-	6.537,5	3.871,5	10.409,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA

Skala 1: 7.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

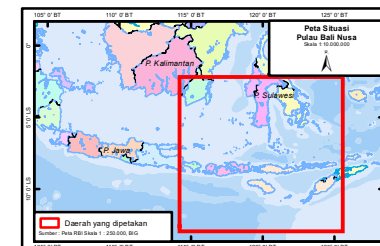
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

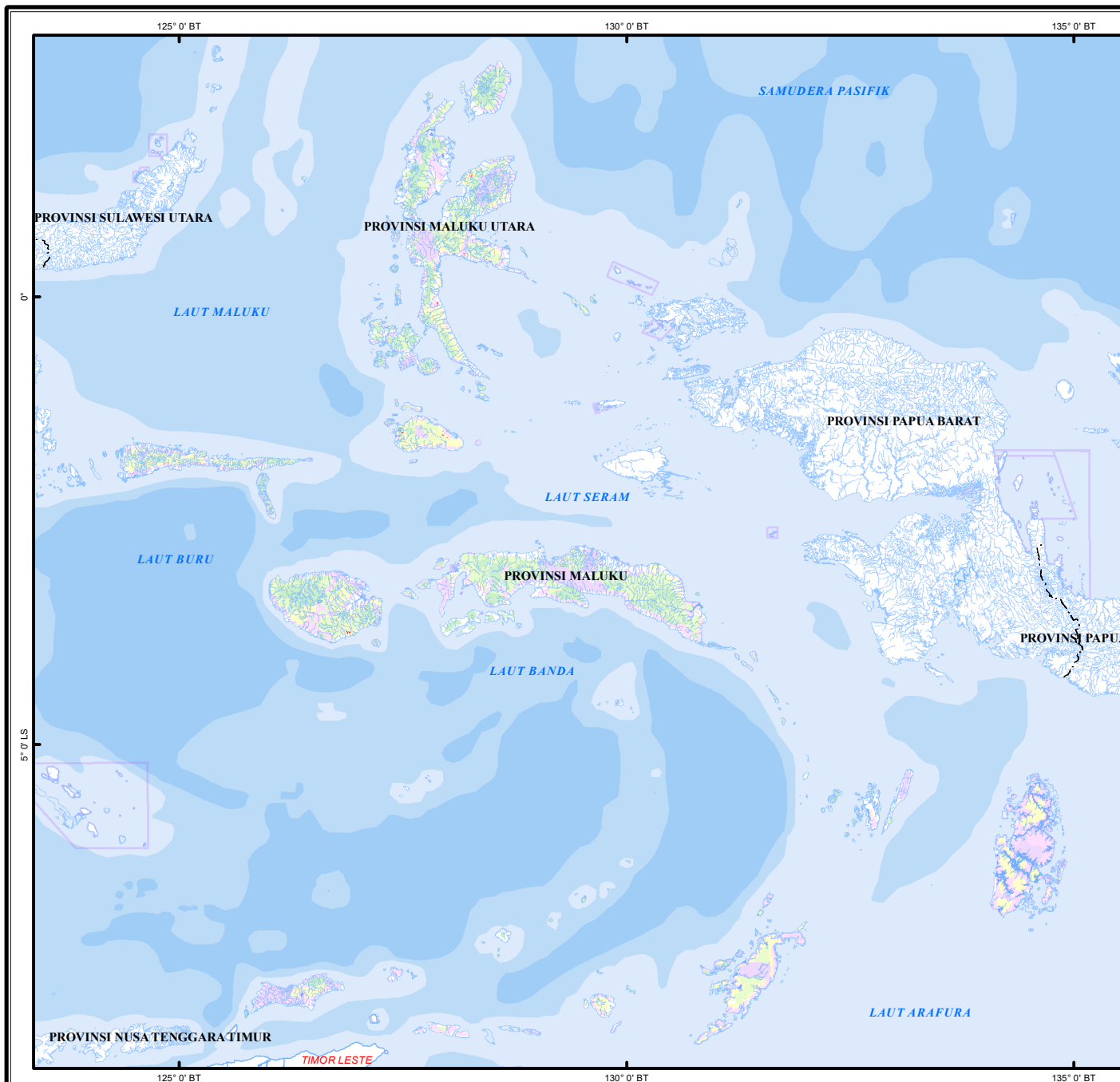
TABEL 2.7 ANGKA DEFORESTASI KEPULAUAN MALUKU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEPULAUAN MALUKU									
	A. Hutan Primer	14,8	39,7	56,6	1,1	112,2	1,9	114,1	4,4	118,5
	- Hutan lahan kering primer	14,8	39,7	56,6	1,1	112,2	1,9	114,1	-	114,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,4
	B. Hutan Sekunder	20,2	301,4	382,2	1.885,2	2.589,0	1.028,4	3.617,4	393,0	4.010,4
	- Hutan lahan kering sekunder	20,2	301,4	382,2	1.875,1	2.578,9	1.013,8	3.592,6	393,0	3.985,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	10,1	10,1	14,6	24,8	-	24,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	35,0	341,2	438,8	1.886,3	2.701,2	1.030,3	3.731,5	397,4	4.128,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

KEPULAUAN MALUKU

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

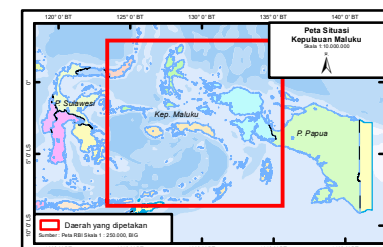
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

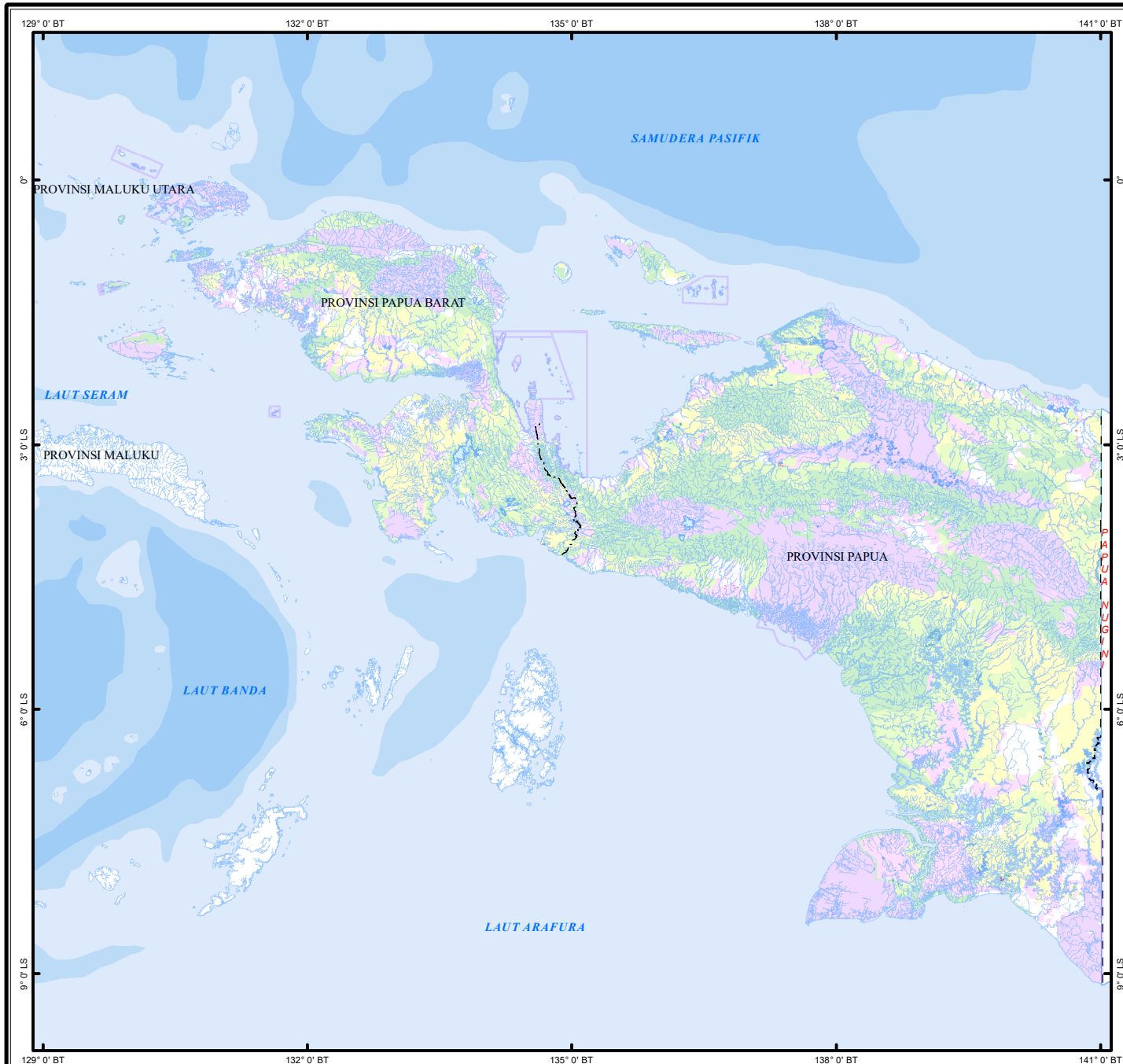
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 2.8 ANGKA DEFORESTASI PULAU PAPUA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU PAPUA									
	A. Hutan Primer	150,2	23,2	697,2	12,5	883,1	282,2	1.165,3	366,8	1.532,1
	- Hutan lahan kering primer	150,2	23,2	34,5	-	207,9	14,9	222,8	365,8	588,5
	- Hutan rawa primer	-	-	662,7	-	662,7	267,4	930,1	1,0	931,1
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	12,5	12,5	-	12,5	-	12,5
	B. Hutan Sekunder	87,3	82,8	544,7	1.555,6	2.270,4	626,4	2.896,9	1.576,7	4.473,5
	- Hutan lahan kering sekunder	71,7	17,3	381,2	26,7	496,9	580,2	1.077,2	1.363,0	2.440,1
	- Hutan rawa sekunder	-	62,5	163,4	1.463,7	1.689,6	46,2	1.735,8	205,0	1.940,8
	- Hutan mangrove sekunder	15,6	3,0	0,2	65,2	83,9	-	83,9	8,7	92,6
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-1.204,0	-1.204,0	-10,5	-1.214,5	-	-1.214,5
	TOTAL	237,5	106,0	1.241,9	364,1	1.949,5	898,2	2.847,7	1.943,5	4.791,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PULAU PAPUA

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

--- Batas Negara

--- Batas Provinsi

~ Sungai

~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

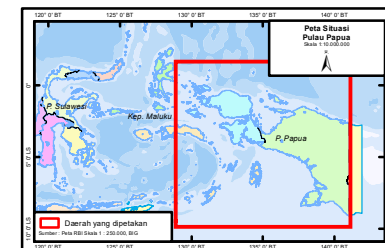
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

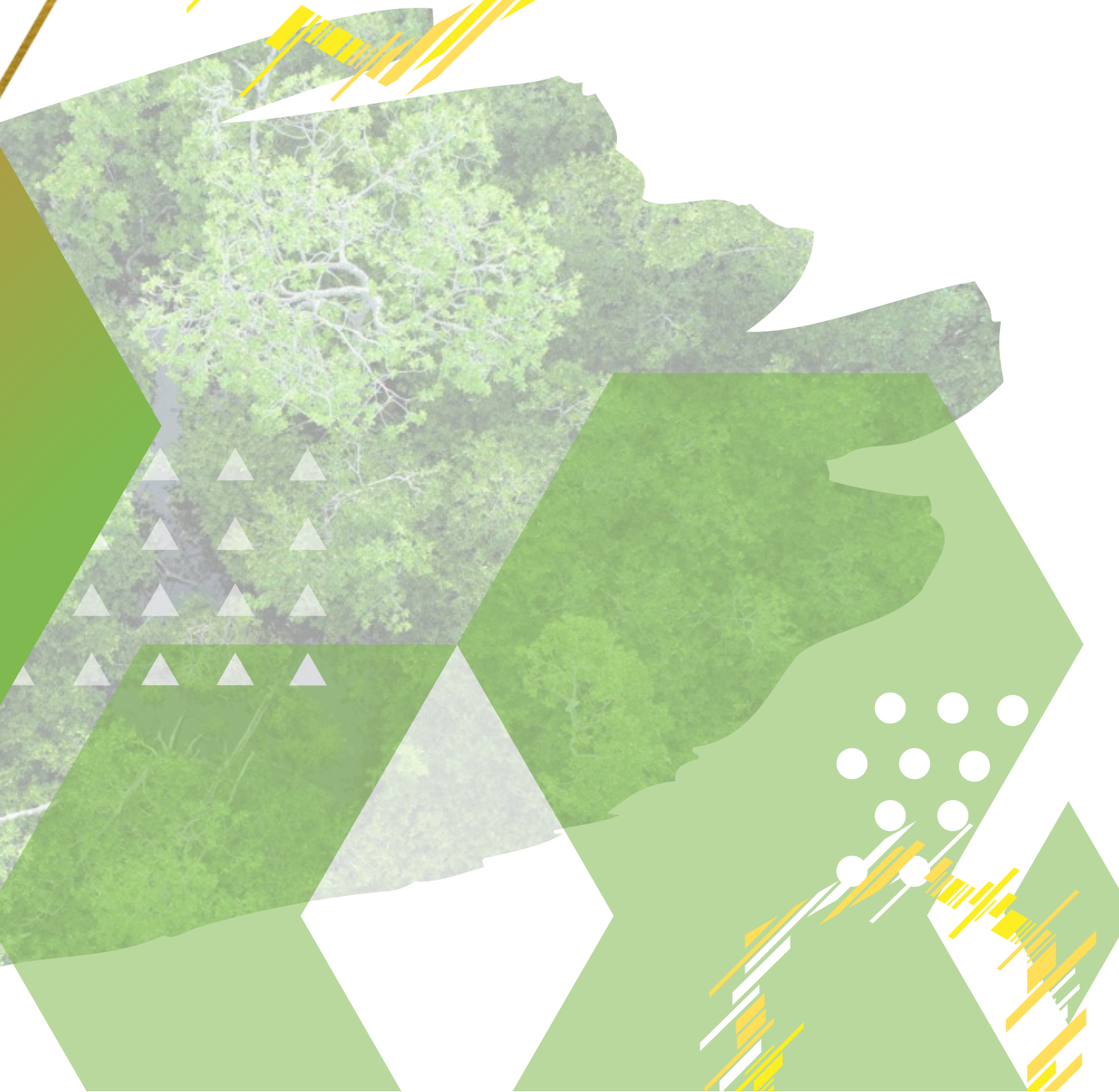
- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

LAMPIRAN 3

Deforestasi dan Peta Deforestasi Per Provinsi Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021-2022

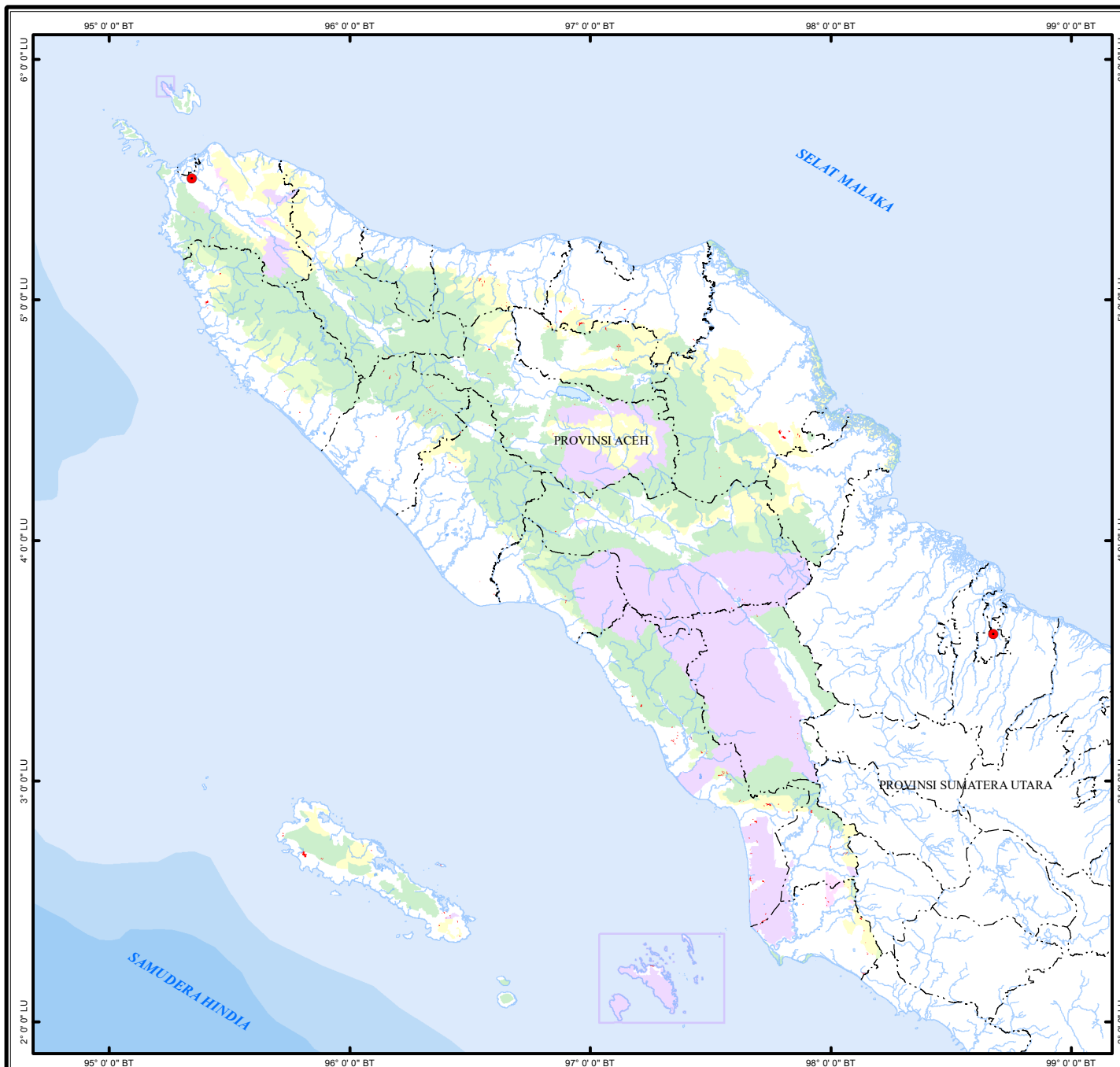


TABEL 3.1 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI ACEH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ACEH									
	A. Hutan Primer	234,5	440,6	67,2	234,9	977,3	-	977,3	265,1	1.242,3
	- Hutan lahan kering primer	65,1	440,6	67,2	234,9	807,8	-	807,8	193,2	1.001,0
	- Hutan rawa primer	169,5	-	-	-	169,5	-	169,5	71,9	241,4
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	114,5	668,7	285,3	743,3	1.811,8	24,9	1.836,7	2.262,1	4.098,9
	- Hutan lahan kering sekunder	49,4	668,7	285,3	699,0	1.702,4	24,9	1.727,3	1.924,9	3.652,2
	- Hutan rawa sekunder	65,1	-	-	-	65,1	-	65,1	337,2	402,3
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	44,3	44,3	-	44,3	-	44,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	20,5	20,5	-	20,5	5,4	25,9
	TOTAL	349,1	1.109,4	352,5	998,6	2.809,6	24,9	2.834,5	2.532,6	5.367,1

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

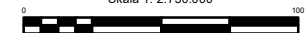
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI ACEH

Skala 1: 2.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

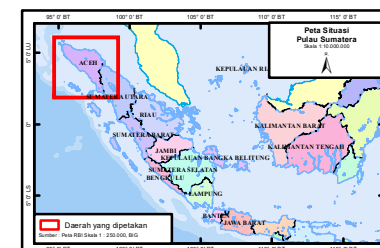
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



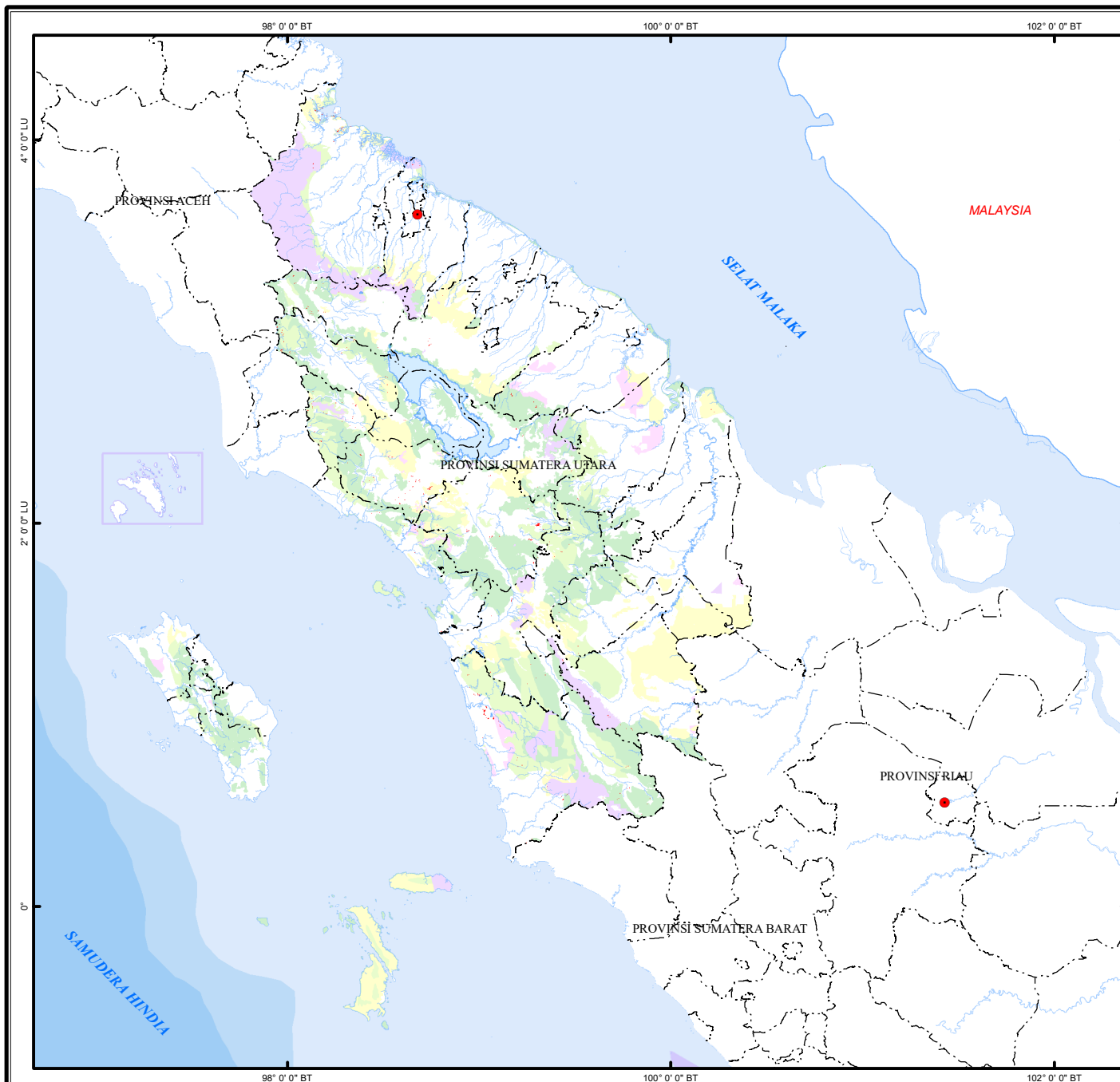
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.2 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SUMATERA UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	SUMATERA UTARA									
	A. Hutan Primer	112,6	144,2	3,9	0,9	261,6	-	261,6	0,0	261,6
	- Hutan lahan kering primer	112,6	144,2	3,9	0,9	261,6	-	261,6	0,0	261,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	164,3	1.284,7	752,5	685,2	2.886,6	111,3	2.997,9	2.339,4	5.337,2
	- Hutan lahan kering sekunder	83,6	1.101,2	711,9	307,9	2.204,6	104,2	2.308,8	1.841,1	4.149,9
	- Hutan rawa sekunder	-	1,2	20,7	5,7	27,5	7,0	34,6	120,7	155,3
	- Hutan mangrove sekunder	80,7	182,3	19,9	371,6	654,5	-	654,5	377,5	1.032,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	276,9	1.428,9	756,3	686,1	3.148,2	111,3	3.259,5	2.339,4	5.598,8

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

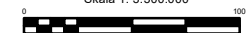
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SUMATERA UTARA

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

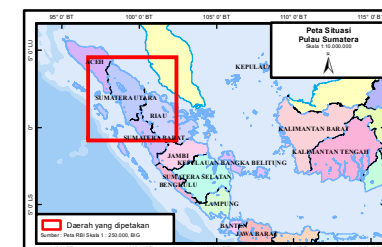
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

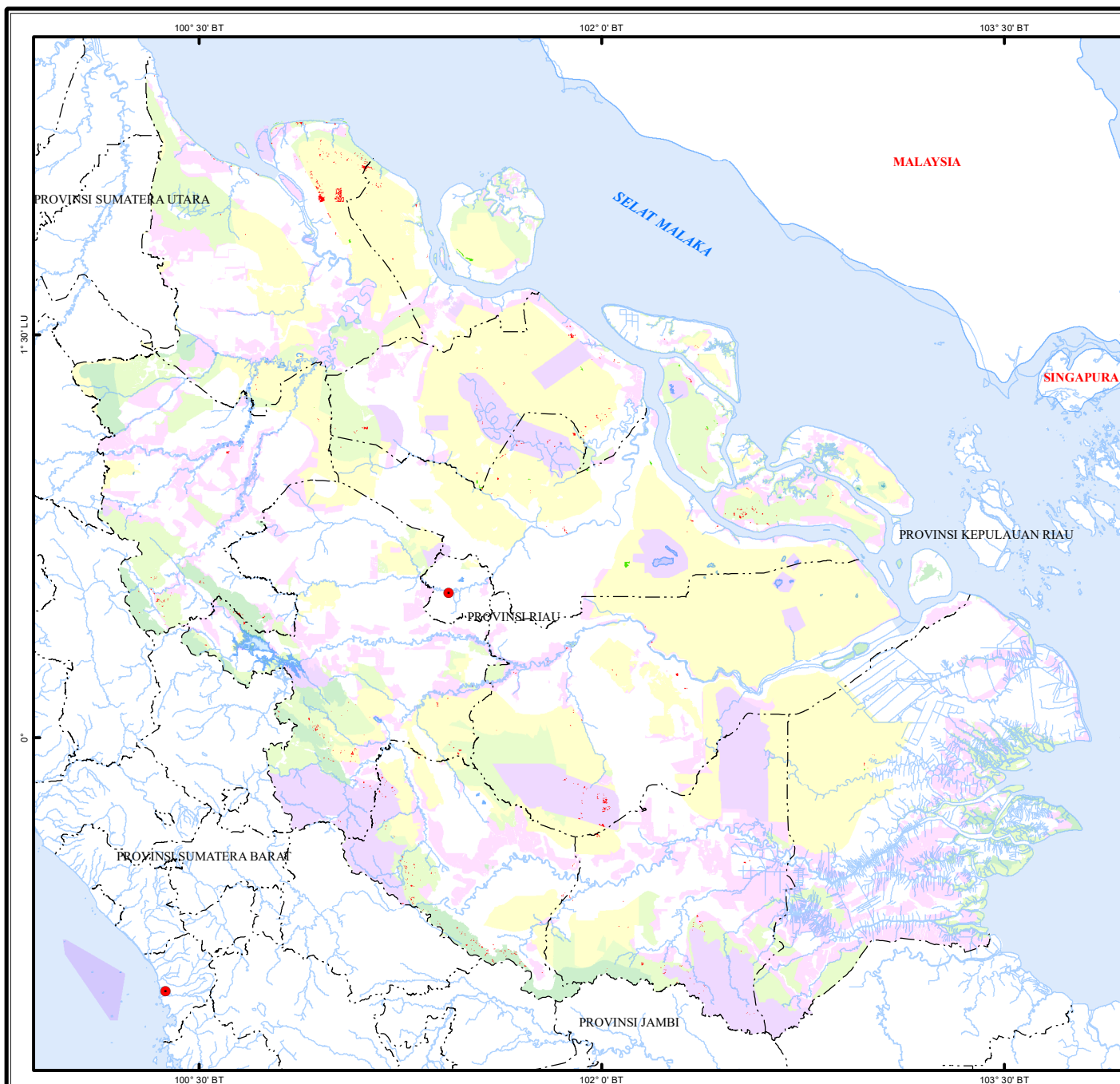
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.3 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI RIAU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP				Jumlah	HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	RIAU									
	A. Hutan Primer	11,4	10,5	276,6	-	298,5	-	298,5	-	298,5
	- Hutan lahan kering primer	11,4	10,5	276,6	-	298,5	-	298,5	-	298,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	1.462,1	1.126,9	2.187,6	3.424,5	8.201,2	530,9	8.732,1	1.431,2	10.163,2
	- Hutan lahan kering sekunder	1.182,0	1.106,4	985,5	452,6	3.726,5	112,0	3.838,5	261,6	4.100,0
	- Hutan rawa sekunder	280,1	20,5	911,9	2.940,2	4.152,7	350,1	4.502,8	1.042,0	5.544,8
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	290,2	31,7	322,0	68,8	390,8	127,6	518,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	58,3	1.074,6	1.132,9	-	1.132,9	74,0	1.206,9
	TOTAL	1.473,5	1.137,5	2.405,9	2.349,9	7.366,8	530,9	7.897,7	1.357,1	9.254,8

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

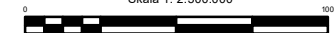
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI RIAU

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

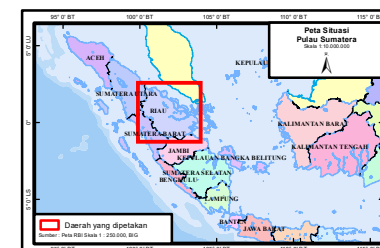
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

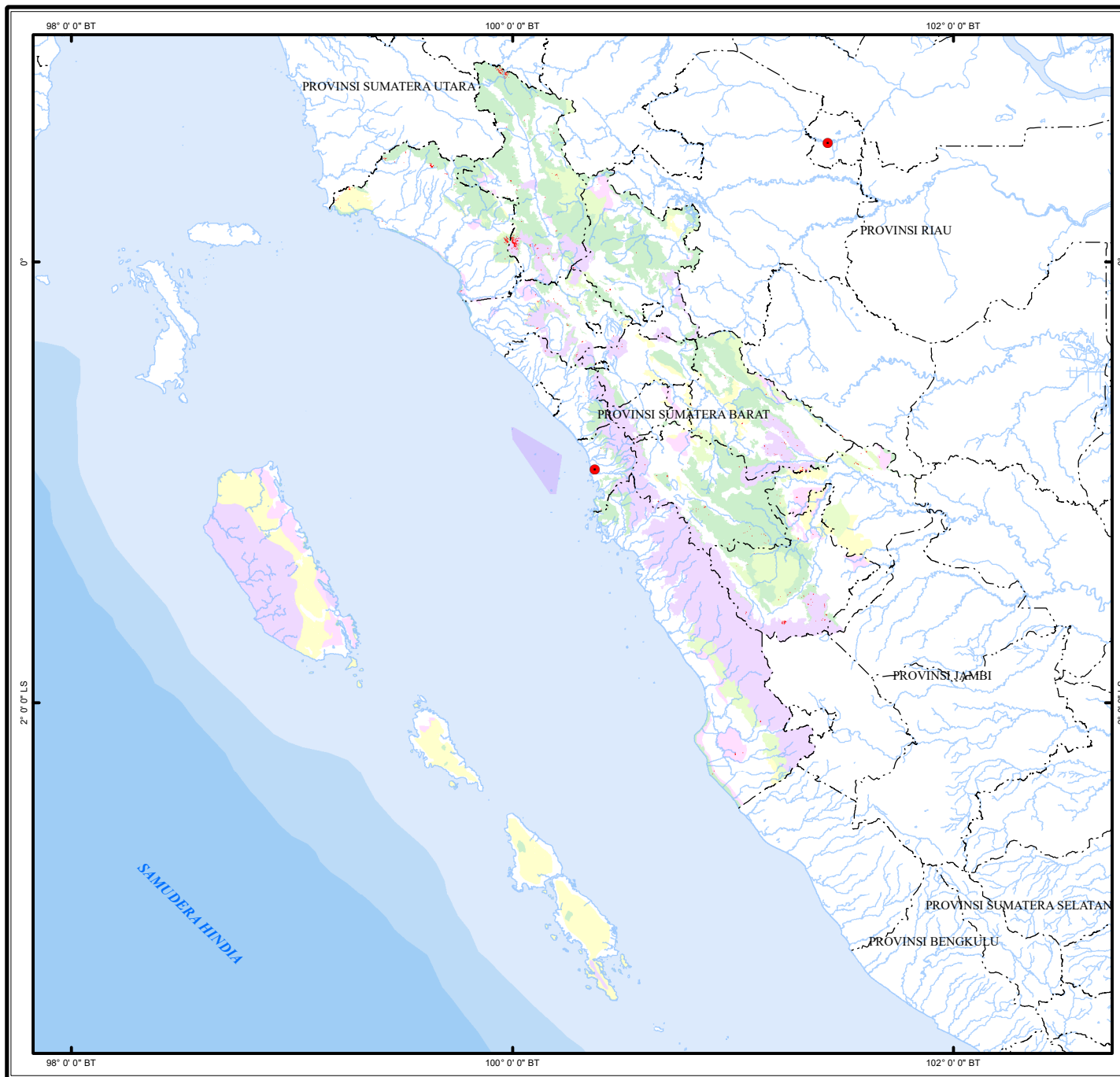
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.4 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SUMATERA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	SUMATERA BARAT									
	A. Hutan Primer	958,0	974,1	16,5	12,2	1.960,8	-	1.960,8	54,1	2.014,9
	- Hutan lahan kering primer	958,0	974,1	16,5	0,4	1.949,0	-	1.949,0	54,1	2.003,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	11,8	11,8	-	11,8	-	11,8
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	757,5	1.249,4	320,8	374,2	2.701,9	198,7	2.900,6	902,0	3.802,6
	- Hutan lahan kering sekunder	757,5	1.231,9	320,8	352,9	2.663,0	96,7	2.759,7	875,0	3.634,7
	- Hutan rawa sekunder	-	17,6	-	21,3	38,9	102,0	140,9	21,2	162,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	1.715,5	2.223,5	337,3	386,3	4.662,7	198,7	4.861,4	956,1	5.817,5

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

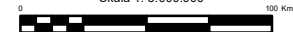
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SUMATERA BARAT

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

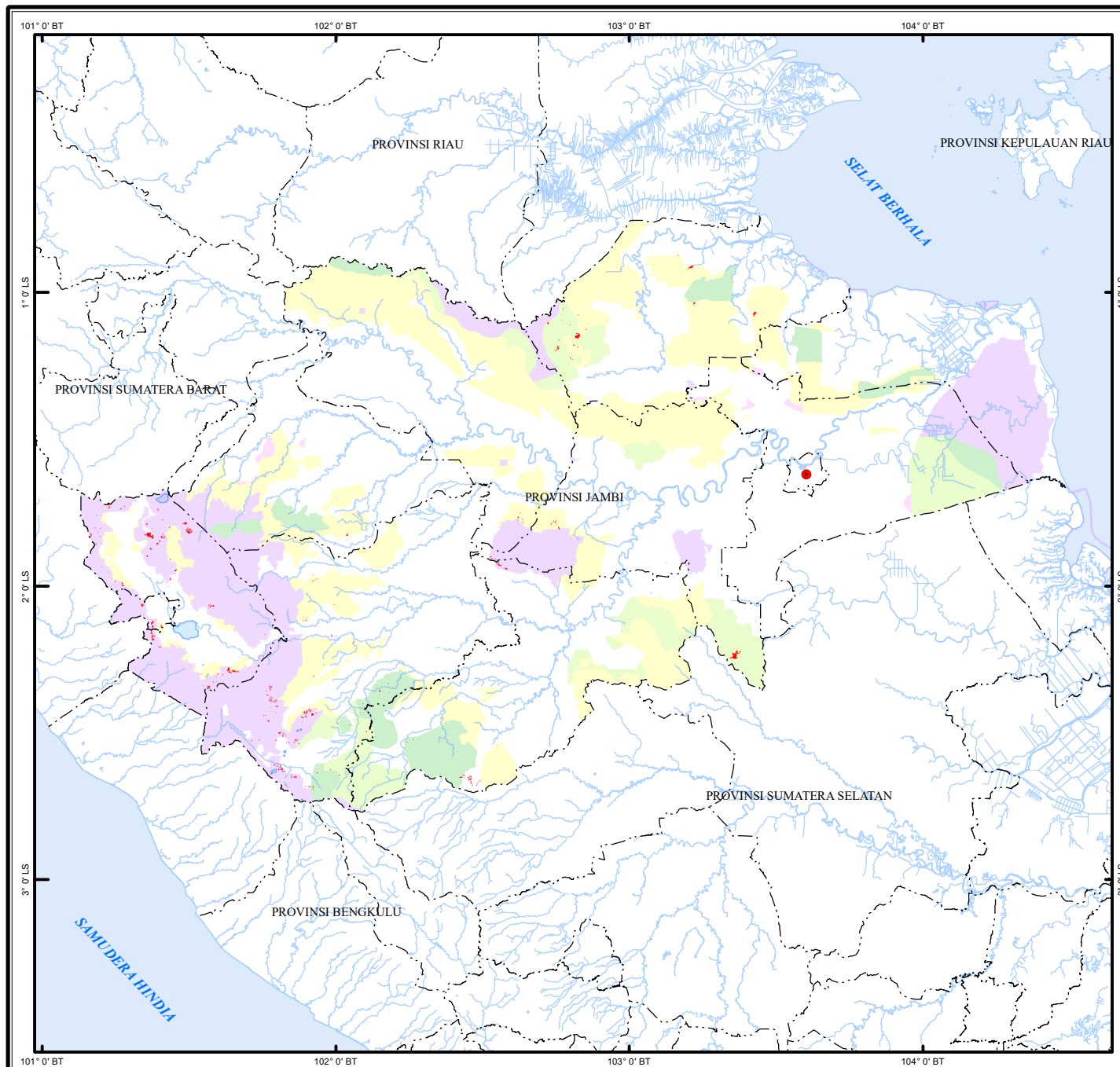
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.5 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAMBI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	1.520,9	119,6	80,7	153,6	1.874,7	-	1.874,7	83,7	1.958,4
	- Hutan lahan kering primer	1.520,9	119,6	80,7	153,6	1.874,7	-	1.874,7	83,7	1.958,4
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	1.615,7	33,0	750,9	820,2	3.219,9	-	3.219,9	288,7	3.508,6
	- Hutan lahan kering sekunder	1.615,7	33,0	750,9	529,0	2.928,6	-	2.928,6	284,4	3.213,1
	- Hutan rawa sekunder	-	0,0	-	291,3	291,3	-	291,3	4,2	295,5
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3.136,6	152,6	831,6	973,9	5.094,6	-	5.094,6	372,3	5.467,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

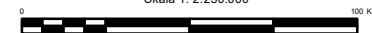
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI JAMBI

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



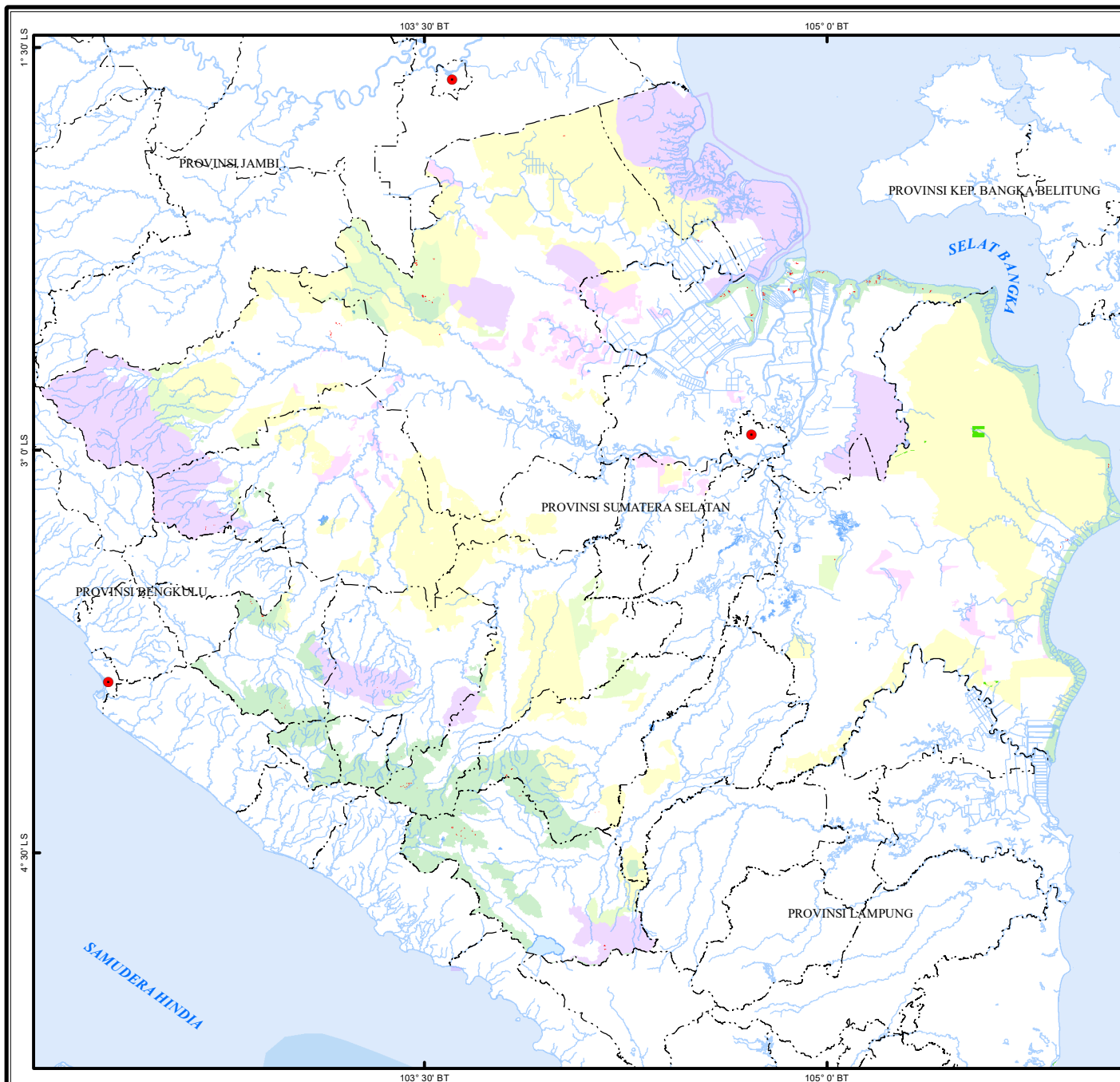
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.6 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SUMATERA SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	35,2	113,0	-	-	148,2	-	148,2	45,0	193,2
	- Hutan lahan kering primer	26,0	113,0	-	-	138,9	-	138,9	-	138,9
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	9,3	-	-	-	9,3	-	9,3	45,0	54,3
	B. Hutan Sekunder	101,1	1.681,1	230,5	44,1	2.056,8	-	2.056,8	497,5	2.554,3
	- Hutan lahan kering sekunder	101,1	549,6	207,9	10,7	869,3	-	869,3	165,8	1.035,2
	- Hutan rawa sekunder	-	11,0	22,6	31,8	65,4	-	65,4	46,3	111,8
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.120,6	-	1,5	1.122,1	-	1.122,1	285,4	1.407,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	- 2.341,6	- 2.341,6	-	- 2.341,6	- 2,0	- 2.343,6
	TOTAL	136,3	1.794,1	230,5	- 2.297,5	- 136,6	-	- 136,6	540,5	403,9

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

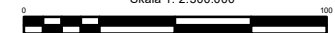
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

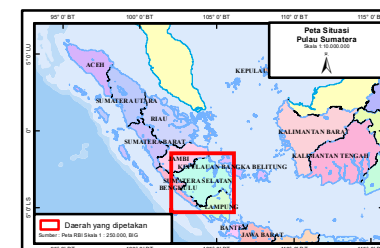
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

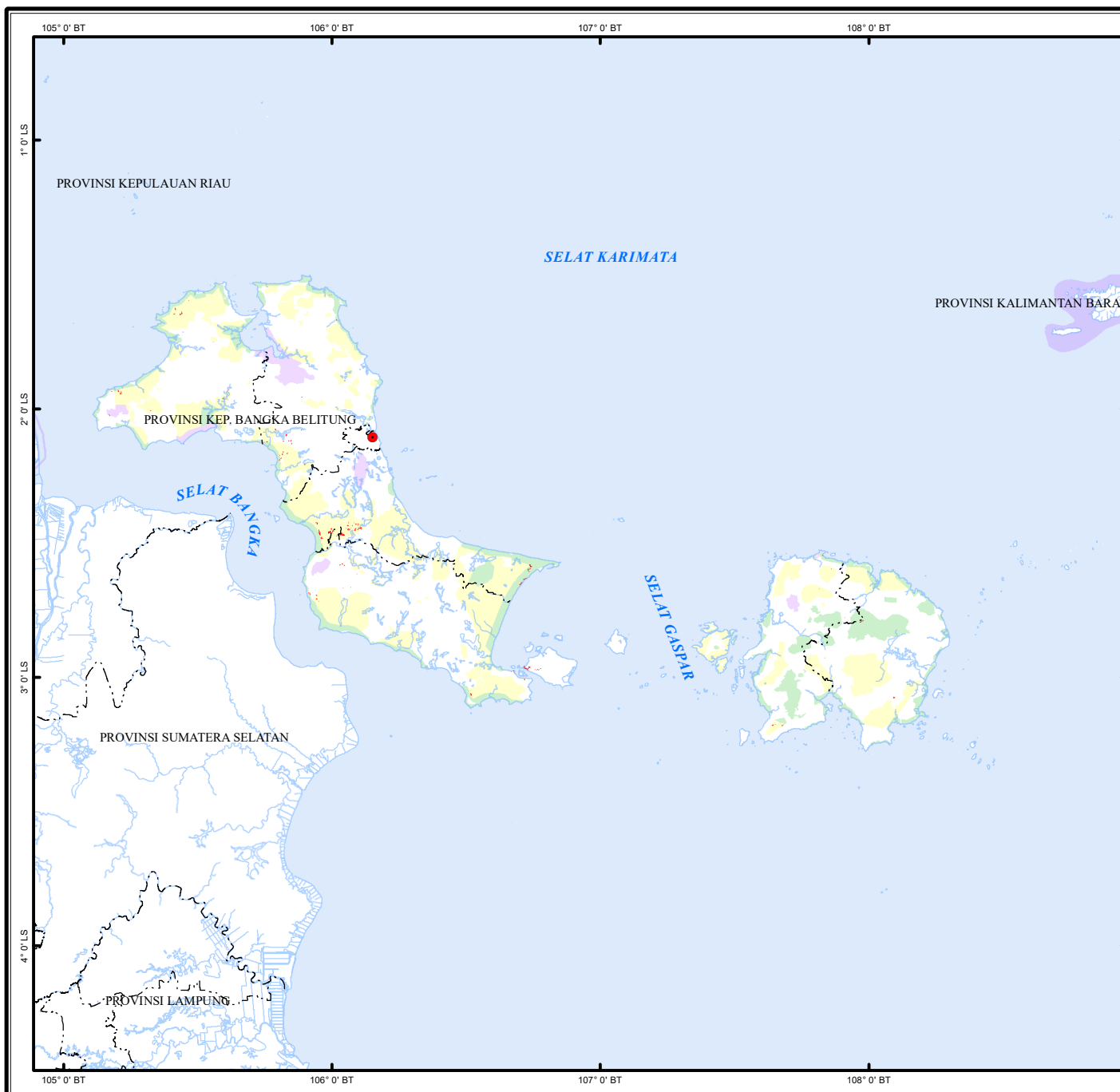
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.7 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	12,9	-	34,0	46,9	-	46,9	2,5	49,4
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	12,9	-	34,0	46,9	-	46,9	2,5	49,4
	B. Hutan Sekunder	12,6	327,6	-	1.296,7	1.636,9	-	1.636,9	528,7	2.165,6
	- Hutan lahan kering sekunder	12,6	47,7	-	651,1	711,4	-	711,4	301,9	1.013,3
	- Hutan rawa sekunder	-	160,0	-	622,4	782,3	-	782,3	136,7	919,0
	- Hutan mangrove sekunder	-	119,9	-	23,3	143,2	-	143,2	90,1	233,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,6	340,5	-	1.330,7	1.683,8	-	1.683,8	531,3	2.215,0

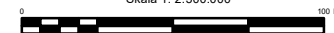
Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PETA DEFORESTASI
TAHUN 2021 - 2022**
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



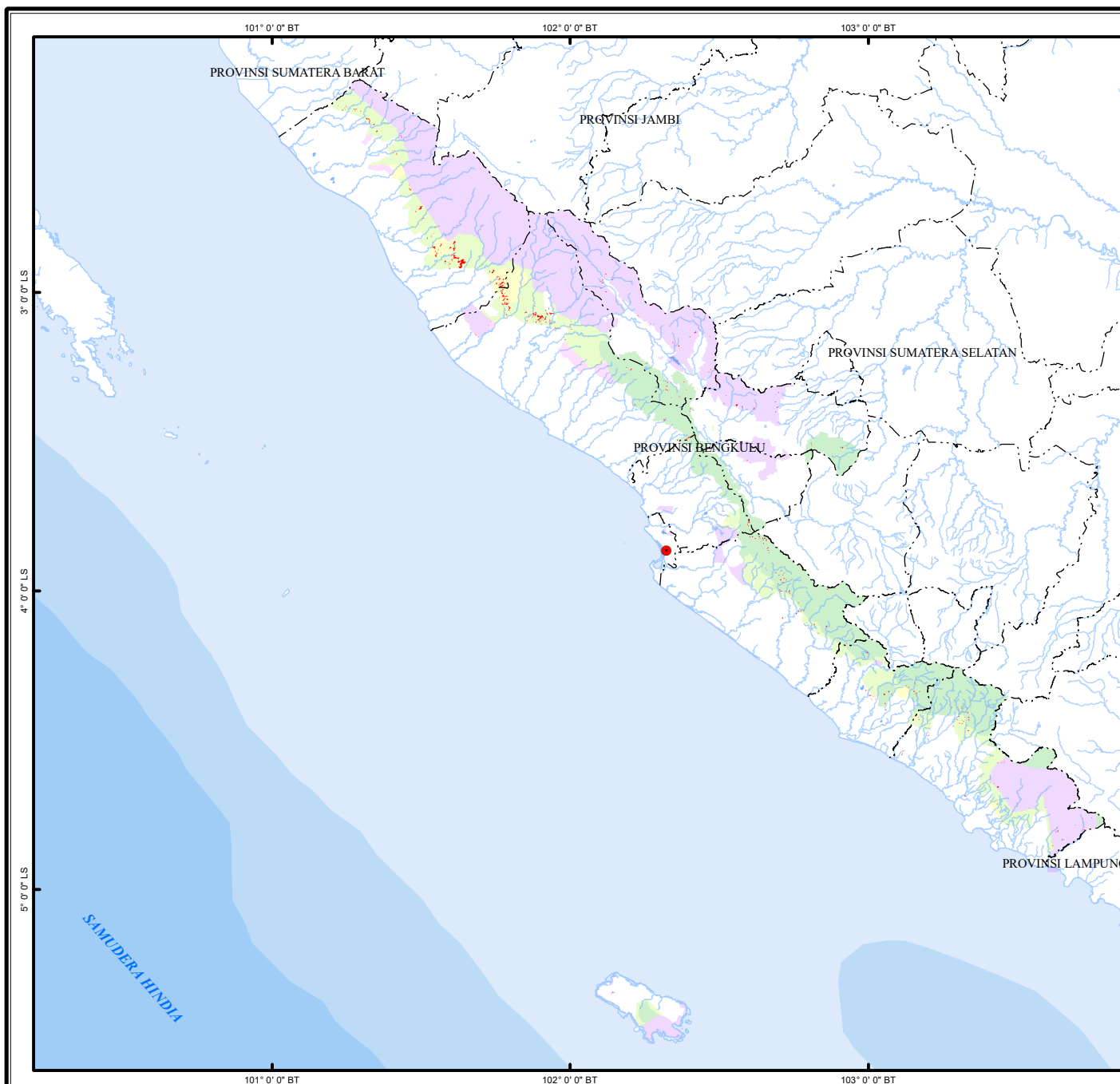
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.8 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI BENGKULU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	241,7	352,4	31,1	-	625,2	-	625,2	0,4	625,6
	- Hutan lahan kering primer	241,7	352,4	31,1	-	625,2	-	625,2	0,4	625,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	272,4	614,3	2.140,8	770,7	3.798,1	9,0	3.807,1	329,7	4.136,8
	- Hutan lahan kering sekunder	272,4	614,3	2.140,8	770,7	3.798,1	9,0	3.807,1	329,7	4.136,8
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	514,1	966,6	2.171,9	770,7	4.423,3	9,0	4.432,3	330,0	4.762,4

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

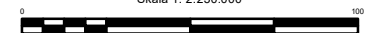
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI BENGKULU

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

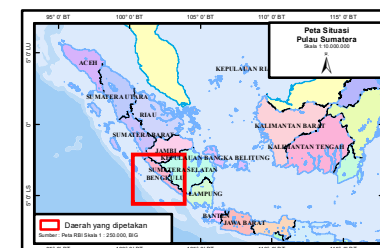
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



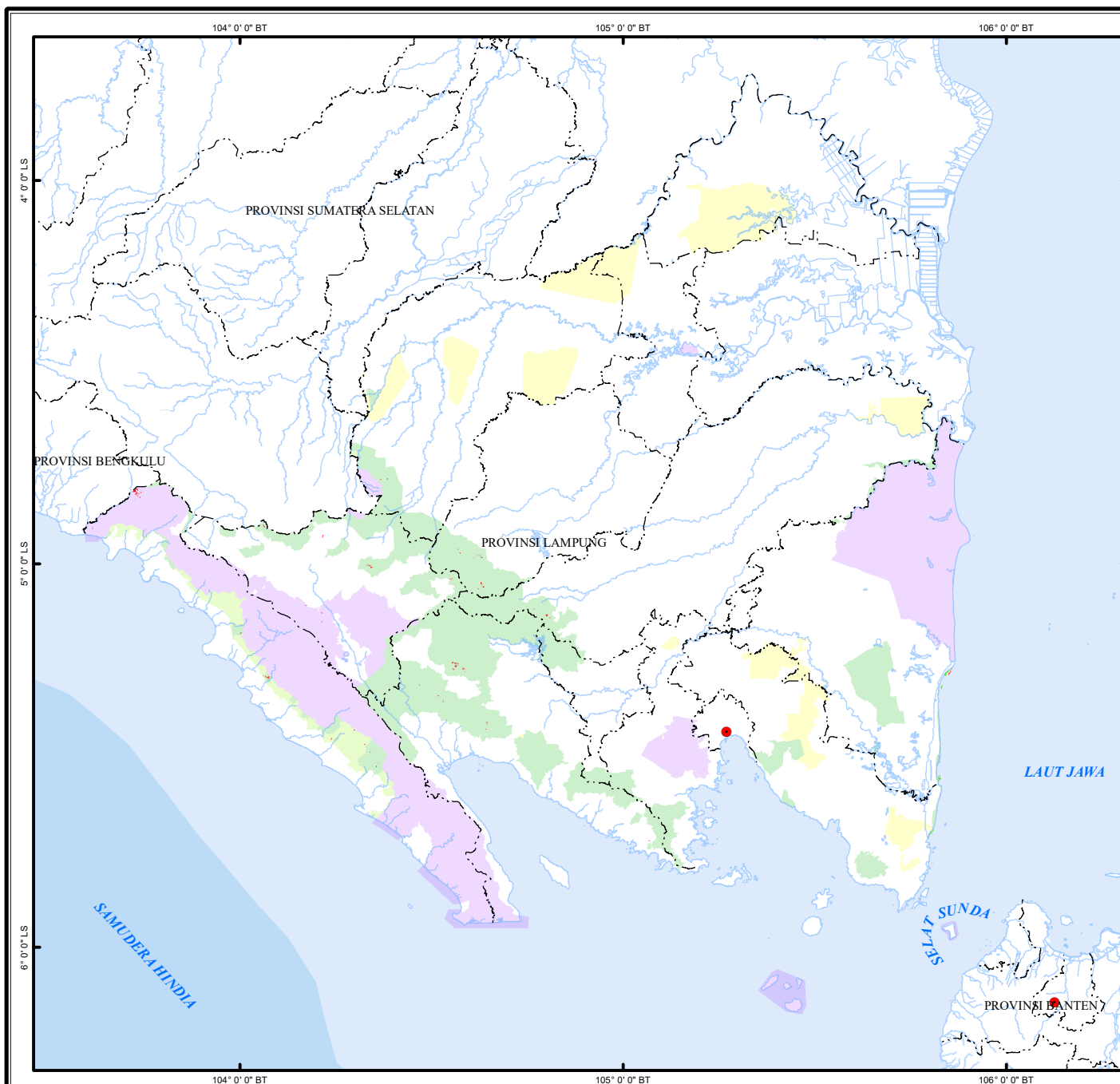
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.9 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI LAMPUNG DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	136,7	14,9	7,9	-	159,5	-	159,5	-	159,5
	- Hutan lahan kering primer	136,7	14,9	7,9	-	159,5	-	159,5	-	159,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	28,7	341,9	27,5	-	398,1	-	398,1	66,1	464,2
	- Hutan lahan kering sekunder	28,7	341,9	27,5	-	398,1	-	398,1	33,2	431,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	32,9	32,9
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	165,4	356,8	35,4	-	557,6	-	557,6	66,1	623,7

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI LAMPUNG

Skala 1: 1.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

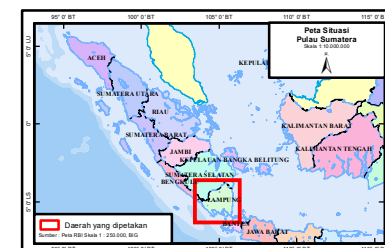
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.10 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	13,5	28,1	30,7	72,4	19,5	91,8	298,1	390,0
	- Hutan lahan kering sekunder	-	13,5	27,0	30,0	70,6	19,5	90,1	288,0	378,0
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	1,1	0,7	1,8	-	1,8	7,5	9,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	13,5	28,1	30,7	72,4	19,5	91,8	298,1	390,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

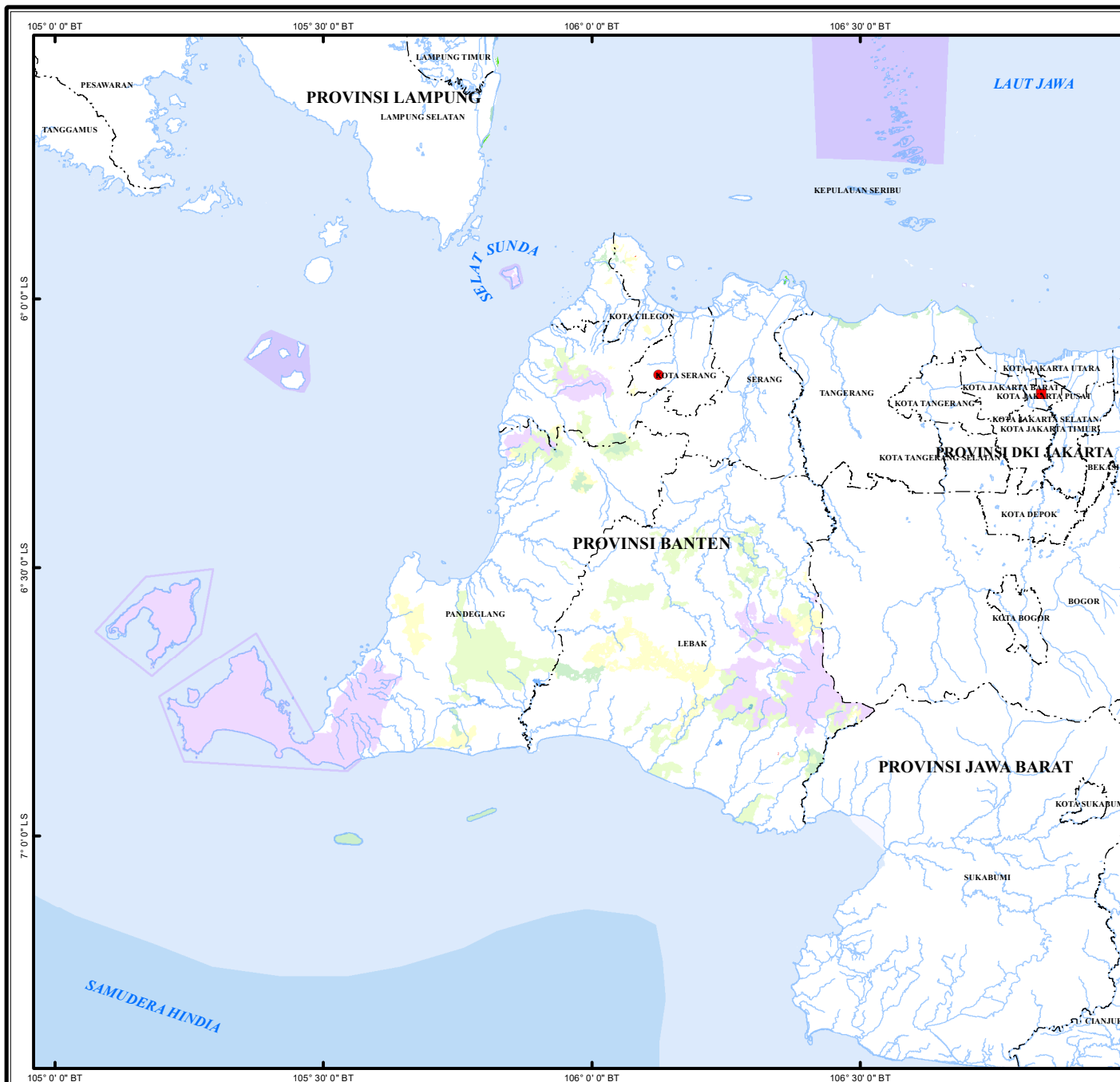
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL 3.11 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI BANTEN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	BANTEN									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	31,2	31,2
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	31,2	31,2
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	3,5	3,5	-	3,5	3,8	7,3
	TOTAL	-	-	-	3,5	3,5	-	3,5	27,4	23,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

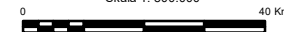
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI BANTEN

Skala 1: 800.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Negara
- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

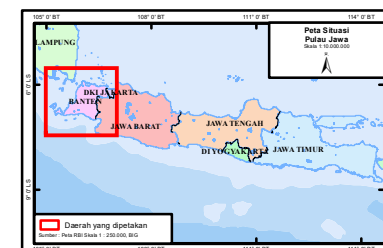
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.12 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI DKI JAKARTA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

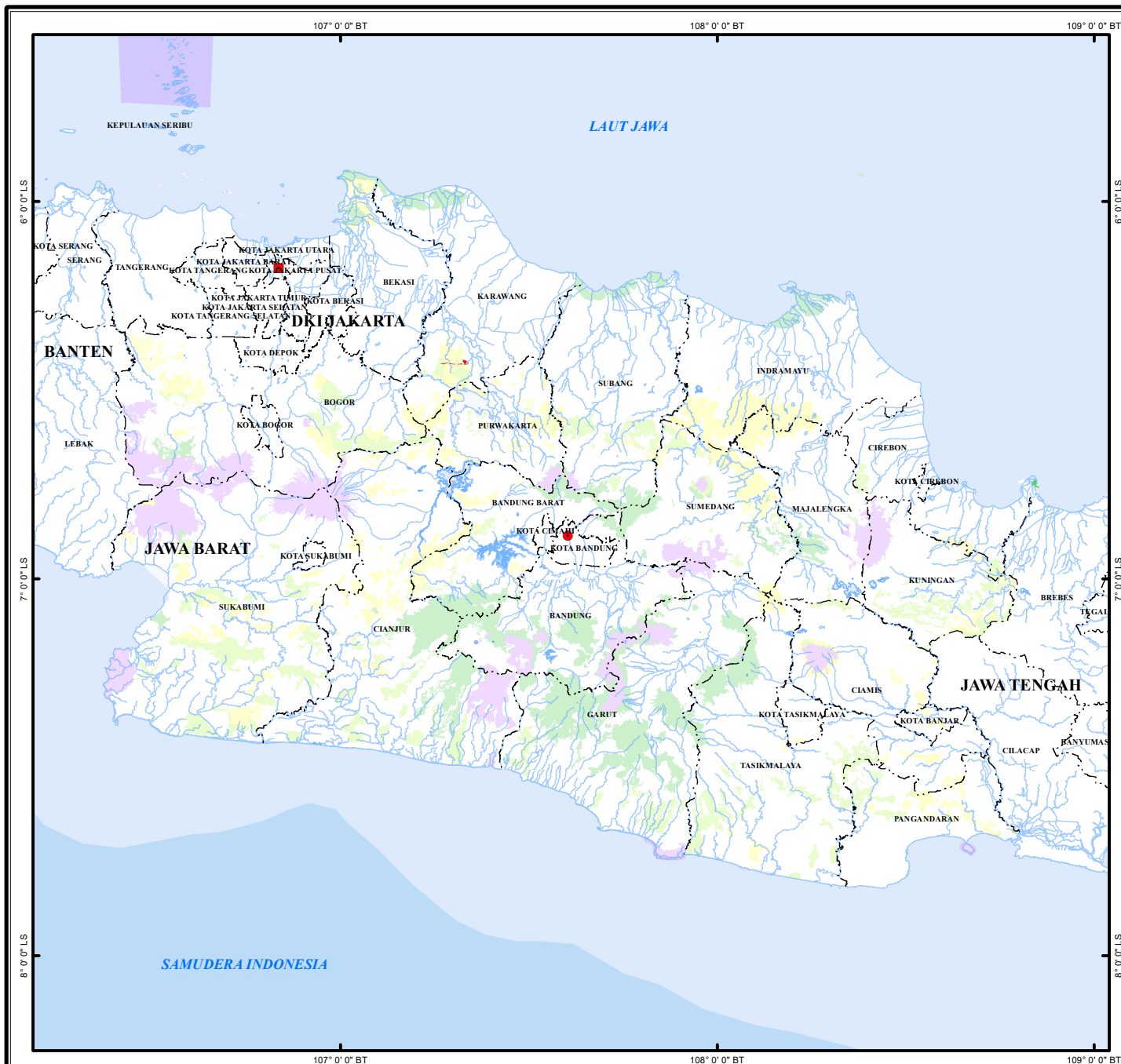
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

TABEL 3.13 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAWA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	JAWA BARAT									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	5,2	-	5,2	-	5,2	-	5,2
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	5,2	-	5,2	-	5,2	-	5,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	23,9	73,3	97,1	-	97,1	127,9	225,0
	TOTAL	-	-	29,0	73,3	102,3	-	102,3	127,9	230,1

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

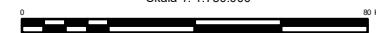
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI JAWA BARAT

Skala 1: 1.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Negara
- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

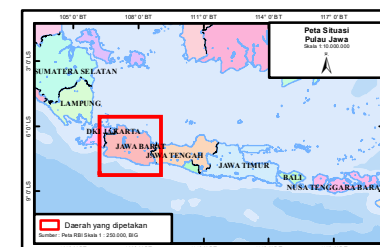
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.14 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAWA TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	6,2	74,2	92,1	24,4	196,8	-	196,8	- 585,1	- 388,3
	- Hutan lahan kering sekunder	6,2	74,2	92,1	6,0	178,5	-	178,5	44,9	223,4
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	18,3	18,3	-	18,3	- 630,0	- 611,7
	C. Hutan Tanaman*	-	-	3,2	9,8	13,0	-	13,0	0,0	13,0
	TOTAL	6,2	74,2	95,3	34,2	209,9	-	209,9	- 585,1	- 375,2

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI JAWA TENGAH

Skala 1: 2.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



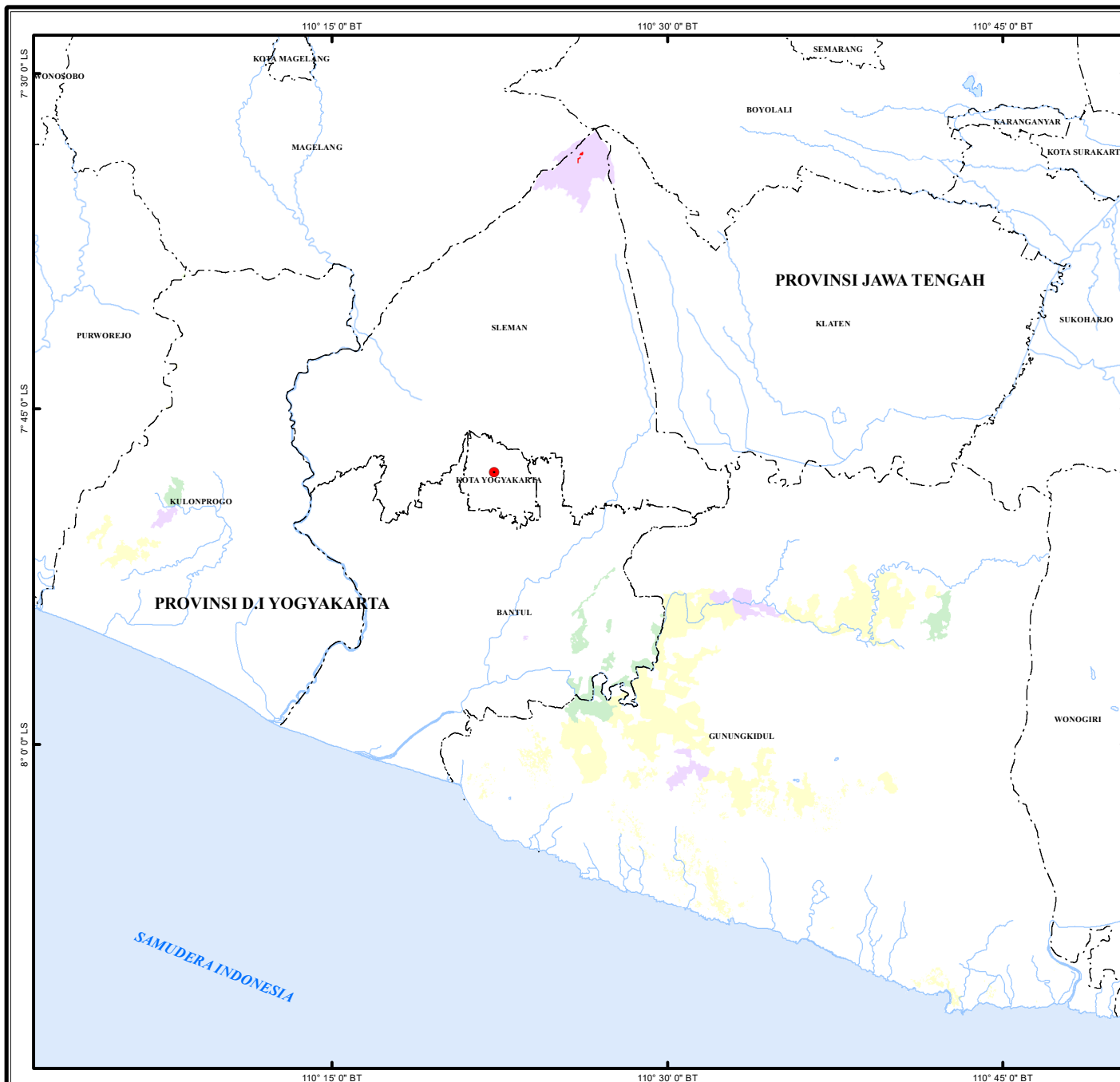
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.15 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9
	- Hutan lahan kering sekunder	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



**PETA DEFORESTASI
TAHUN 2021 - 2022**
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Skala 1: 500.000
0 20 Km



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.16 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAWA TIMUR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI JAWA TIMUR

Skala 1: 3.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



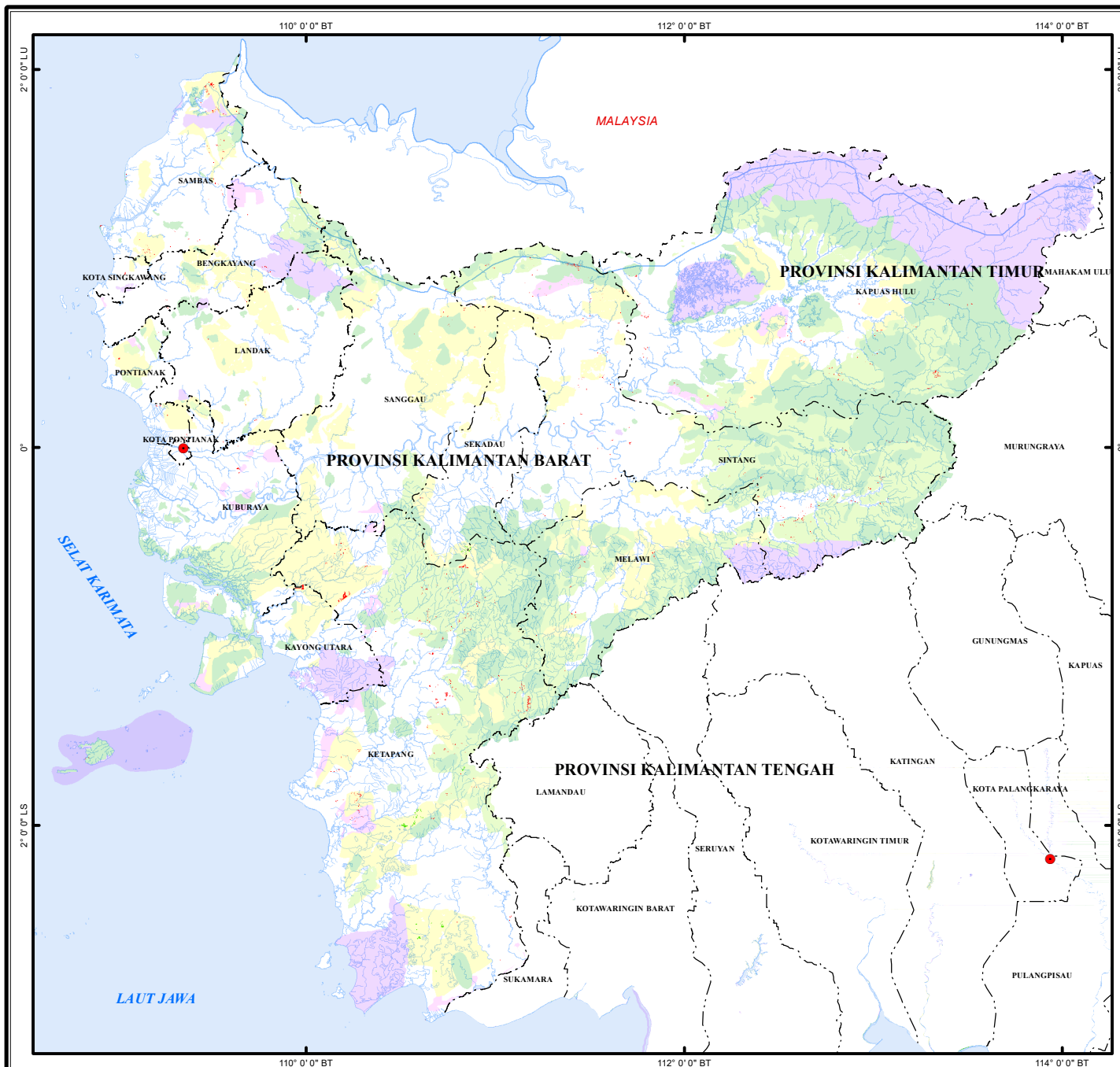
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.17 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	16,0	99,0	668,6	8,7	792,3	-	792,3	-	792,3
	- Hutan lahan kering primer	16,0	99,0	668,6	8,7	792,3	-	792,3	-	792,3
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	68,4	702,7	2.119,8	2.957,0	5.847,9	138,8	5.986,7	2.723,4	8.710,1
	- Hutan lahan kering sekunder	52,4	625,7	2.098,3	728,6	3.505,0	10,9	3.515,8	1.383,3	4.899,1
	- Hutan rawa sekunder	16,0	21,8	11,4	2.222,6	2.271,8	127,9	2.399,8	1.238,8	3.638,5
	- Hutan mangrove sekunder	-	55,2	10,1	5,8	71,1	-	71,1	101,3	172,5
	C. Hutan Tanaman*	-	-	120,1	1.530,1	1.650,1	-	1.650,1	6,6	1.656,7
	TOTAL	84,4	801,8	2.668,3	1.435,7	4.990,1	138,8	5.128,9	2.716,8	7.845,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

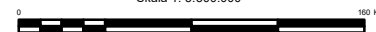
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

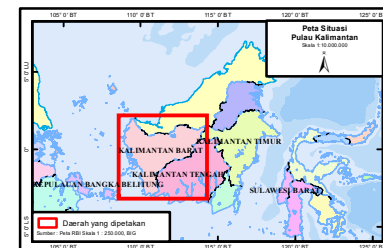
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

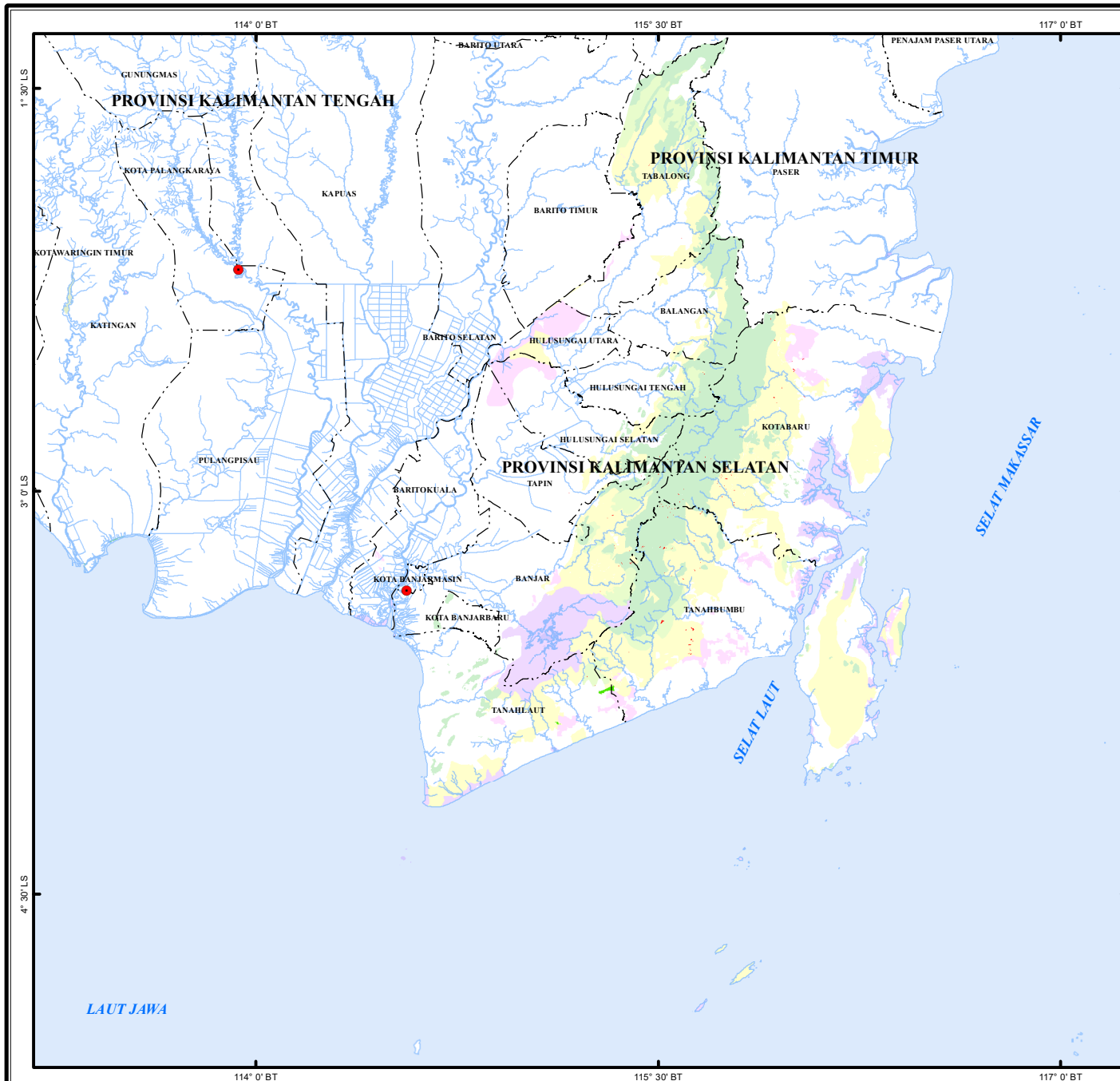
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN
TAHUN 2023

TABEL 3.18 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0
	- Hutan lahan kering primer	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	288,3	159,9	351,5	799,6	17,5	817,0	98,8	915,8
	- Hutan lahan kering sekunder	-	288,3	159,9	351,5	799,6	17,5	817,0	86,1	903,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,6
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	- 183,6	- 183,6	-	- 183,6	- 600,3	- 783,9
	TOTAL	-	291,2	159,9	167,8	618,9	17,5	636,4	- 501,5	134,9

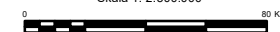
Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PETA DEFORESTASI
TAHUN 2021 - 2022
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

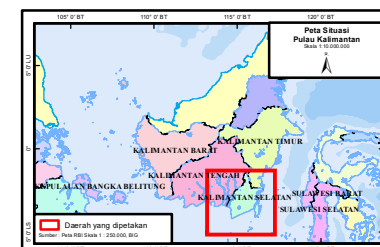
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



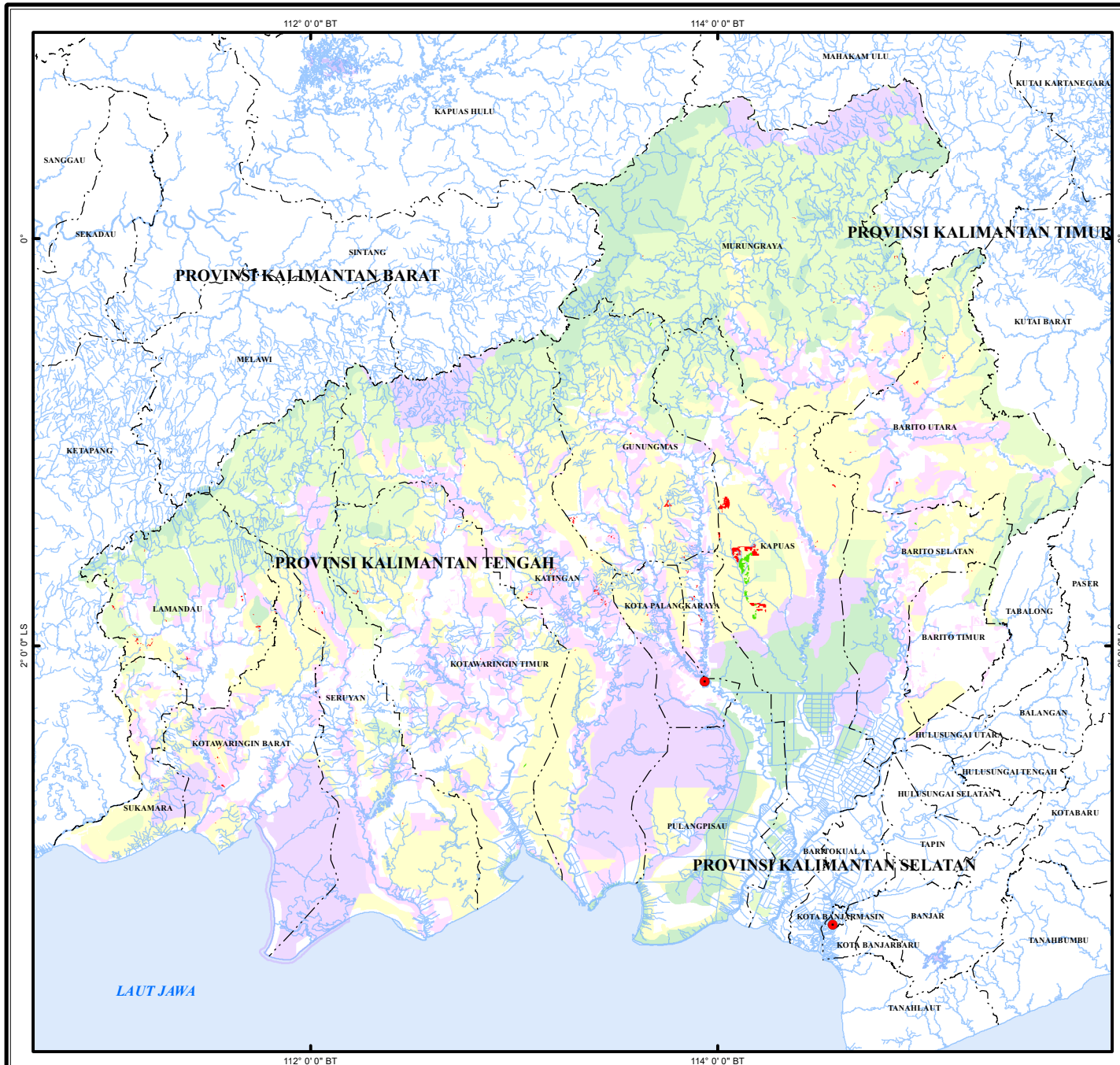
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.19 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	7,2	95,5	1.196,3	11.172,6	12.471,7	2.167,0	14.638,7	1.726,2	16.364,9
	- Hutan lahan kering sekunder	-	95,5	1.196,3	9.003,1	10.295,0	813,9	11.108,9	888,8	11.997,7
	- Hutan rawa sekunder	7,2	-	-	2.169,5	2.176,7	1.344,0	3.520,7	837,4	4.358,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	9,1	9,1	-	9,1
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	- 4.800,5	- 4.800,5	-	- 4.800,5	-	- 4.800,5
	TOTAL	7,2	95,5	1.196,3	6.372,1	7.671,2	2.167,0	9.838,2	1.726,2	11.564,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PETA DEFORESTASI
TAHUN 2021 - 2022
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Skala 1: 3.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

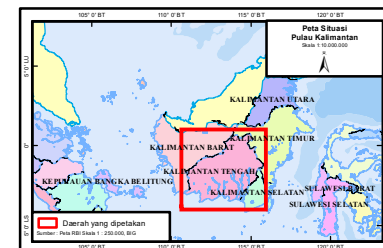
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



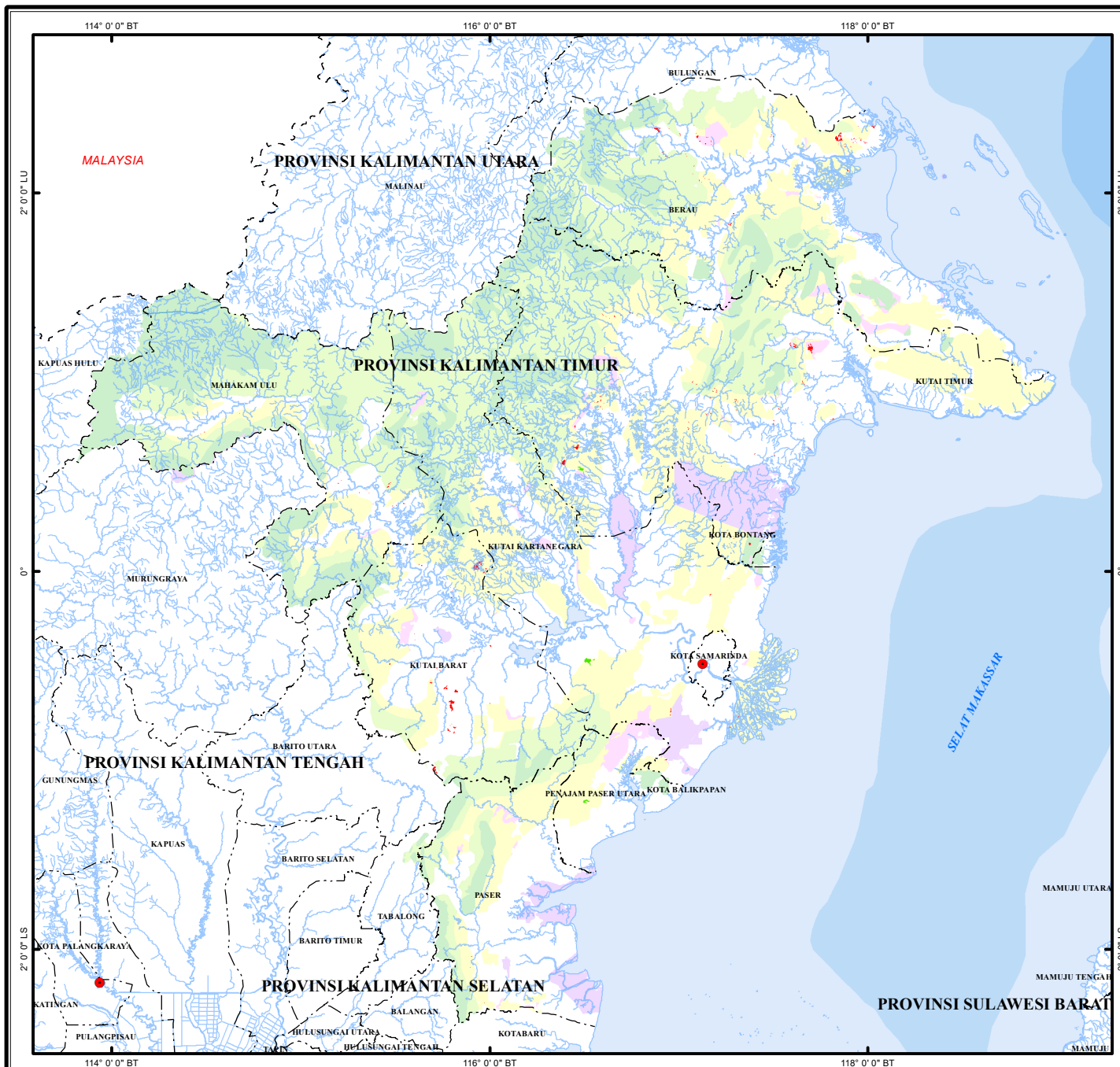
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.20 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	22,0	16,1	-	38,1	-	38,1	12,3	50,4
	- Hutan lahan kering primer	-	22,0	16,1	-	38,1	-	38,1	12,3	50,4
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	59,2	148,3	888,5	4.088,9	5.184,9	269,3	5.454,2	4.739,4	10.193,7
	- Hutan lahan kering sekunder	5,6	148,3	888,5	3.909,1	4.951,5	269,3	5.220,8	4.507,1	9.727,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	138,7	138,7
	- Hutan mangrove sekunder	53,6	-	-	179,8	233,4	-	233,4	93,7	327,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	1.523,5	1.523,5	727,4	796,0	42,6	753,5
	TOTAL	59,2	170,3	904,6	2.565,5	3.699,6	996,7	4.696,3	4.794,3	9.490,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemuat akhir sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- — — Batas Negara
- — — Batas Provinsi
- - - - - Batas Kabupaten
- ~ ~ ~ Sungai
- ~ ~ ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

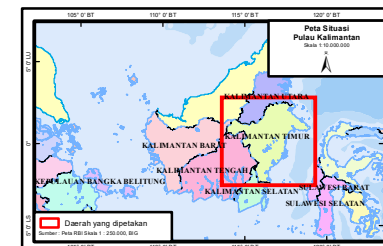
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

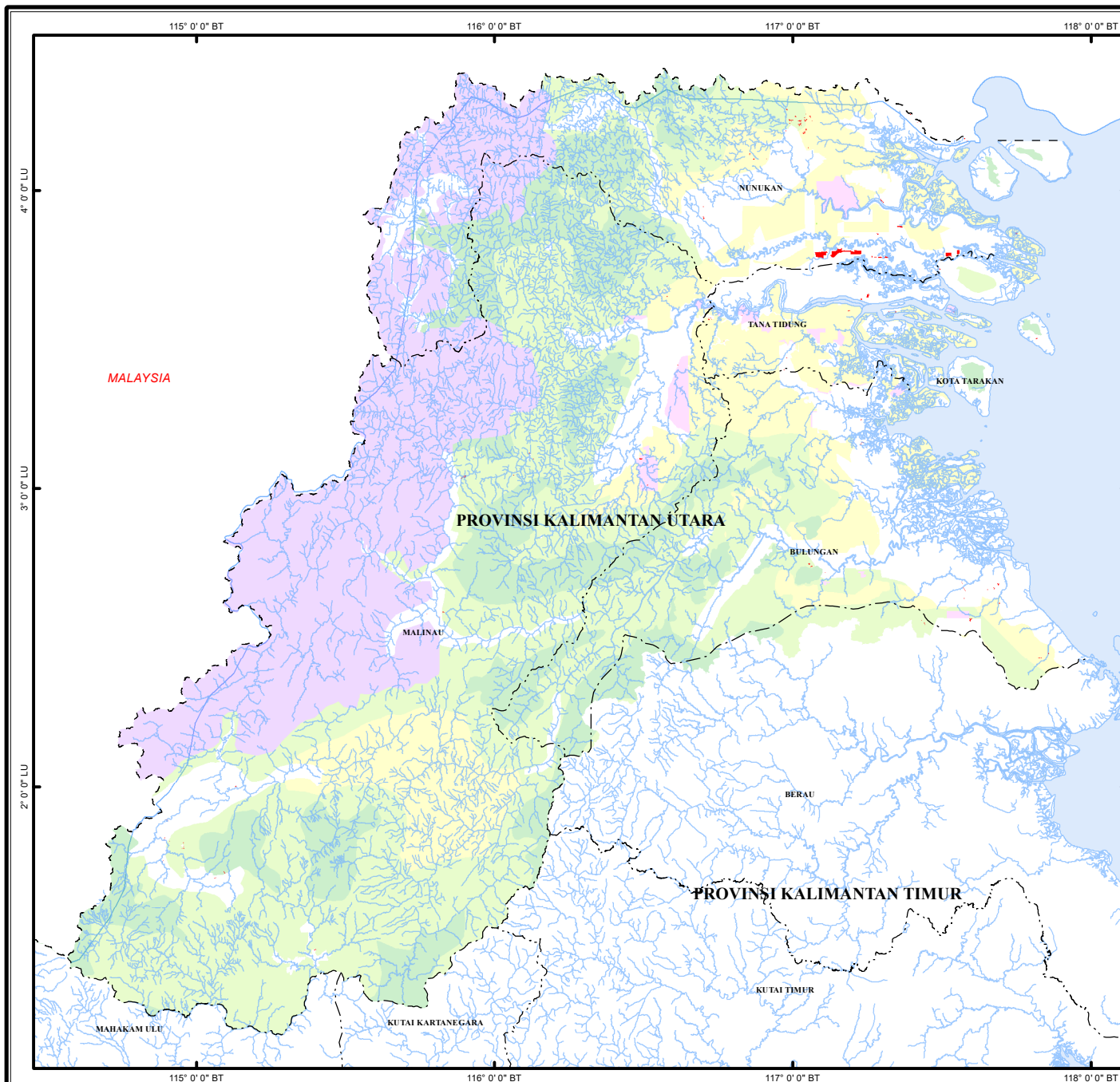
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.21 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	KALIMANTAN UTARA									
	A. Hutan Primer	6,6	-	103,8	5,4	115,8	-	115,8	59,5	175,3
	- Hutan lahan kering primer	6,6	-	103,8	-	110,4	-	110,4	53,4	163,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	5,4	5,4	-	5,4	-	5,4
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1
	B. Hutan Sekunder	1,6	28,0	349,0	325,3	703,9	78,7	782,6	3.331,0	4.113,6
	- Hutan lahan kering sekunder	1,6	28,0	349,0	257,8	636,4	67,8	704,2	349,5	1.053,7
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	4,9	4,9	-	4,9	2.960,4	2.965,3
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	62,6	62,6	10,9	73,5	21,1	94,6
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	20,6	20,6	-	20,6	-	20,6
	TOTAL	8,1	28,0	452,9	310,2	799,1	78,7	877,8	3.390,4	4.268,3

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- — — Batas Negara
- — — Batas Provinsi
- - - - - Batas Kabupaten
- ~ ~ ~ Sungai
- ~ ~ ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

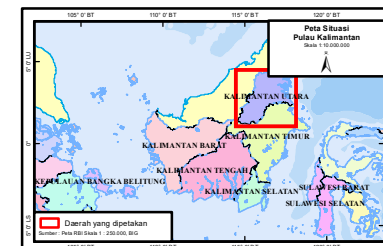
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



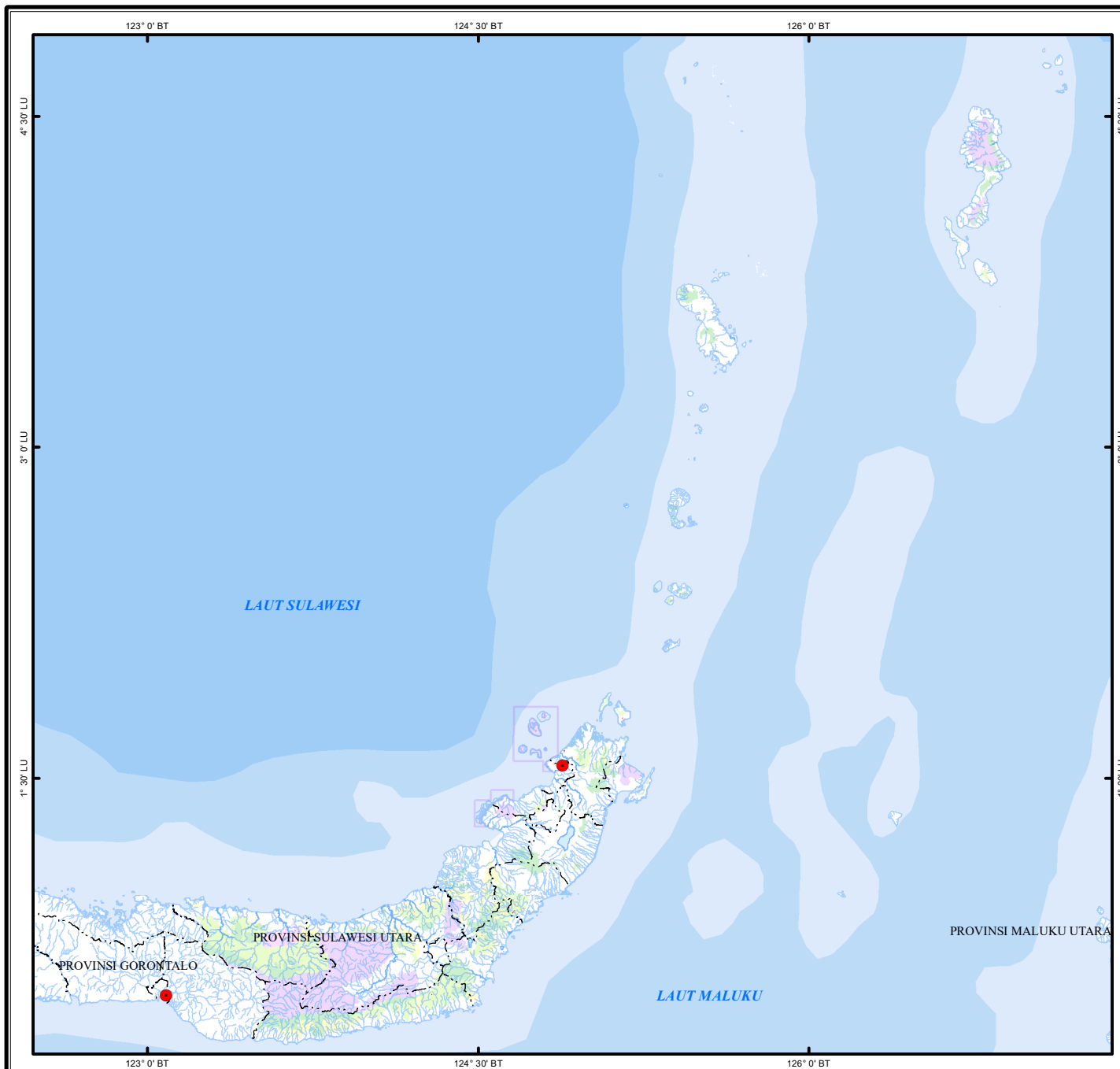
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.22 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	11,2	11,2	23,0	11,6	57,1	-	57,1	6,0	63,1
	- Hutan lahan kering primer	11,2	11,2	23,0	11,6	57,1	-	57,1	6,0	63,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	2,7	4,8	219,6	2,9	230,1	8,0	238,1	83,4	321,5
	- Hutan lahan kering sekunder	2,7	4,8	219,6	2,9	230,1	8,0	238,1	83,4	321,5
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	13,9	16,1	242,6	14,6	287,2	8,0	295,2	89,4	384,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SULAWESI UTARA

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

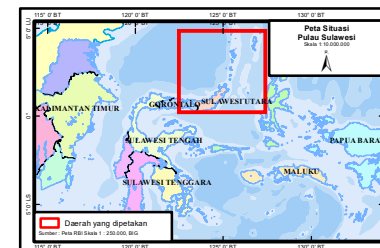
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



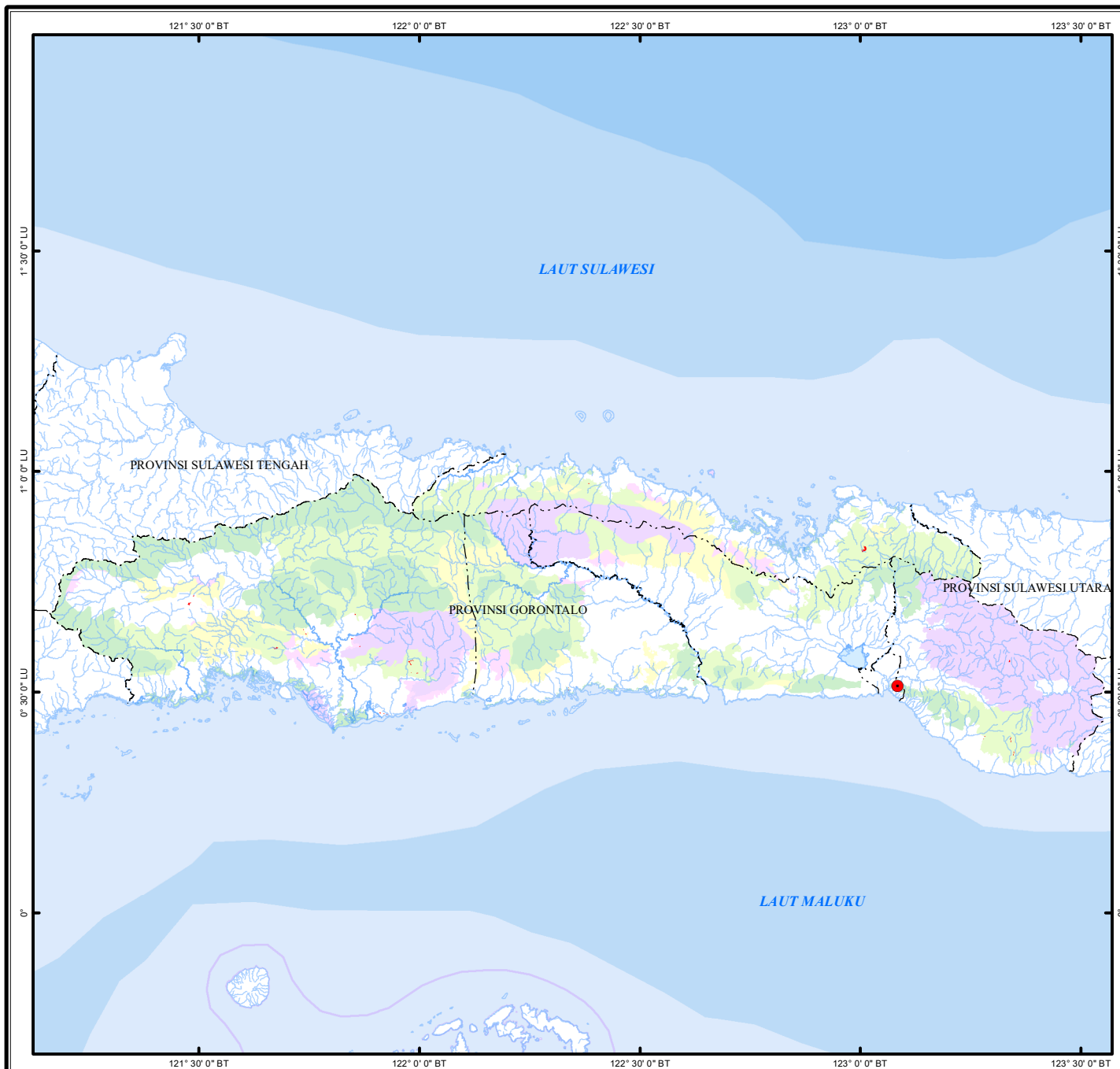
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.23 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI GORONTALO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	GORONTALO									
	A. Hutan Primer	13,8	-	18,1	-	32,0	-	32,0	-	32,0
	- Hutan lahan kering primer	13,8	-	18,1	-	32,0	-	32,0	-	32,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	4,9	24,2	178,6	11,2	218,8	3,6	222,4	83,2	305,6
	- Hutan lahan kering sekunder	4,9	7,8	178,6	11,2	202,5	3,6	206,0	45,5	251,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	16,4	-	-	16,4	-	16,4	37,7	54,1
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	18,7	24,2	196,7	11,2	250,8	3,6	254,3	83,2	337,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI GORONTALO

Skala 1: 1.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

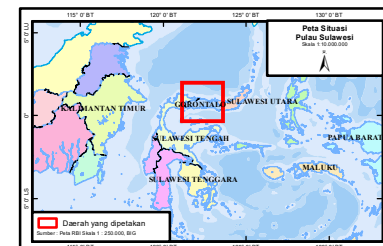
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

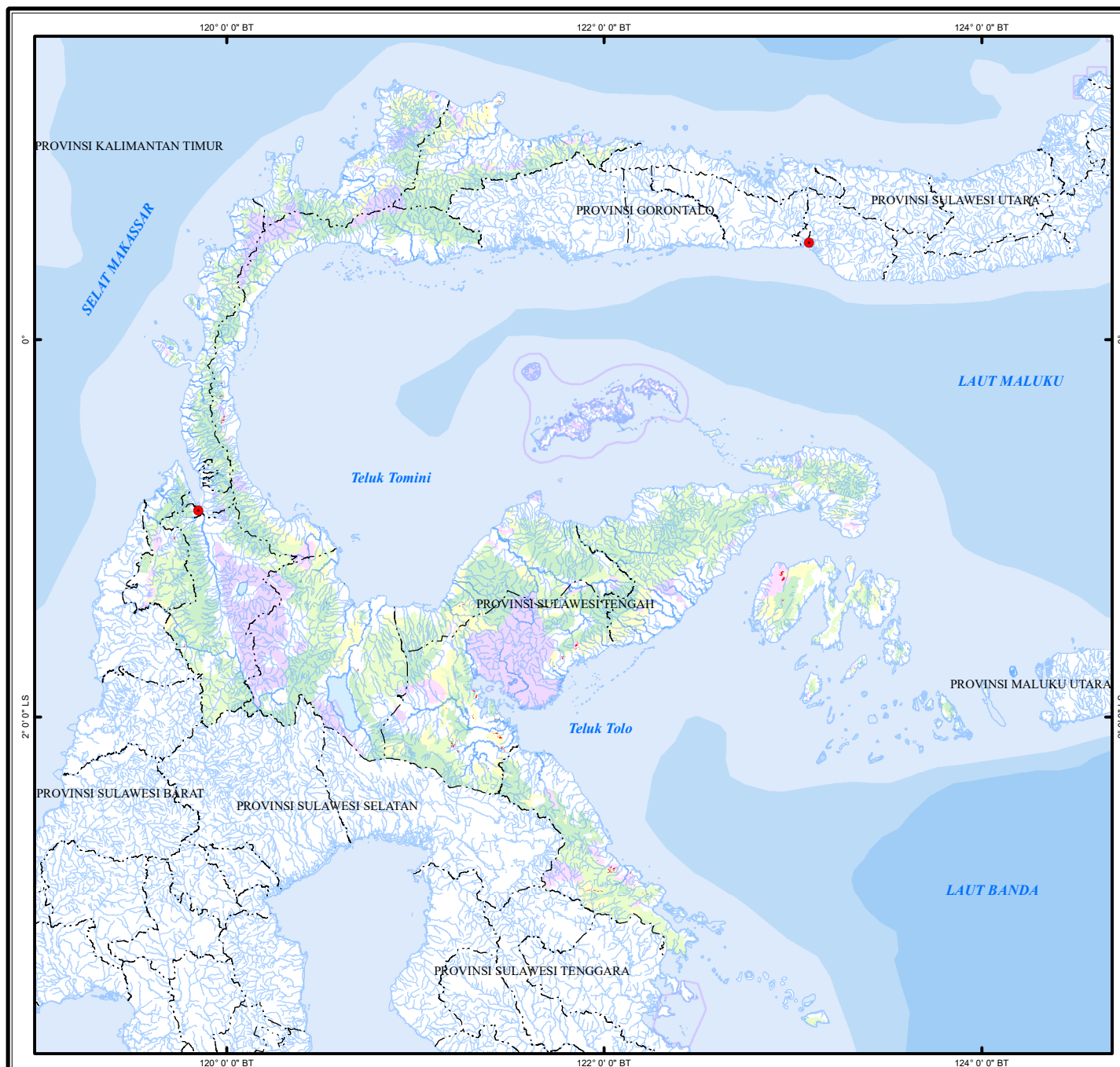
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.24 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	SULAWESI TENGAH									
	A. Hutan Primer	1,4	66,3	487,1	59,2	614,0	88,5	702,4	104,3	806,7
	- Hutan lahan kering primer	1,4	66,3	487,1	59,2	614,0	88,5	702,4	104,3	806,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	94,2	288,1	922,7	532,3	1.837,4	944,7	2.782,1	2.165,8	4.947,9
	- Hutan lahan kering sekunder	94,2	288,1	922,7	532,3	1.837,4	944,7	2.782,1	2.164,4	4.946,5
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-	5,9
	TOTAL	95,6	354,4	1.415,8	591,5	2.457,2	1.033,2	3.490,4	2.270,1	5.760,5

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

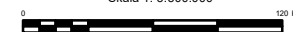
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

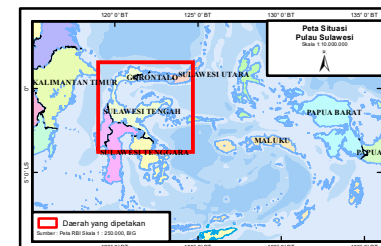
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



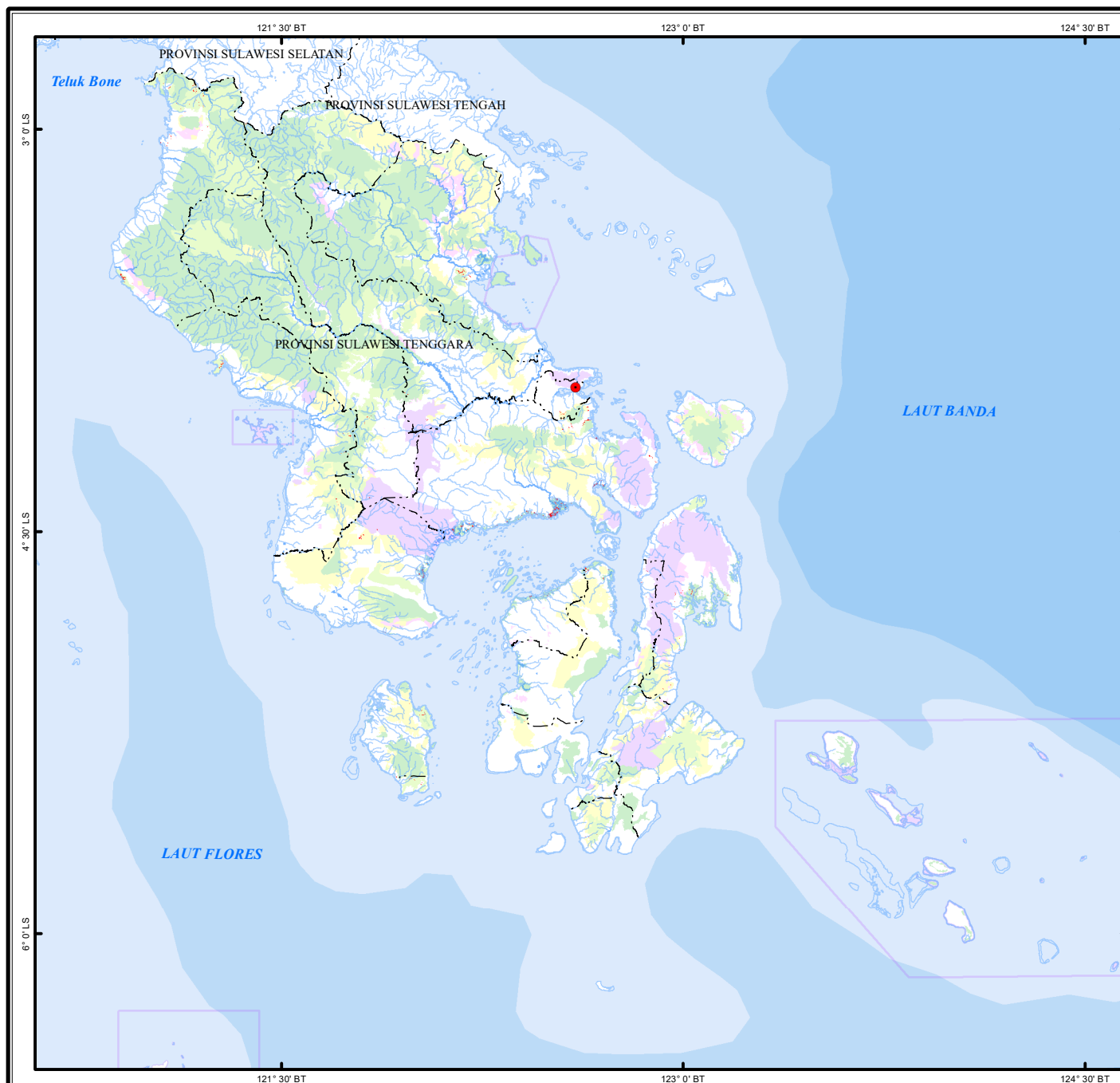
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.25 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	SULAWESI TENGGARA									
	A. Hutan Primer	-	34,0	33,1	3,8	70,9	-	70,9	6,0	77,0
	- Hutan lahan kering primer	-	34,0	33,1	3,8	70,9	-	70,9	6,0	77,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	48,4	1.744,7	644,1	185,4	2.622,6	7,2	2.629,8	910,6	3.540,4
	- Hutan lahan kering sekunder	48,4	80,4	644,1	175,8	948,7	7,2	955,9	442,2	1.398,1
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	9,6	9,6	-	9,6	-	9,6
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.664,3	-	-	1.664,3	-	1.664,3	468,4	2.132,7
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	48,4	1.778,7	677,2	189,2	2.693,6	7,2	2.700,7	916,6	3.617,4

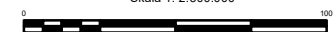
Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

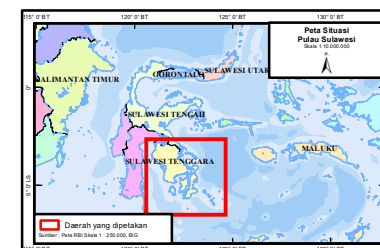
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



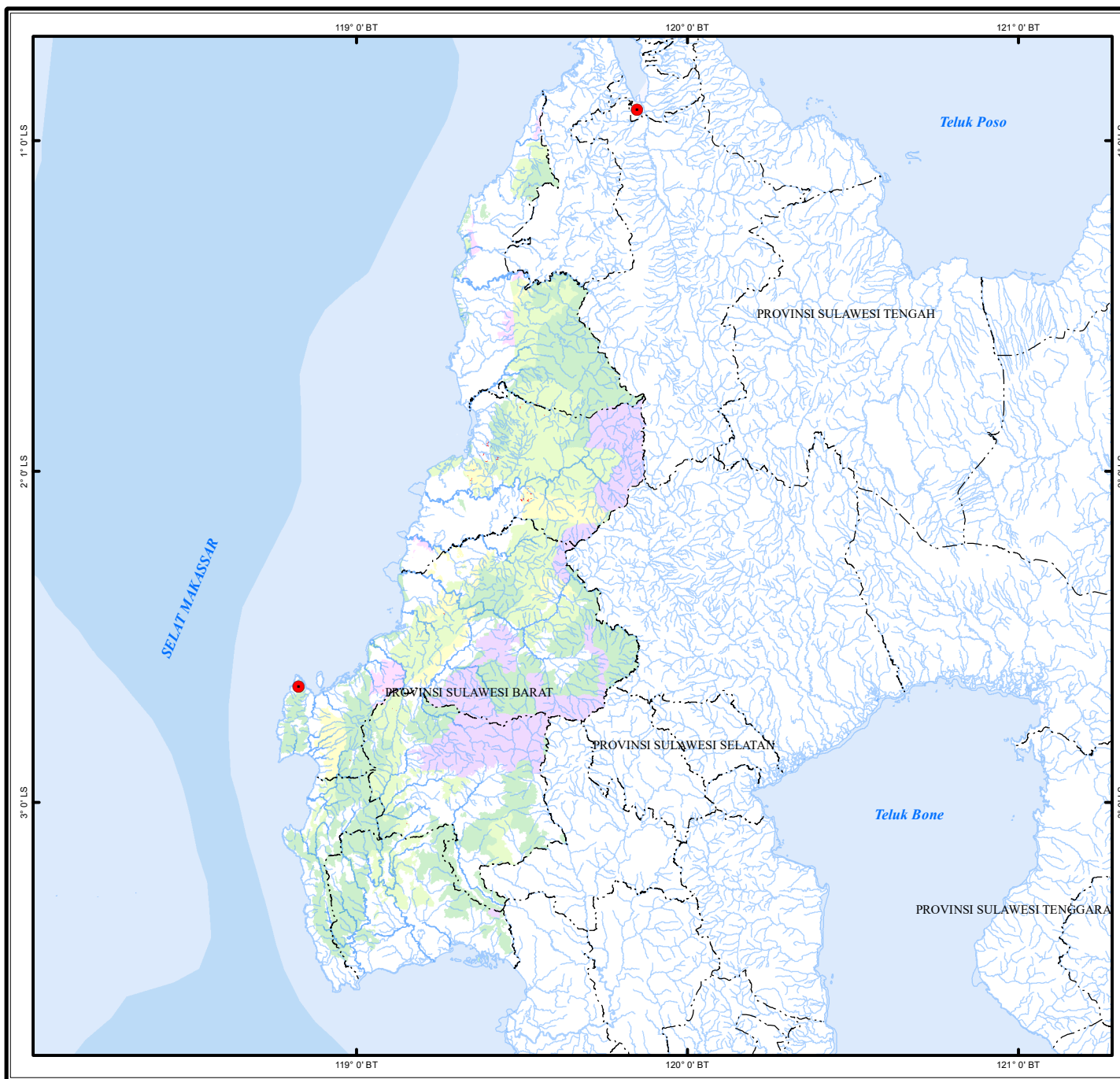
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.26 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	SULAWESI BARAT									
	A. Hutan Primer	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5
	- Hutan lahan kering primer	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	60,4	123,2	130,8	314,4	12,9	327,3	75,9	403,2
	- Hutan lahan kering sekunder	-	60,4	123,2	130,8	314,4	12,9	327,3	75,9	403,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	62,9	123,2	130,8	316,9	12,9	329,8	75,9	405,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

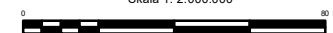
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SULAWESI BARAT

Skala 1: 2.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

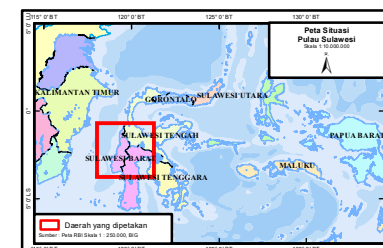
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



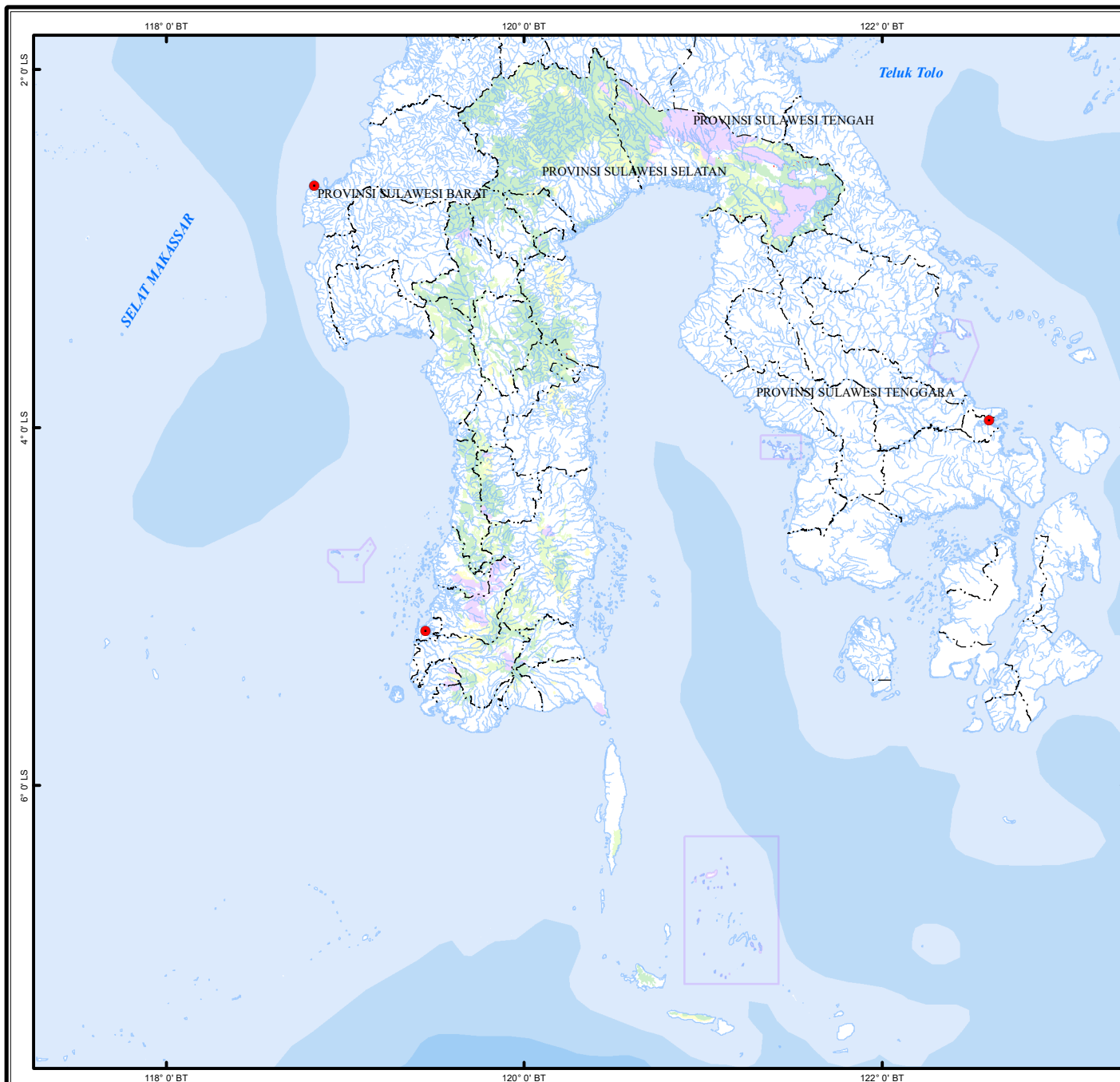
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.27 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	12,1	80,5	38,1	-	130,7	-	130,7	-	130,7
	- Hutan lahan kering primer	12,1	80,5	38,1	-	130,7	-	130,7	-	130,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	4,8	378,0	249,2	78,2	710,1	-	710,1	239,3	949,5
	- Hutan lahan kering sekunder	4,8	378,0	249,2	78,2	710,1	-	710,1	239,3	949,5
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	16,9	458,5	287,3	78,2	840,9	-	840,9	239,3	1.080,2

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

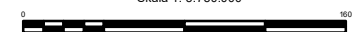
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Skala 1: 3.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

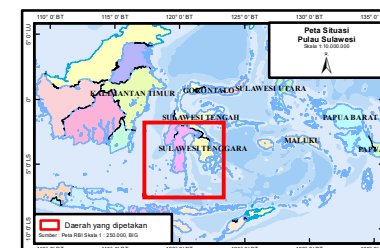
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



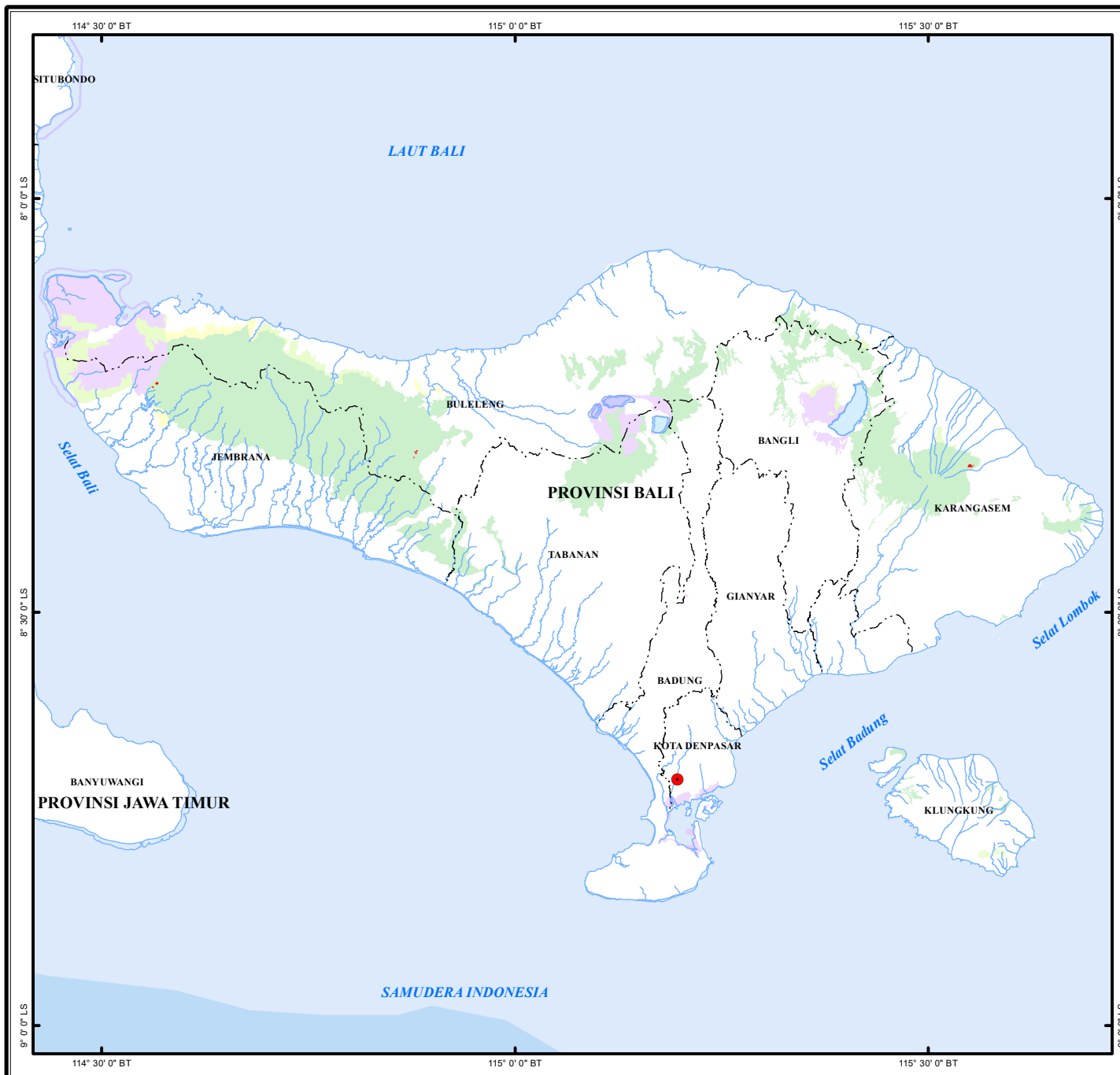
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.28 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI BALI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	BALI									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	2,0	53,2
	- Hutan lahan kering sekunder	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	-	51,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	2,0	53,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI BALI

Skala 1: 800.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

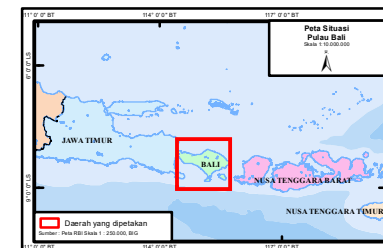
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



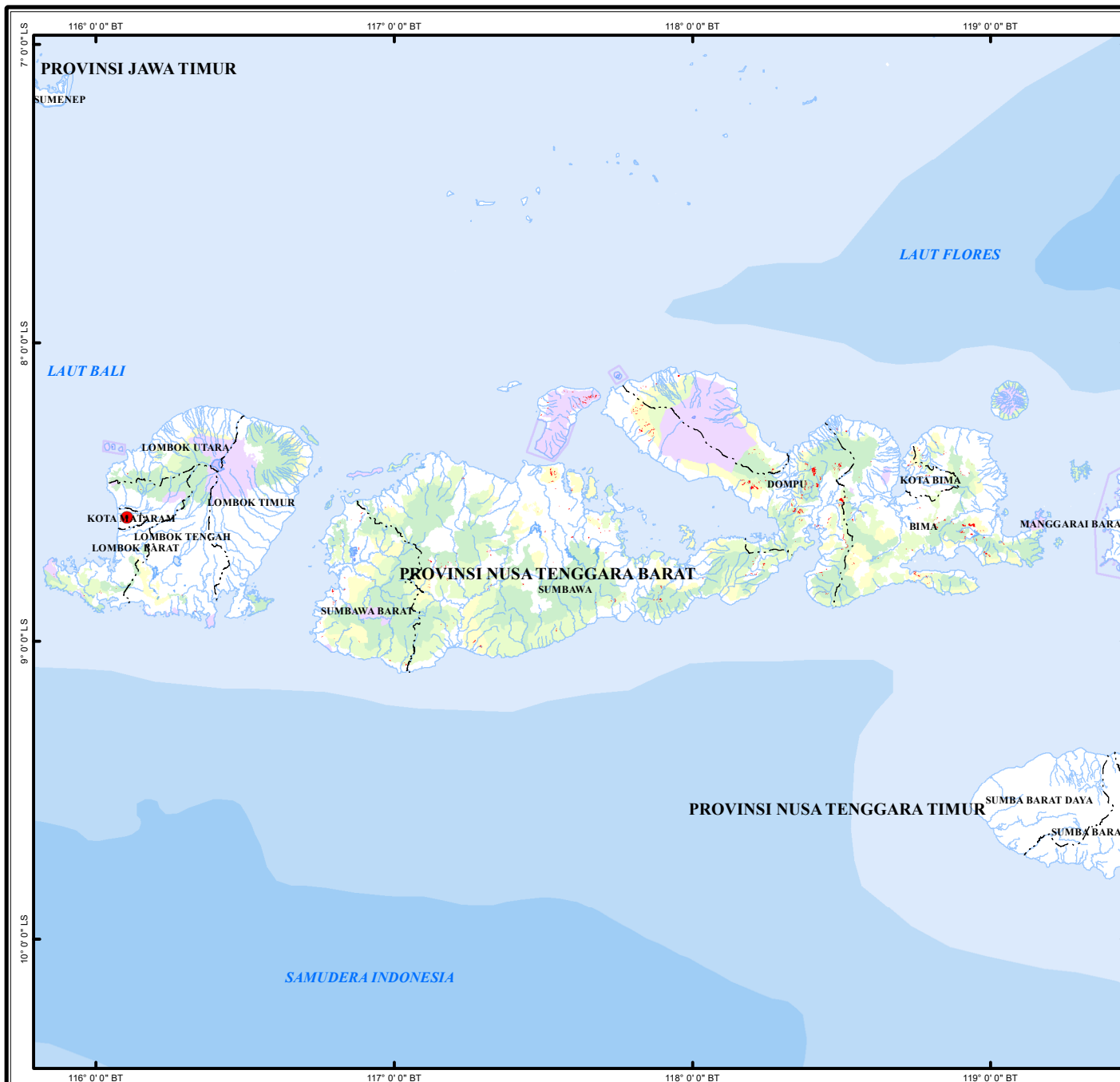
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.29 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	67,5	23,0	8,6	99,0	-	99,0	-	99,0
	- Hutan lahan kering primer	-	67,5	23,0	8,6	99,0	-	99,0	-	99,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	354,8	1.520,0	1.542,0	1.285,8	4.702,6	-	4.702,6	1.566,5	6.269,1
	- Hutan lahan kering sekunder	354,8	1.520,0	1.530,9	1.285,8	4.691,6	-	4.691,6	1.507,6	6.199,1
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	11,0	-	11,0	-	11,0	58,9	70,0
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	8,6	13,9	28,8	-	28,8	14,3	43,0
	TOTAL	354,8	1.593,8	1.573,5	1.308,2	4.830,4	-	4.830,4	1.580,8	6.411,1

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

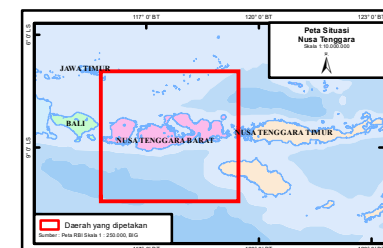
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



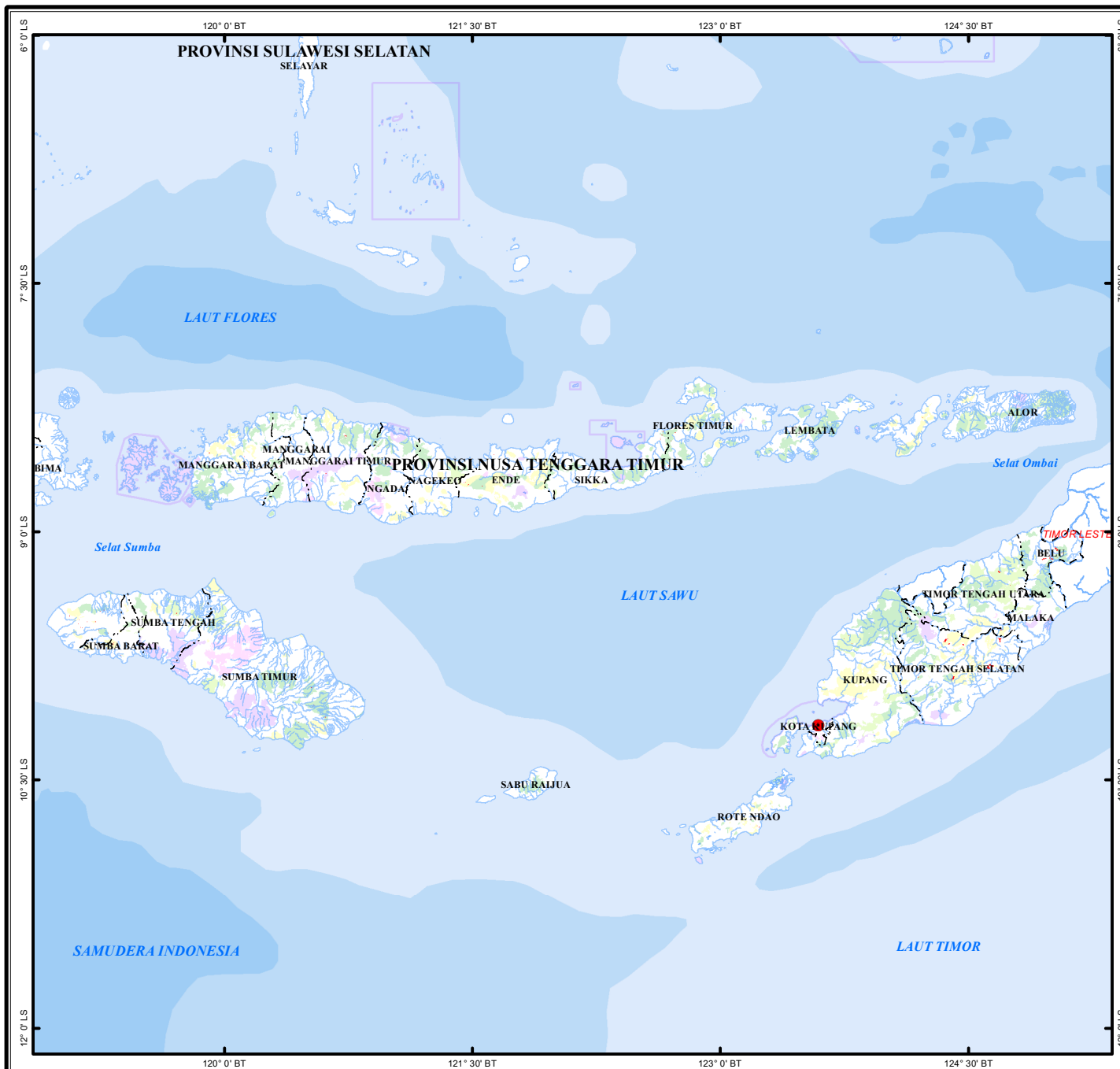
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.30 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	37,2	197,3	55,3	88,1	377,9	-	377,9	223,3	601,3
	- Hutan lahan kering primer	36,5	197,3	55,3	88,1	377,2	-	377,2	197,4	574,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	0,7	-	-	-	0,7	-	0,7	26,0	26,7
	B. Hutan Sekunder	23,8	716,1	189,1	349,0	1.278,0	-	1.278,0	2.065,4	3.343,4
	- Hutan lahan kering sekunder	23,8	716,1	189,1	349,0	1.278,0	-	1.278,0	2.041,9	3.320,0
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	61,1	913,4	244,4	437,1	1.656,0	-	1.656,0	2.288,8	3.944,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Skala 1: 4.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

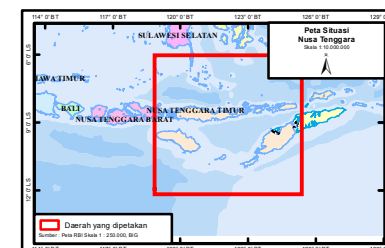
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



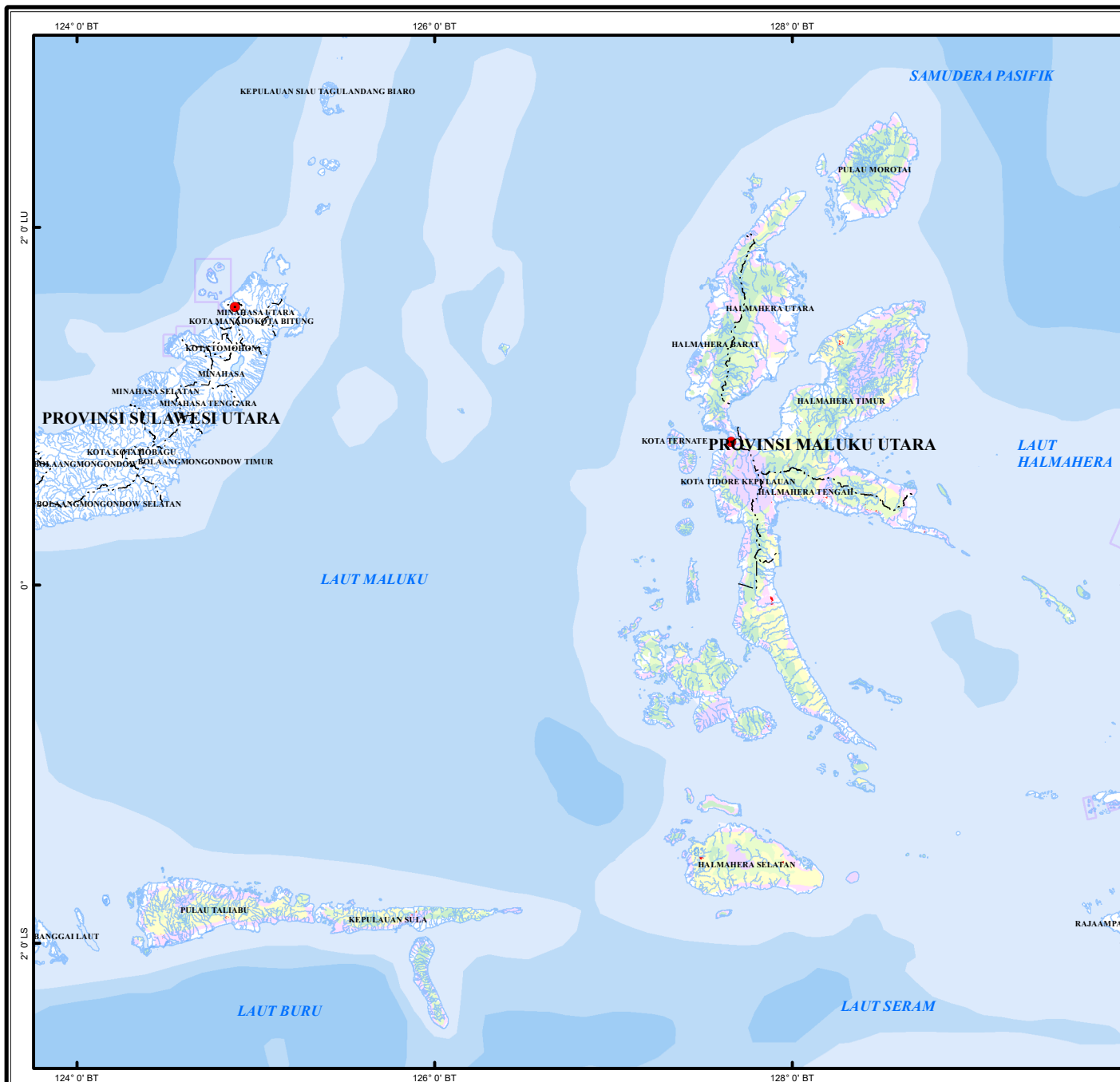
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.31 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI MALUKU UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	MALUKU UTARA									
	A. Hutan Primer	14,8	39,7	56,6	1,1	112,2	-	112,2	4,4	116,7
	- Hutan lahan kering primer	14,8	39,7	56,6	1,1	112,2	-	112,2	-	112,2
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,4
	B. Hutan Sekunder	20,2	127,3	283,8	894,9	1.326,1	880,5	2.206,6	342,5	2.549,1
	- Hutan lahan kering sekunder	20,2	127,3	283,8	894,9	1.326,1	880,5	2.206,6	342,5	2.549,1
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	35,0	167,0	340,4	896,0	1.438,3	880,5	2.318,8	346,9	2.665,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI MALUKU UTARA

Skala 1: 3.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

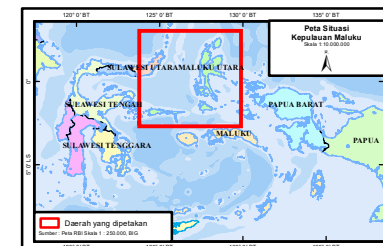
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

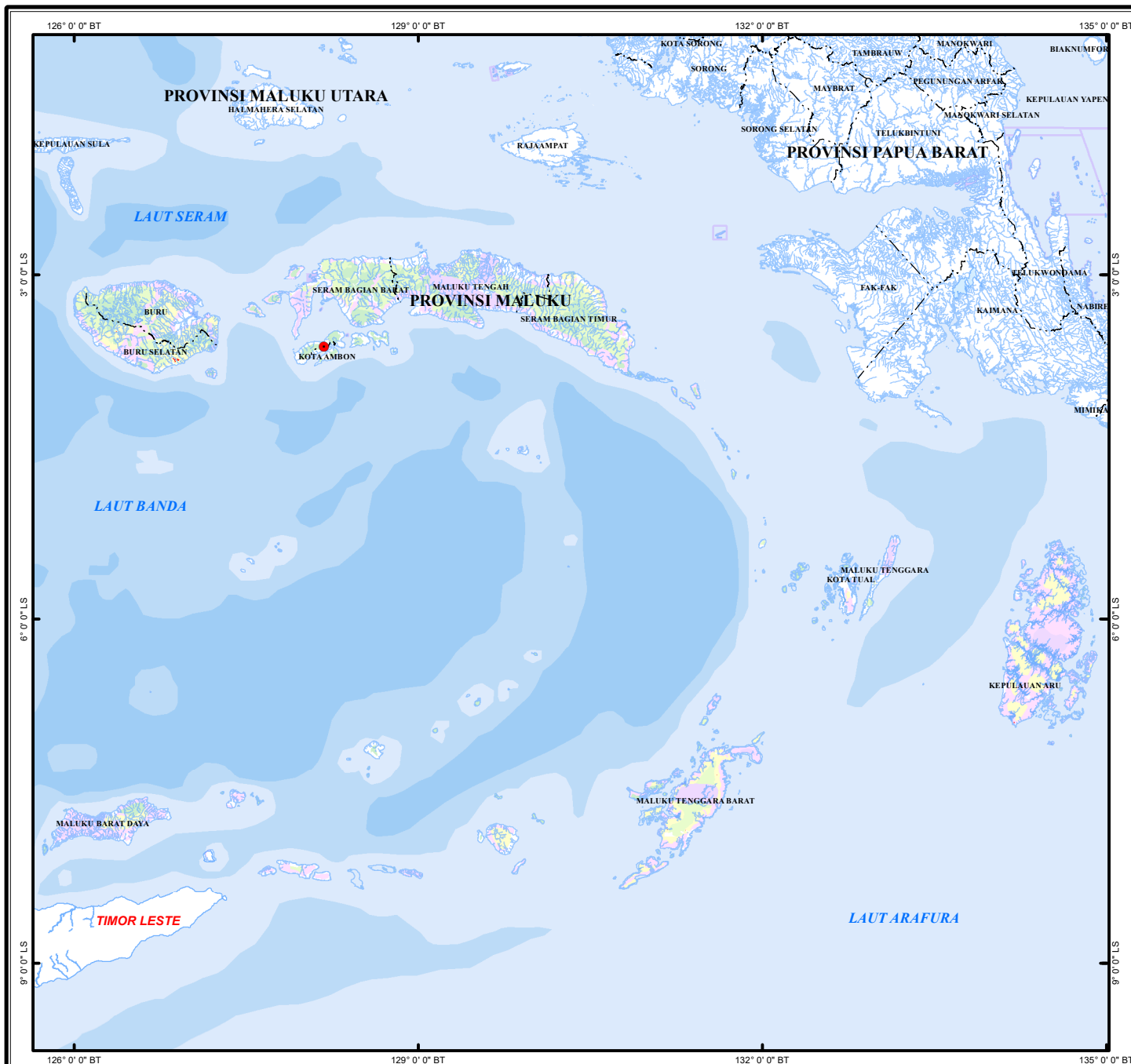
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.32 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI MALUKU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	174,1	98,4	990,3	1.262,9	147,9	1.410,8	50,5	1.461,3
	- Hutan lahan kering sekunder	-	174,1	98,4	980,2	1.252,8	133,3	1.386,1	50,5	1.436,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	10,1	10,1	14,6	24,8	-	24,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	174,1	98,4	990,3	1.262,9	149,8	1.412,7	50,5	1.463,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI MALUKU

Skala 1: 5.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

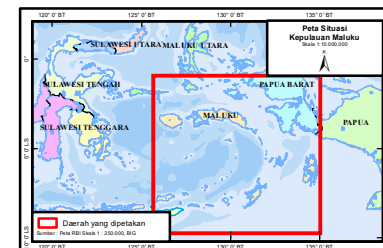
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



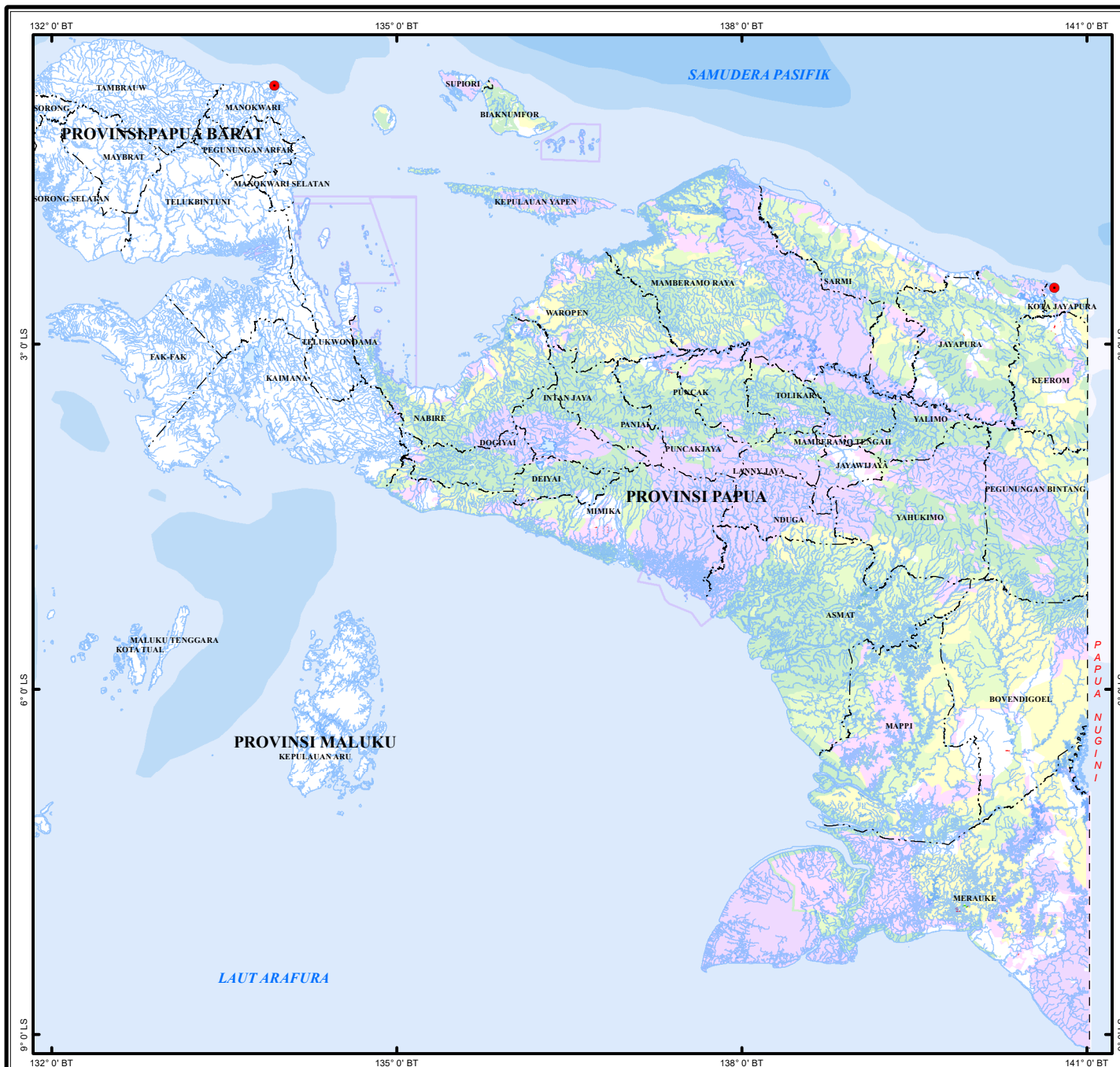
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

TABEL 3.33 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	119,9	23,2	691,4	-	834,5	282,2	1.116,7	366,8	1.483,5
	- Hutan lahan kering primer	119,9	23,2	28,7	-	171,8	14,9	186,7	365,8	552,4
	- Hutan rawa primer	-	-	662,7	-	662,7	267,4	930,1	1,0	931,1
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	67,0	44,0	515,9	1.490,4	2.117,2	528,1	2.645,3	1.242,7	3.888,0
	- Hutan lahan kering sekunder	67,0	12,0	352,5	26,7	458,2	481,9	940,1	1.030,7	1.970,8
	- Hutan rawa sekunder	-	31,9	163,4	1.463,7	1.659,0	46,2	1.705,2	205,0	1.910,2
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	- 839,5	- 839,5	-	- 839,5	-	- 839,5
	TOTAL	186,8	67,1	1.207,3	650,9	2.112,2	810,4	2.922,5	1.609,4	4.532,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;

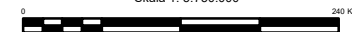
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI PAPUA

Skala 1: 5.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

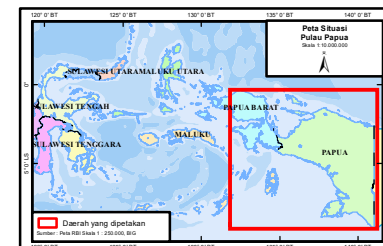
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



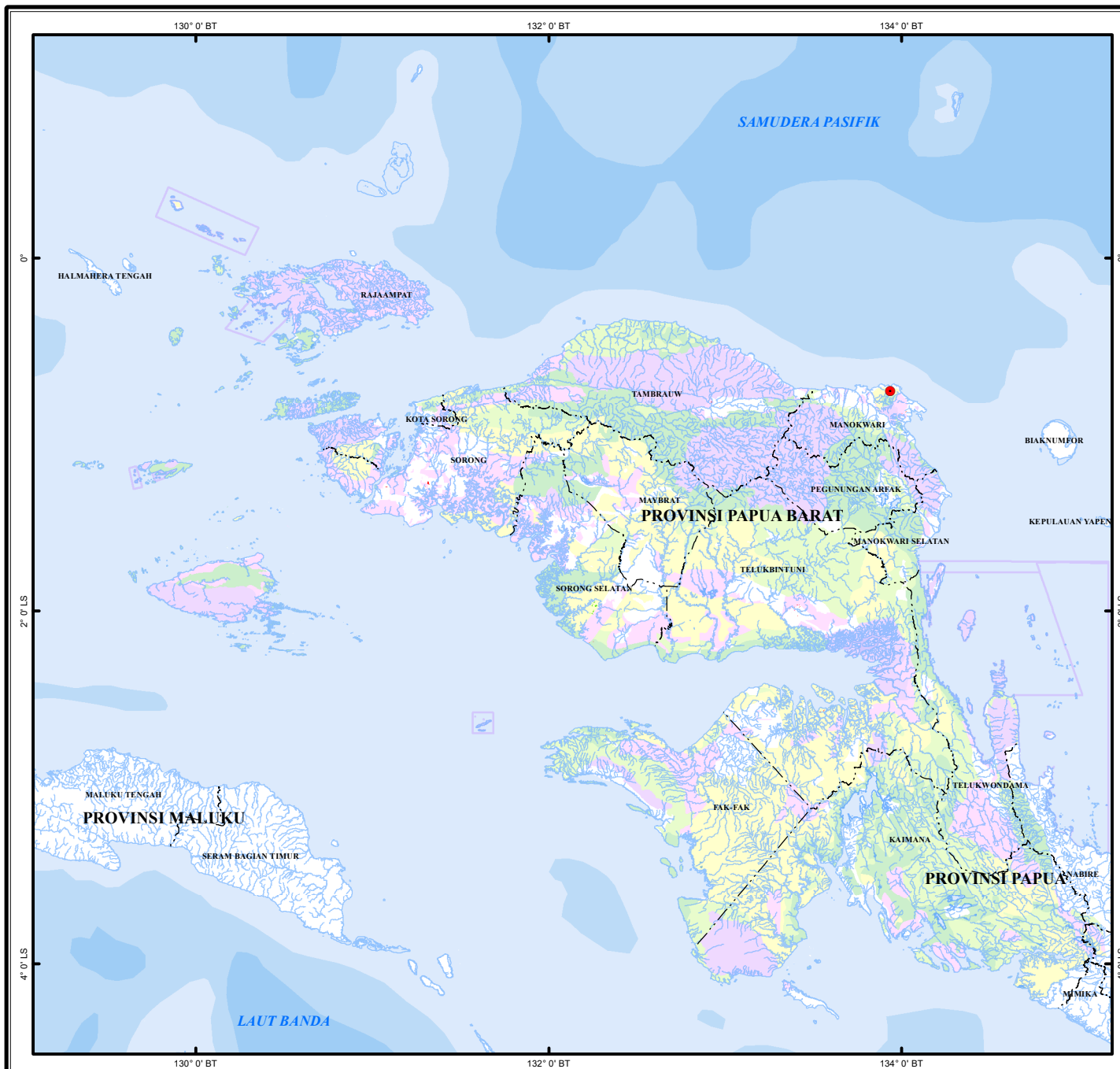
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**

TABEL 3.34 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	30,3	-	5,8	12,5	48,6	-	48,6	-	48,6
	- Hutan lahan kering primer	30,3	-	5,8	-	36,1	-	36,1	-	36,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	12,5	12,5	-	12,5	-	12,5
	B. Hutan Sekunder	20,3	38,8	28,8	65,2	153,2	98,3	251,5	334,0	585,5
	- Hutan lahan kering sekunder	4,7	5,3	28,7	-	38,7	98,3	137,0	332,3	469,4
	- Hutan rawa sekunder	-	30,6	-	-	30,6	-	30,6	-	30,6
	- Hutan mangrove sekunder	15,6	3,0	0,2	65,2	83,9	-	83,9	1,7	85,6
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	- 364,5	- 364,5	(10,5)	- 375,0	-	- 375,0
	TOTAL	50,6	38,8	34,6	(286,8)	(162,7)	87,8	(74,8)	334,0	259,2

*Ket. * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali;*

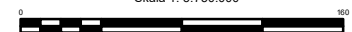
*Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*



PETA DEFORESTASI TAHUN 2021 - 2022

PROVINSI PAPUA BARAT

Skala 1: 3.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

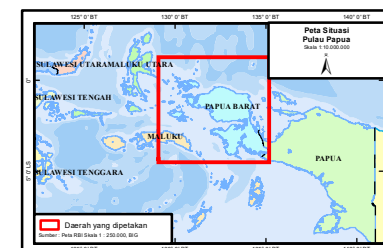
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2021
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023